

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan



KOTA PONTIANAK SEBAGAI BANDAR DAGANG DI JALUR SUTRA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1999

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

KOTA PONTIANAK SEBAGAI BANDAR DAGANG DI JALUR SUTRA

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1999**

KOTA PONTIANAK SEBAGAI BANDAR DAGANG DI JALUR SUTRA

Tim Penulis : Dra. Lisyawati Nurcahyani
Pembayun Sulistyorini, S.S
Hasanudin, S.S

Penyunting : Wiwi Kuswiah

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal
Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta 1999

Edisi 1999

Dicetak oleh : **CV. ILHAM BANGUN KARYA**

ISBN 979-9335-06-x

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan berbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Proyek IDSN), dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu, para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyek IDSN itu tidak luput dari berbagai kelemahan: isi, bahasa, maupun penyajiannya, namun kami meyakinkan pembaca bahwa kesalahan dan kelemahan itu tidaklah disengaja. Untuk itu, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik, saran perbaikan terhadap karya-karya Proyek IDSN ini. Kritik dan saran itu tentu akan sangat berguna untuk memperbaiki karya-karya proyek ini.

Kepada para penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung

maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya
Proyek IDSN sebagaimana adanya ditangan pembaca,
kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Juli 1999
Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'IGN. Anom', written over a horizontal line.

IGN. Anom
NIP. 130353848

PENGANTAR

Buku *Kota Pontianak Sebagai Bandar Dagang Di Jalur Sutra* merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999/2000.

Dalam penulisan ini diuraikan secara garis besar mengenai Kota Pontianak sebagai bandar pelabuhan dan sebagai bandar perdagangan yang meliputi struktur sosial ekonomi, perdagangan, Agama, dan Politik.

Penulisan buku ini untuk melengkapi penulisan tentang bandar pelabuhan di jalur sutra, juga untuk menambah informasi kesejarahan mengenai perkembangan Kota Pontianak, baik sebagai bandar dagang di jalur sutra maupun adanya perubahan yang terjadi akibat perkembangan tersebut.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kesejarahan dan memberikan informasi yang memadai bagi yang berminat pada kajian tersebut terutama untuk meningkatkan kesadaran sejarah bagi generasi muda.

Jakarta, Juli 1999

**Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional**



Wiwi Kuswiah
NIP. 131125902

PENGANTAR

Kota Pontianak Sebagai Bandar Dagang Di Jalur Sutra merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999/2000.

Dalam penulisan ini perhatian lebih difokuskan pada fungsi Pontianak sebagai bandar pelabuhan dan sebagai bandar perdagangan yang terbesar di Kalimantan Barat, yang juga membicarakan sistem budaya. Kondisi tersebut didukung oleh keadaan geografi dan demograsi di Kalimantan Barat yang sangat menunjang untuk terbentuknya suatu jaringan maritim yang sangat kuat yang menghubungkan wilayah barat dengan wilayah timur melalui komunikasi dan kontak budaya.

Kajian mengenai Kota Pontianak sebagai bandar pelabuhan di jalan sutra ini sangat rumit. Hal ini disebabkan bahan-bahan yang dijadikan sebagai data jumlahnya sangat terbatas, sehingga dalam merekonstruksi mengenai kota Pontianak sebagai bandar pelabuhan di jalur sutra kurang lengkap bila dibandingkan dengan kajian yang pernah dilakukan pada masa sebelumnya, sehingga dalam merekonstruksi mengenai kajian tersebut dengan berlandaskan pada data-data yang ada pada masa dulu dengan data-data yang ada pada masa sekarang ini.

Penulisan ini dipusatkan pada masa berdirinya Keraton Kadriah Pontianak sebagai salah satu kerajaan yang bercorak

Islam dengan politik yang diletakkan pada strategi maritim. Dalam penulisan ini, hanya mengupas secara garis besarnya saja ditinjau dari sudut pandang sejarah, sehingga masih membuka kesempatan untuk penelitian sejenis secara mendalam. Namun demikian penulisan ini sudah memberikan gambaran mengenai perkembangan kota Pontianak sebagai jalur perdagangan internasional dan aspek yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan pelabuhan Pontianak sebagai bandar perdagangan serta perubahan yang terjadi akibat adanya perkembangan tersebut.

Jakarta, Juli 1999

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktorat Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Peta	xv
Daftar Foto	xvii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tinjauan Pustaka	4
1.3 Ruang Lingkup dan Tujuan	7
1.4 Metode Penelitian	8
Bab II Kota Pontianak	
2.1 Sejarah Kesultanan Pontianak	11
2.2 Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya	15
2.2.1 Sosial	15
2.2.2 Ekonomi	20
2.2.3 Budaya	23

Bab III	Struktur Sosial Ekonomi	
3.1	Pertumbuhan Penduduk dan Pola Pemukiman ...	29
3.2	Kelompok-kelompok Sosial	36
3.3	Pelapisan Sosial	44
3.4	Hubungan Sosial	51
Bab IV	Perdagangan, Agama dan Politik	
4.1.	Perdagangan	59
4.1.1	Jalur dan Pusat-pusat Pelayaran	59
4.1.2	Teknologi Dalam Pelayaran	63
4.1.3	Pelabuhan	66
4.1.4	Perdagangan di Pontianak	70
4.2	Agama dan Politik	82
Bab V	Penutup	91
Daftar Pustaka	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jenis-jenis mata pencaharian hidup masyarakat Kalimantan	20
Tabel 2 Jenis-jenis mata pencaharian masyarakat pendukung.....	21

DAFTAR PETA

	Halaman
Peta 1 Peta Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat	100
Peta 2 Peta Kotamadya Pontianak.....	101
Peta 3 Peta Kecamatan Pontianak Timur	102

DAFTAR FOTO

	Halaman
Foto 1 Pelabuhan Pontianak	103
Foto 2 Aktifitas Pelabuhan Pontianak	103
Foto 3 Keraton Kadriah	104
Foto 4 Masjid Jami'	104
Foto 5 Tugu Digoelis	105
Foto 6 Tugu Khatulistiwa	105
Foto 7 Kampung Bugis	106
Foto 8 Kelurahan Dalam Bugis	106
Foto 9 Perkampungan Bangka-Belitung	107
Foto 10 Kampung Kamboja	107
Foto 11 Kampung Saigon	108
Foto 12 Kampung Arab	108
Foto 13 Rumah Panjang	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak jaman Pemerintahan Kerajaan Pontianak memegang peranan penting baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Keberadaan kota Pontianak sebagai pusat perekonomian terutama perdagangan, dapat ditinjau dari letaknya yang strategis di persimpangan antara dua sungai besar yaitu Sungai Landak dan Sungai Kapuas.

Syarif Abdurrahman yang dianggap pendiri kerajaan Pontianak adalah ayah Syarif Abdurrahman Al Habib Husin Al Qadrie. Ia datang dari Haldramaut, selain untuk berdagang juga untuk menyebarkan agama Islam ke daerah yang disinggahi. Untuk pertama kalinya ia datang ke Kalimantan Barat mengunjungi Kerajaan Matan yang ada di Ketapang pada tahun 1753 (Kartodirdjo, 1993: 283). Di Kerajaan Matan Al Habib Husin diterima dengan baik oleh Sultan Matan, karena sikap dan budi pekertinya yang baik. Untuk lebih mempererat persaudaraan mereka, maka oleh Sultan Matan, Al Habib Husin dinikahkan dengan saudara perempuannya dan memperoleh putera yang diberi nama Syarif Abdurrahman.

Oleh karena terjadi kesalah pahaman antara keduanya, maka Al Habib Husin bersama keluarganya pergi meninggalkan Kerajaan Matan menuju ke Kerajaan Mempawah. Oleh Empu

Daeng Menambon, Raja Mempawah, kehadiran mereka diterima dengan tangan terbuka. Mulailah rombongan Al Habib Husin menjalani kehidupan baru di Mempawah, dan mempunyai peranan penting sebagai penasihat raja dan sekaligus sebagai penyiur agama Islam yang berhasil.

Setelah menjelang dewasa, Syarif Abdurrahman melakukan petualangan hingga Banjarmasin. Sebagai seorang pemuda yang gagah berani serta mempunyai semangat yang tinggi pernah melakukan penyerangan terhadap kapal Perancis di daerah pasir, juga melakukan perompakan terhadap jung Cina. Oleh sultan Banjarmasin Syarif Abdurrahman diambil menantu dikawinkan dengan anaknya yang bernama Hatu Sirih Anom.

Pada akhir tahun 1771 Syarif Abdurrahman memboyong keluarga serta pengikutnya pergi meninggalkan Kerajaan Mempawah. Kepergiannya adalah untuk mencari pemukiman baru yang cocok dengan ambisinya. Mereka berlayar memasuki persimpangan antara Sungai Kapuas kecil dengan Sungai Landak. Di tempat itulah ditembakkan meriam, dan tempat jatuhnya meriam didirikan masjid yang dikenal dengan nama Masjid Jami' tepat pada tanggal 23 Oktober 1771. Setelah didirikan masjid, maka baru dibangun keraton yang diberi nama "Keraton Kadriah".

Di sekitar keraton timbul pemukiman-pemukiman baru yang dibangun oleh para pengikut Syarif Abdurrahman. Dalam waktu yang singkat perkampungan baru tumbuh dengan cepat sebagai salah satu pendukung perkembangan kesultanan Pontianak. Perkampungan yang berkembang di sekitar keraton sampai sekarang mempunyai ciri khas, karena hampir kebanyakan penduduknya mempunyai wajah yang cantik dan tampan, mirip dengan orang Arab. Perkampungan di sekitar keraton sampai sekarang dikenal dengan nama Kampung Dalam Bugis.

Perkembangan kesultanan Pontianak tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya antara lain:

- Faktor geografis yang strategis
- Faktor interaksi sosial
- Faktor kepemimpinan
- Faktor ekonomi yang menunjang.

Dari letaknya yang strategis, pelabuhan Pontianak banyak dikunjungi oleh para pedagang baik dari daerah maupun luar daerah, sehingga dengan cepat pelabuhan Pontianak menjadi bandar perdagangan yang besar di Kalimantan Barat.

Hal ini juga ditunjang oleh kepemimpinan Sultan Syarif Abdurrahman yang berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Banyak kerajaan-kerajaan di sekitarnya menjadi takluk seperti Sanggau, Mempawah, Kubu, Landak dan lain-lain. Dengan penguasaan atas kerajaan-kerajaan itu, maka sumber-sumber ekonomi yang penting mengalir ke Pontianak seperti hasil-hasil hutan, emas, biji besi dan lain-lain.

Hasil-hasil tambang terutama emas inilah yang menarik pedagang luar untuk datang ke Kalimantan Barat. Ketertarikan dunia luar terutama suku bangsa Cina secara bertahap datang ke Kalimantan Barat khususnya bertujuan untuk mengolah emas. Sehingga perkembangan bangsa ini sangat pesat, merupakan salah satu suku yang terbesar di Kalimantan Barat. Sebaliknya dari negeri Cina mereka memperkenalkan guci dan keramik sebagai salah satu barang dagangan mereka, terbukti dengan banyaknya temuan-temuan arkeologi dalam bentuk guci dari berbagai dinasti yang ada di Cina pada waktu itu.

Situasi dan kondisi perkembangan Kota Pontianak sebagai kota pelabuhan terbesar di Kalimantan Barat, disebabkan oleh beberapa faktor. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan tadi masih ada aspek-aspek lain yang mendorong perkembangannya, antara lain aspek politik yang terjadi baik di dalam maupun di luar Kalimantan Barat ikut mengambil peranan penting.

Penelitian ini bermaksud mencari data-data dan informasi mengenai sejauh mana perkembangan Kota Pontianak dalam

jalur perdagangan internasional dan aspek yang mendorong perkembangan pelabuhan Pontianak sebagai bandar perdagangan, serta nampak apa yang diakibatkan oleh perkembangan tersebut.

Nama pelabuhan Pontianak sendiri, tidak mempunyai nama khusus yang mencerminkan kedaerahan. Nama pelabuhan Pontianak lebih dikenal, karena merupakan sebutan masyarakat untuk menunjuk satu-satunya pelabuhan yang ada di Pontianak.

1.2 Tinjauan Pustaka

Ada beberapa catatan mengenai Kalimantan Barat yang biasa dijadikan sumber informasi yaitu buku karangan Vleming J.L yang berjudul "Net Chinese Zakenlevel In Netherlands India", di tulis tahun 1926. Buku tersebut berbahasa Belanda.

Vleming dalam bukunya menceritakan kehidupan orang-orang Cina di Kalimantan Barat, dari awal kedatangan bangsa Cina sampai menetap di Kalimantan Barat, terutama di daerah Monterado dan daerah-daerah penambangan emas lainnya. dengan kepandaian mereka mengolah emas dan berdagang menyebabkan ekonomi rata-rata masyarakat Cina pada waktu itu lebih tinggi dari tingkat ekonomi masyarakat setempat. Dengan berpindahnya orang-orang Cina memegang daerah-daerah penambangan emas dan menggeser tanah-tanah pertanian penduduk, menyebabkan banyak penduduk yang kehilangan mata pencaharian.

Selain itu masyarakat Cina juga terkenal sebagai pedagang yang berhasil, dengan membawa barang dagangan seperti bahan-bahan kain dari sutera, barang-barang rumah tangga, minyak tanah dan lain-lain. Untuk keperluan tersebut pedagang Cina sering dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, sebagai pedagang perantara dengan penduduk pribumi. Dari pedalaman pedagang Cina banyak membawa barang dagangan hasil-hasil hutan seperti kopra, karet, rotan, kayu, damar, tengkawang dan lada. Barang-barang tersebut merupakan dagangan yang laku di pasaran dunia.

Bangsa Eropa sendiri di Pontianak mendirikan perusahaan Firma Ekspor dan Impor. Barang yang diekspor biasanya adalah karet dan kelapa (kopra), diperoleh dari pedagang Cina. Sedang orang Cina selain banyak mendirikan kongsi-kongsi juga mendirikan pabrik. Kongsi-kongsi besar seperti yang dipimpin oleh Haka. Hoklo's dan Ijoctjoe's menguasai penambangan emas dan untuk pabrik biasanya bergerak di bidang pengolahan karet, oli, dan gambir.

Pada bukunya Vleming juga menyebutkan situasi sosial, ekonomi maupun budaya masyarakat pribumi khususnya suku Dayak. Dia juga menyatukan agama yang dianut oleh masyarakat, bahkan perubahan agama suku Dayak dari agama tradisional (animisme) menjadi Islam, juga merubah identitas sukunya yaitu menjadi suku Melayu. Perubahan ini menimbulkan berbagai dugaan dari sementara orang ada kemungkinan hal ini disebabkan karena ada perasaan malu dari mereka untuk mengakui identitas sukunya, atau perasaan bangga apabila menyebut dirinya orang Melayu.

Walaupun pengungkapan-pengungkapan dari Vleming bersifat umum meliputi seluruh Kalimantan Barat, namun informasi mengenai perdagangan banyak disinggung oleh Vleming, sehingga sumber informasinya sangat mendukung dalam penelitian ini.

Kepustakaan kedua yang penting adalah karangan J.U. Lontaan, yang berjudul "Sejarah-Hukum Adat dan Istiadat Kalimantan Barat". Dalam bukunya yang setebal + 100 halaman. Lontaan menulis tentang perjalanannya mengelilingi Kalimantan Barat. Dari perjalanannya itu dia banyak melakukan penelitian mengenai sejarah kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat. Selain itu juga mengenai adat istiadat penduduk setempat terutama Dayak, Melayu dan Cina.

J.U. Lontaan menulis awal mula kedatangan bangsa Cina ke Indonesia melalui rute pelayaran menyusur pantai Asia Timur dan kembalinya melalui Kalimantan Barat, dan Filipina dengan mempergunakan angin musim pada abad ke 3 atau ke 4.

Dari hubungan yang terus terjalin antara Kalimantan Barat-Tiongkok menyebabkan orang-orang Cina tertarik untuk tinggal menetap di Kalimantan Barat. Maka pada tahun 1745, didatangkan besar-besaran masyarakat Cina untuk kepentingan kongsi. Selain Cina datang juga bangsa lain seperti Melayu dari Johor, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya.

Pada kenyataannya Lontaan masih banyak menggunakan sumber cerita rakyat dan mempunyai ruang lingkup yang luas, maka pembahasan setiap masalah terasa dangkal dan lebih bersifat diskriptif dalam upaya mengungkapkan kejadian-kejadian masa lalu yang didasarkan pada data historis yang sering tidak sinkron antara yang satu dengan yang lain.

Tentang Pontianak, Lontaan menggambarkan sejarah berdirinya kerajaan Pontianak, sampai kedatangan pemerintah Belanda dan Jepang. Selain itu dibahas pula asal mula nama Pontianak, didasarkan pada cerita rakyat.

Meskipun Lontaan membahas masalah yang bersifat umum, namun menyangkut aspek yang beraneka ragam. Oleh sebab itu catatan ini sangat perlu untuk menjadi perhatian kita sebagai bahan informasi dan sebagai bahan perbandingan.

Kepustakaan ketiga yang bisa dijadikan sumber informasi; yaitu tulisan dari Victor Purcell berjudul *"The Chinese in South East Asia Tahun 1965*.

Dalam buku tersebut diceritakan mengenai kehadiran Cina di Asia Tenggara, yaitu di daerah Jawa, Kalimantan, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Latar belakang dari migrasi orang-orang Cina ke daerah Asia Tenggara juga diceritakan secara panjang lebar, sehingga dengan adanya peristiwa ini menimbulkan adanya dugaan bahwa percampuran antara orang Cina dengan penduduk pribumi dikatakan "separuh Cina", seperti yang terjadi di daerah Kalimantan penduduk pribumi terutama suku Dayak yang hidup di pedalaman mempunyai darah campuran dengan Cina sehingga tak heran orang-orang Dayak memiliki beberapa persamaan dalam ciri secara lahir.

Pernyataan bahwa dusun (desa) adalah “separuh Cina” adalah seringkali dibuat oleh Penduduk Kalimantan sendiri. Teori ini mempunyai peranan penting yang menimbulkan perdebatan.

Dalam buku tersebut diceritakan lebih lanjut mengenai perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Cina melalui rute-rute tertentu dan barang-barang dagangan yang biasa dibawa. Malaka merupakan rute penting yang dilalui Cina, sebelum ke Jawa. Kemudian Singapura dan Kalimantan Utara juga menjadi bagian dari persinggahan mereka.

Hubungan Cina dengan Asia Tenggara sudah dimulai sejak abad 3 M, dengan datangnya mereka ke Kamboja dan Siam. Kemudian ke negara-negara lain termasuk Indonesia, terbukti dengan diketemukannya Pahatan batu di wilayah Pasemah di Sumatra Selatan. Pada masa Dinasti Han dilakukan penggalian di Sumatra, Jawa dan Kalimantan.

Secara umum tulisan Victor Purcell mempunyai skope yang sangat luas, namun begitu banyak keterkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan yaitu mengenai perdagangan.

1.3 Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dibatasi oleh beberapa aspek yang dapat mengungkapkan perkembangan Kota Pontianak sebagai bandar perdagangan dan sekaligus sebagai kota Islam. Aspek-aspek tersebut dapat dilihat dari:

- a) Politik dan pemerintahan
- b) Ekonomi dan perdagangan
- c) Agama
- d) Lingkungan fisik
- e) Struktur masyarakat

Tentunya juga ditunjang aspek-aspek lain seperti sosial budaya, yang dengan sendirinya tidak dapat ditinggalkan, walaupun dalam skala yang tidak begitu menonjol.

1.4 Metode Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Pontianak sebagai bandar perdagangan, maka ada hal-hal yang perlu kita pahami bahwa di situ ada unsur fisik yaitu pelabuhan itu sendiri ditunjang dengan situasi dan kondisinya dari unsur non fisik. Unsur non fisik yang dimaksud adalah bahwa di tempat ini pernah terjadi transaksi dan pertukaran barang dagangan dengan para pedagang dari berbagai daerah. Hubungan dagang tersebut jelas berdampak luas terhadap lingkungan sekitarnya, baik itu unsur politik, sosial, ekonomi maupun agama.

Metode yang dipergunakan adalah pengumpulan berbagai data yang menunjang penelitian, kemudian pengolahan dan analisis data.

Tahap Pengumpulan Data; kegiatan ini dilakukan dalam dua hal yaitu pengumpulan data-data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui survei. Selain ke daerah lokasi penelitian yaitu pelabuhan Pontianak, juga dilakukan survei di keraton Pontianak dan pemukiman sekitar keraton, tempat-tempat lain seperti museum dan rumah panjang. Untuk data penunjang melengkapi data primer yang sudah ada dilakukan pencarian data sekunder yaitu ke pustakaan.

Tahap Pengolahan Data; setelah semua data yang diperlukan terkumpul maka dilakukan pengolahan data. Dari situ akan diperoleh data yang bersifat umum dan khusus yang dimaksudkan dengan data umum di sini adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan gambaran Kota Pontianak sebagai ibukota Kalimantan Barat yang tidak terlepas dengan unsur demografi dan monografi daerah setempat. Sedang data khusus, tentunya aspek-aspek yang secara khusus memberikan informasi atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran kota Pontianak sebagai kota perdagangan.

Tahap Analisis Data; setelah dilakukan pengolahan data di atas, selanjutnya dilakukan analisis sejarah dengan menggunakan analisis sejarah dan pendekatan ilmu sejarah serta teori-teori lain.

BAB II

KOTA PONTIANAK

2.1 Sejarah Kesultanan Pontianak

Berdirinya kerajaan Pontianak tepat pada tanggal 23 Oktober 1771, dijadikan sebagai peringatan hari jadi kota Pontianak. Sultan Abdurrahman sebagai pendiri kota Pontianak sampai sekarang makamnya masih dikunjungi orang, terutama orang-orang yang masih percaya akan kesaktian dari Sultan Abdurrahman.

Jauh sebelum Abdurrahman lahir, ayahnya Al Habib Husin Alqadrie datang ke Kerajaan Matan di Ketapang. Kedatangan beliau disambut baik oleh Raja Matan dengan diangkat sebagai Multi Peradilan Agama dan sekaligus sebagai penyebar syariat agama Islam. (J.U. Lotaan. 1975: hlm. 229)

Al Habib Husin Alqadrie kemudian menikah dengan Nyai Tua dan memperoleh anak 4 yaitu yang pertama diberi nama Syarifah Chatidjah, kedua Syarif Abdurrahman, ketiga Syarifah Aliyah dan yang terakhir adalah Syarif Alwi. Setelah cukup lama berada di Kerajaan Matan, Al Habib Husin beserta keluarganya hijrah ke Kerajaan Mempawah. Sebab-sebab kepindahannya dikatakan adanya kekecewaan Al Habib Husin terhadap sikap Raja Matan.

Di Mempawah keluarga Al Habib disambut dengan gembira oleh Panembahan Daeng Menambon dan dibuatkan tempat

tinggal dan surau sesuai dengan permintaannya. Tercatat masa kepindahan Al Habib pada tahun 1160 H bulan Muharram tanggal delapan (+ 1750). Pada saat itu usia Abdurrahman sudah mencapai 18 tahun. Abdurrahman menikah dengan putri Opu Daeng Menambon yang bernama Utin Tjandramidi.

Jiwa petualang Abdurrahman menyebabkan sering meninggalkan Mempawah pergi ke daerah-daerah, tempat-tempat yang pernah dikunjunginya antara lain adalah Tambolon, P. Siantan, Palembang dan Banjar. Di kota yang terakhir ini Abdurrahman menikah lagi dengan Ratu Syahranum, putri sultan Banjarmasin dan memperoleh gelar Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam.

Setelah wafatnya Al Habib Husin, Abdurrahman beserta dengan keluarganya melakukan perjalanan untuk mencari daerah baru. Dalam perjalanan itu beliau menggunakan kapal "Kakap" sebanyak empat belas buah. Sebelum melanjutkan perjalanan Abdurrahman beserta keluarganya berhenti untuk beristirahat. Tempat pemberhentian tersebut dinamakan "Kelapa Tinggi Segedong", dan sampai sekarang tempat tersebut terkenal dengan sebutan Desa Segedong.

Perjalanan Abdurrahman beserta dengan keluarganya tidak berjalan dengan mulus, banyak gangguan yang ditemui dalam perjalanan itu, antara lain gangguan dari makhluk halus. Akhirnya gangguan tersebut dapat diatasi dengan mendapat bantuan dari 7 orang Dayak.

Setelah memperoleh tempat yang dirasa cocok, yaitu tempat jatuhnya peluru meriam yang telah ditentukannya maka dibangunlah masjid yang sekarang terkenal dengan sebutan Masjid Jami' Sultan Abdurrahman. Kemudian setelah selesai baru didirikanlah keraton sebagai tempat tinggal raja dan keluarganya sekaligus sebagai pusat pemerintahannya. Keraton itu dikenal dengan nama Keraton Kadriah. Abdurrahman mengangkat dirinya sebagai raja dengan bergelar Sultan Syarif Abdurrahman Al Qadrie. (Panitia Hari Jadi, 1984 : 13)

Para pengikutnya yang mendukung dirinya menjadi raja, mendirikan pemukiman-pemukiman baru di sekitar keraton, sampai sekarang pemukiman tersebut dikenal dengan sebutan Kampung dalam Bugis. Begitu juga dengan ke tujuh orang Dayak tersebut, diberi hadiah tanah dan beras sebagai imbalan atas bantuannya kepada Raja. Tempat tersebut terbentang di sepanjang Sungai Ambawang, sampai sekarang masih dikenal sebutan desa Sungai Ambawang.

Rombongan pertama dari suku Dayak tersebut tidak diketahui namanya, membuka tanah untuk bertani dan berladang, mereka mendiami daerah yang sekarang dikenal dengan nama Sungai Durian. Rombongan pertama berjumlah sekitar dua puluh keluarga. Rombongan kedua dipimpin oleh Macan Sunit membawa pengikutnya berjumlah empat puluh keluarga dan berdiam di kampung Cabang kiri. Rombongan ke tiga dan ke empat dipimpin oleh Temenggung Madya dan Mangku Kipang. Rombongan ke tiga berjumlah empat puluh keluarga dan berdiam di simpang kanan, sedang rombongan ke empat berjumlah delapan puluh keluarga menempati kampung yang bernama Pasak. Rombongan terakhir dipimpin oleh Nek Mane membawa rombongan berjumlah dua puluh keluarga, berdiam di sekitar daerah Pancaroba dan di daerah Landak (J.U. Lontaan, 1975: 235).

Kelompok-kelompok inilah yang nantinya menjadi cikal bakal dari suku Dayak yang bertempat tinggal di daerah tersebut.

Dalam kepemimpinan Sultan Abdurrahman kerajaan Pontianak sebagai kerajaan terakhir di Kalimantan Barat mempunyai perkembangan yang pesat dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain yang sudah dahulu berdiri. Pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman, kerajaan Pontianak mengalami jaman kejayaannya.

Dalam memerintah Abdurrahman begitu giat mengembangkan perdagangan sehingga berkembang pesat. Hubungan antara pelabuhan-pelabuhan Sambas, Pemangkat, Sellakau, Sebakau, Singkawang, S. Pinyuh berjalan dengan lancar. Begitu

juga perkembangan hubungan dagang dengan pedagang-pedagang seperti Cina, India, dan Eropa.

Pada masa Abdurrahman, kerajaan Pontianak telah menjalin hubungan dengan pemerintah VOC terbukti dengan dinobatkannya Abdurrahman mendapat pengesahan dari Residen Rembang Willem Adrian Palm sebagai utusan dari VOC. Keadaan ini berlanjut hingga pemerintah Belanda mengambil alih kedudukan VOC di Indonesia. Kerajaan Pontianak mengalami pergantian Sultan sebanyak delapan kali. Sultan-sultan yang pernah memerintah kerajaan Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Sultan Syarif Abdurrahman Alqadrie bin Al Habib Husin Alqadrie (1771-1808)
2. Sultan Syarif Kasim Alqadrie bin Syarif Abdurrahman Alqadrie (1808-1819)
3. Sultan Usman Alqadrie bin Syarif Abdurrahman Alqadrie (1819-1855)
4. Sultan Syarif Hamid I Alqadrie bin Syarif Usman Alqadrie (1855-1873)
5. Sultan Syarif Yusuf Alqadrie bin Syarif Hamid I Alqadrie (1873-1895)
6. Sultan Syarif Muhammad Alqadrie bin Syarif Yusuf Alqadrie (1895-1944)
7. Sultan Syarif Taha Alqadrie bin Syarif Usman Alqadrie (1944-1945)
8. Sultan Syarif Hamid II Alqadrie bin Syarif Muhammad Alqadrie (1945-1950). (Majalah Warta Kota Pontianak 1973, Juli - Agustus - September).

Dari ke delapan sultan yang memerintah kerajaan Pontianak, hanya sultan ke enam dan terakhir yang terdengar beritanya.

Sultan Syarif Muhammad Alqadrie sebagai sultan ke enam memerintah kerajaan Pontianak sampai kedatangan Jepang di Kalimantan Barat. Beliau meninggal dunia akibat penganiayaan Jepang dalam peristiwa “Penyungkupan” yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Peristiwa ini terkenal dengan nama peristiwa Mandor.

Syarif Hamid II merupakan raja yang paling menonjol di Kalimantan Barat menjelang masa kemerdekaan RI, terutama dalam bidang politik. Sesuai dengan latar belakangnya yang memperoleh pendidikan Barat, maka dasar pemikirannya sangat moderat. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Juli 1913 di Pontianak, mendapat pendidikan ELS di Sukabumi, kemudian di Pontianak dan Yogyakarta. Di Bandung masuk pendidikan HBS selama satu tahun di THS lalu di KMA di Breda di negeri Belanda sampai tamat. Masa hidupnya banyak dijalani di luar Kalimantan Barat yaitu di Malang setelah menamatkan pendidikannya di Breda, karena oleh pemerintah Belanda diangkat menjadi tentara berpangkat Letnan, kemudian dipindahkan ke Balikpapan dan daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Pernah menjadi tawanan Jepang pada masa pendudukan Jepang, namun kemudian diangkat kembali oleh Belanda menjadi kolonel pada tahun 1945.

Tanggal 29 Oktober 1945, dia dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Terlepas dari konotasi sebagai penghianat, sebenarnya Sultan Hamid adalah seorang yang cerdas dan mempunyai pengalaman politik luas. Sultan Hamid banyak menduduki jabatan-jabatan yang cukup tinggi baik pada masa penjajahan Belanda maupun pada masa Indonesia merdeka. Satu-satu putera Kalimantan Barat yang paling menonjol pada masa itu.

2.2 Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya

2.2.1 Sosial

Kota Pontianak yang berdiri pada tahun 1771 terletak dipersimpangan tiga sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dengan

cabangnya Sungai Landak. Dari persimpangan ini terdapat tiga nama sungai yaitu Sungai Landak mengalir dari arah timur laut, Sungai Kapuas Kecil mengalir dari arah timur sedang Sungai Kapuas Besar yang merupakan pertemuan Sungai Landak dan Sungai Kapuas Kecil mengalir ke arah barat menuju laut.

Kota Pontianak sering disebut sebagai pintu gerbang daerah Kalimantan Barat karena letaknya yang strategis berada di jalur lalu lintas laut internasional yang menghubungkan wilayah Nusantara melalui Selat Malaka. Dengan demikian sejak jaman dahulu daerah ini sering menjadi persinggahan kapal-kapal besar. (Alqadrie; 1984:11). Dilihat dari letak kota Pontianak yang agak menjorok kedalam dimaksudkan sebagai perlindungan dan keamanan, sehingga kapal-kapal yang singgah dapat dikontrol oleh pihak penguasa.

Kependudukan di Pontianak bersifat heterogen, bermacam-macam suku berdatangan dari daerah-daerah yang ada di Kalimantan Barat sendiri, tetapi ada juga suku-suku lain di luar Kalimantan Barat. Ada tiga faktor yang menyebabkan kota Pontianak menjadi pilihan untuk bermigrasi yaitu yang pertama sebagai pusat pemerintahan Kalimantan Barat, kedua sebagai kota dagang dan ketiga sebagai kota pelabuhan.

Suku-suku pendatang tersebut mendirikan pemukiman-pemukiman baru mengelompok sesuai dengan sukunya masing-masing. Di Pontianak banyak terdapat perkampungan semacam ini yaitu seperti Kampung Jawa Tengah, Kampung Banjar, Kampung Kuantan, Kampung Saigon, Kampung Arab, Kampung Bangka-Belitung, Kampung Bugis dan sebagainya. Dilihat dari namanya jelas terlihat bahwa masyarakat yang menghuni di kampung tersebut berasal dari luar Kalimantan Barat.

Di samping suku-suku yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi suku-suku lain yang juga menetap di kota Pontianak. Suku tersebut seperti suku Jawa Timur, suku Madura, suku Padang, suku Batak dan lain-lain. Selain kota

Pontianak menjadi kota migrasi, juga menjadi tempat urbanisasi penduduk dari daerah. Suku Melayu dan suku Cina paling banyak melakukan urbanisasi tersebut, terbukti dari data statistik pada tahun 1900 sampai dengan 1950 telah tercatat pada tahun 1900 sebanyak 13.136 orang, tahun 1910 sebanyak 19.438, tahun 1920 sebanyak 29.730 dan tahun 1950 sebanyak 75.000 orang (sumber data statistik Kotamadya Pontianak).

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya penduduk yang berurbanisasi makin bertambah. Sementara disisi lain perkembangan kota Pontianak justru kurang menarik minat bagi suku Dayak. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan dari suku Dayak bahwa hakekat dari pada hidup adalah sebagai petani. Untuk itu mereka lebih tertarik mencari lahan pertanian di daerah pedalaman, yang belum banyak dihuni orang. Sehingga jumlah suku Dayak yang berada di kota-kota relatif kecil dibandingkan dengan suku-suku lainnya.

Dari ketiga suku bangsa besar yang mendiami Pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Barat, suku Melayu terbentuk melalui suatu proses. Menurut La Ode dikatakan bahwa proses "Melayunisasi" melalui media "Islamisasi" awalnya terbentuk karena dua hal yaitu pertama adalah faktor pengaruh agama Islam dan faktor Amalgamasi Biologis. Penyebaran agama Islam oleh suku Melayu dari Malaka dan Sumatera didukung oleh suku-suku lain seperti bangsa Semit, Saud, India dan Pakistan, bertujuan untuk mengislamkan suku bangsa pedalaman (Dayak). Di Kalimantan Barat sebagian suku bangsa Dayak yang telah menganut agama Islam secara spontanitas tergabung di dalam suku bangsa pesisir yaitu Melayu. Akibat langsung dari Islamisasi tersebut adalah sebagian suku bangsa pedalaman tersebut melepaskan identitasnya dari orang "Dayak", menjadi orang "Melayu". Kedua bahwa suku bangsa di Kalimantan sekarang oleh La Ode dikatakan sebagai hasil Amalgamasi Biologis dari berbagai suku pendatang yang mendiami pesisir Kalimantan yaitu seperti Semit, Saud, India, Pakistan, Bugis, Jawa, Aceh, dan

Minangkabau yang telah menganut agama Islam. Dengan adanya dua faktor ini jelas bahwa selain telah terjadi proses islamisasi di daerah Kalimantan khususnya bagi orang Dayak, juga akibat langsung dari proses ini jumlah suku Dayak semakin berkurang (La Ode, 1997: 21).

Di antara suku bangsa asing yang berada di Pontianak bangsa Cina termasuk yang paling besar dan tergolong sebagai pedagang yang sukses. Sehingga kesenjangan yang ada sering menimbulkan kecemburuan sosial dari suku bangsa asli. Awal kedatangan suku bangsa Cina di Kalimantan, dimulai dengan adanya hubungan dagang dengan Indonesia sekitar abad ke 3 hingga abad ke 5 SM. Rute yang mereka ambil ialah menyusur melalui Pantai Asia Timur dan pulanginya melalui Kalimantan Barat dan Filipina dengan memperhitungkan angin musim. (Lontaan J.U. 1975: 245).

Hubungan ini terus terjalin antara pemerintah Tiongkok dengan raja-raja di Indonesia, dan lambat laun berdatanganlah imigran Cina ke daerah-daerah Indonesia. Menurut De Groute keberadaan orang-orang Cina di Kalimantan Barat jauh sebelum tahun 1777. Sebab pada tahun ini telah berdiri kongsi-kongsi di daerah Monterado, maupun Mandor.

Menurut Lontaan kedatangan Cina secara bergelombang di perkiraan abad ke 17 melalui dua jalur, jalur pertama melalui Indocina terus ke Malaya dan menyebar ke pantai Sumatera Timur, kepulauan Bangka-Belitung serta menuju ke pantai Kalimantan Barat terutama Sambas dan Mempawah Hulu, untuk mencari emas. Tahun 1745 didatangkan secara besar-besaran atas kemauan Sultan Sambas, untuk keperluan menggali emas. Mereka mengorganisir sendiri dalam bentuk kongsi.

Pada awal terbentuknya pemukiman atau perkampungan baru, biasanya mereka lebih suka mendirikannya di dekat sungai-sungai kecil atau sering disebut parit. Parit-parit di kota Pontianak relatif banyak dan lebar-lebar. Sehingga dapat dilalui sampan, sebagai alat transportasi penting pada saat itu.

Fungsi parit-parit ini adalah sebagai alat transportasi yang menghubungkan perumahan penduduk dengan daerah pertanian maupun daerah pemasaran. Fungsi lain adalah sebagai tempat mandi dan cuci, yang sampai sekarang kebiasaan ini sangat sukar dihilangkan.

Dengan bentuk pemukiman yang mengelompok dan memanjang di sepanjang aliran sungai, mempermudah hubungan komunikasi antar mereka. Namun di sisi lain pemukiman ini begitu padat, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menjadi lingkungan pemukiman yang kumuh, selain itu bila terjadi wabah penyakit akan mudah sekali penularannya. Setelah Belanda masuk, maka sejak tahun 1779 daerah sebelah selatan Sungai Kapuas mulai dibuka, atas persetujuan Sultan. Seiring dengan pembukaan lokasi perkantoran juga mulai dibangun jalan-jalan sebagai jalan darat. Dengan dibuat jalan-jalan darat akan membawa dampak perkembangan pemukiman-pemukiman baru, sehingga lama-kelamaan pembangunan daerah seberang Sungai Kapuas lebih maju dibandingkan dengan lokasi kediaman Sultan yang berada di seberang timur.

Menyadari kondisi wilayah yang semakin berkembang, terutama dalam menghadapi perkembangan penduduk, volume perdagangan yang terus meningkat, disertai kompleksitas masalah yang timbul akibat kemajuan jaman, maka Pemerintah Kolonial Belanda di bawah Gubernur J. Obermon dan sekretarisnya S Dzienga bermaksud memindahkan kegiatan ekonomi, pemerintahan dan sosial ke wilayah selatan dan barat dengan tujuan yang lebih menguntungkan pemerintahannya (Alqadrie, 1984: 6).

Pembagian wilayah Kota Pontianak karena berada di persimpangan sungai, membagi wilayah Pontianak menjadi beberapa bagian, yaitu Pontianak Timur, dan Utara, di sebelah timur Sungai Kapuas, Pontianak Barat dan Selatan di sisi lain. Dari pembagian wilayah ini menyebabkan adanya kecenderungan dalam sistim pelapisan sosial. Di sebelah timur pelapisan sosial cenderung didasarkan pada agama dan

keturunan. Keluarga raja yang bergelar Syarif maupun Syarifah menduduki lapisan atas, sedang rakyat biasa menduduki tempat kedua atau lapisan bawah. Sedangkan wilayah sebenarnya cenderung memandang penguasa sebagai lapisan atas, alim ulama tokoh masyarakat dan orang-orang kaya sebagai golongan menengah, golongan bawah diduduki oleh petani, pedagang kecil, buruh dan lain-lainnya

Pelapisan mulai mengalami perubahan dengan kedatangan pemerintah Jepang. Pemerintah pendudukan Jepang berada di strata atas beserta dengan pengikutnya, kemudian kelas bawah ditempati oleh rakyat pribumi.

2.2.2 Ekonomi

Penduduk kota Pontianak yang heterogen menyebabkan mata pencaharian masyarakat bermacam-macam pula. Menurut La Ode ada beberapa jenis mata pencaharian masyarakat Kalimantan pada masa lampau yaitu:

NO.	SUKU BANGSA KELOMPOK	KEAHLIAN
1	2	3
1.	Melayu	Nelayan, berdagang, bercocok tanam
2.	Iban, murut kayan Murut dan ot Danun	Penanaman padi di bukit
3.	Kadasan dan Kelabit	Penanaman padi di sawah
4.	Punan	Pemburu dan peramu yang berpindah-pindah di hutan
5.	Melanau	Penanam Sagu
6.	Bekumpai	Pedagang di sungai
7.	Kesultanan	Pengawas perdagangan dan pemerintahan
8.	Pekerja/karyawan	Ilmu Pengetahuan

Jenis-jenis mata pencaharian masyarakat Kalimantan khususnya Kalimantan Barat makin lama mengalami perkembangan seiring dengan kedatangan suku-suku lain dari luar daerah. Khusus untuk kota Pontianak menurut Alqadrie jenis-jenis mata pencaharian masyarakat pendukungnya pada tahun 1990 sampai dengan 1950 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	MATA PENCAHARIAN	SUKU BANGSA
1.	Pertanian/Perkebunan	Jawa, Madura, Melayu, Cina
2.	Perdagangan/Perusahaan	Cina, Arab, Bugis, India, Melayu Padang
3.	Pegawai Negeri	Jawa, Melayu, Sunda
4.	Angkatan Bersenjata	Jawa, Ambon, Batak, Manado
5.	Pengrajin	Cina, Melayu, Bugis
6.	Guru	Padang, Melayu
7.	Tukang	Melayu, Cina
8.	Jasa	Cina, Jawa
9.	Buruh	Melayu, Cina

Pertanian yang diusahakan oleh penduduk belum dapat mencukupi keperluan hidup masyarakat Pontianak. Pertanian hanya untuk konsumsi sendiri para petani. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga untuk mengolah pertanian secara intensif. Jenis tanaman yang diusahakan penduduk biasanya terdiri dari tanaman padi, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain. Penanaman padi secara luas di persawahan belum ada, karena kurangnya tenaga untuk mengolah dan memelihara tanah pertanian yang luas, lagi pula mereka hanya menanam sekali setahun karena dipandang merugikan. Mereka lebih suka menanam padi di antara pohon kelapa selain mudah cara pemeliharaannya, juga memperoleh hasil dari keduanya.

Selain tanaman padi, penduduk juga menanam pohon sagu, manfaat dari pohon sagu selain menghasilkan sagu sebagai

makanan selingan juga bisa dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Kulit batang sagu biasa digunakan untuk dinding rumah, begitu juga daunnya dapat dipergunakan sebagai atap rumah.

Perkebunan kelapa dan lada ditanam penduduk di luar kota Pontianak. Kota Pontianak sendiri tidak banyak menghasilkan kelapa dan lada, hanya sebagai pelabuhan ekspor. Kelapa yang sudah dijadikan kopra dan lada merupakan salah satu komoditi ekspor yang laku di pasaran internasional.

Komoditi ekspor lainnya adalah karet, kayu, damar dan hasil hutan lainnya selain barang-barang tambang seperti emas biji besi, permata dan lain-ain. Barang-barang tersebut biasanya di ekspor ke Singapura, Hongkong, Belanda, Amerika Serikat, Jepang dan lain-lain, melalui pelabuhan Cina. Sebaliknya kapal-kapal dagang datang dari berbagai daerah, datang membawa barang-barang konsumsi, pakaian, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Pada masa itu berlaku perdagangan bebas, sehingga penduduk bebas menjual barang dagangannya kemana saja.

Keadaan ini berlangsung sampai pendudukan Jepang di Kalimantan Barat. Pada masa pendudukan Jepang dari tahun 1941 sampai 1945 keadaannya jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Sejak pada saat itu pelayaran dan perdagangan menjadi sepi, Pontianak terisolir dari kehidupan luar. Barang-barang konsumsi seperti garam, gula, minyak bakar, pakaian dan lain-lain sangat sulit didapatkan, sementara itu kapal-kapal asing tidak berani datang ke Pelabuhan Pontianak. Ekonomi rakyat menjadi sangat sulit. Barang-barang dagangan seperti kopra, karet, lada dan sebagainya sangat sulit dipasarkan, sehingga rakyat kehilangan mata pencahariannya. Hal ini mengancam keselamatan hidup rakyat Kalimantan Barat.

Jepang sendiri merasa khawatir dengan keadaan itu, maka dibentuklah ekonomi perang dengan menggalakkan pertanian pangan di seluruh Kalimantan Barat. Pendudukan di haruskan

menanam tanaman pangan untuk mencukupi kehidupan sendiri. Pedagang, buruh, pengrajin dan lain-lainnya harus bertani.

Perkembangan perekonomian rakyat menjadi kacau akibat rusaknya potensi alam yang telah mensejahterakan rakyat selama ini. Tanaman-tanaman perdagangan terbengkalai karena tidak dipelihara lagi.

Pelayaran internasional tidak dapat memasuki pelabuhan Pontianak karena keamanan laut yang sangat rawan. Kapal-kapal yang datang hanya terbatas pada pelayaran kapal-kapal Nusantara seperti Bugis dan Madura, itupun datangnya dalam waktu tertentu saja. Sehingga hal ini menyulitkan kehidupan rakyat, akibatnya barang-barang menjadi langka di pasaran Pontianak.

Sesudah jaman pendudukan Jepang berlalu, perdagangan dan perekonomian rakyat kembali normal, rakyat sudah dapat kembali melakukan aktivitasnya untuk mencari makan. Namun tanaman-tanaman perdagangan untuk di ekspor mengalami kemunduran akibat perang, dan musnahnya tanaman-tanaman ekspor.

2.2.3 Budaya

Salah satu dasar budaya yang penting adalah agama. Unsur ini sangat penting bagi masyarakat pribumi, terutama untuk meniti hidup dalam mencapai kebahagiaan baik material maupun spiritual. Unsur-unsur lain yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan mereka menciptakan teknologi dan cara memanfaatkan guna menunjang kelangsungan hidup, tanda ini dapat dilihat dari mata pencaharian hidup (La Ode, 1497: 20).

Di daerah kota maupun di pedesaan-pedesaan Kalimantan Barat, sebagian besar penduduknya beragama Islam, sedang di daerah pedalaman yang agak jauh dari sungai, kebanyakan penduduknya menganut kepercayaan tradisional (animisme) yaitu percaya kepada roh dan sebagian kecil beragama Kristen. Awal mula kedatangan agama Islam itu sendiri ke Kalimantan

Barat melalui utara yaitu Johor dan Bintan, kemudian juga Brunai masuk ke aliran Sungai Sambas dan berpusat di kerajaan Sambas. Dari Sambas ini kemudian baru menyebar ke Singkawang, Mempawah kemudian ke Pontianak.

Penyebaran agama Islam diperkirakan sekitar tahun 1550-1600 (Soedarto dkk, 1978/1979 : 5). Dalam perkembangannya, Islam mempunyai pengaruh yang besar dalam mendorong tumbuhnya kerajaan Islam di Kalimantan Barat.

Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam tersebut tidak terlepas dari hukum syara yang berlaku dalam agama Islam. Pengaruh nilai-nilai agama atau kepercayaan terdahulu tidak begitu nampak dalam kehidupan masyarakat, justru pengaruh Islam nampak menonjol. Namun ada juga terjadi perpaduan antara Islam dengan unsur-unsur setempat, terlihat bentuk nama-nama orang atau pun benda-benda yang masih ada di keraton maupun di masyarakat.

Di dalam masyarakat yang tradisional, nilai-nilai kharismatik dari seorang raja masih sangat dijunjung tinggi, sehingga apa yang dilakukan raja akan menjadi panutannya. Maka tidak heran apabila raja atau pemuka agama masuk Islam, secara spontan rakyat akan mengikutinya.

Sementara itu di daerah pedalaman masih banyak yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme yang sampai sekarang masih terus berkembang. Namun dalam perkembangannya kedua kepercayaan ini yaitu Islam dan Kepercayaan tradisional berjalan dengan damai mereka saling hormat menghormati satu sama lain, begitu juga hubungan antara penganut Islam dengan penganut agama lain dapat berjalan berdampingan.

Dengan demikian maka pada dasarnya sistim kebudayaan di Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi tiga : (Effendy M. 1982 : 10)

1. Sistim Budaya Penduduk Asli

Sebelum masuk agama-agama besar di Kalimantan Barat, masyarakat penduduk asli telah mempunyai unsur-unsur budaya sendiri yang mengatur kehidupan mereka, yang sering disebut “sistim budaya etnis”.

2. Sistim Budaya Hindu/Budha

Biasanya sistim ini berlaku di kalangan kerajaan-kerajaan tradisional sebelum kedatangan agama Islam di Kalimantan Barat. Sistem Budaya Hindu/Budha pernah hidup di kerajaan Tanjungpura, Sintang, Sanggau dan lain-lain, yang masih terdapat bekas peninggalannya.

3. Sistim Budaya Islam

Budaya Islam memasuki kerajaan setelah masuknya budaya Hindu dan Budha. Budaya Islam dapat dikatakan meresap kuat dalam kehidupan masyarakat terutama pada masyarakat pesisir, sedang budaya Hindu/Budha kurang begitu kuat masuk dalam budaya masyarakat. Masuknya budaya Islam dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat, tanpa adanya perbedaan karena agama Islam tidak mengenal apa yang disebut strata sosial atau tingkatan sosial di dalam kehidupan masyarakat.

Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan Islam, membuat agama ini berkembang dengan pesat di kota-kota seperti Pontianak, Sintang, Sanggau, Sambas, Mempawah dan Ketapang. Di Pontianak sendiri karena penduduknya bersifat heterogen, maka kebudayaannya pun sangat beragam. Masing-masing suku hidup dengan budayanya sendiri. Perkembangan budaya daerah dapat dilihat dari banyaknya didirikan sanggar-sanggar tari Dayak maupun Melayu di Pontianak. Ditambah lagi upaya dari pemerintah untuk tetap melestarikan upacara-upacara tradisional daerah seperti Naik Dango, Gawai, Balenggang tumbang apam, Robo'-robo' dan sebagainya.

Begitu juga suku bangsa Cina, tetap menjalankan adat istiadat nenek moyangnya. Dilihat dari kehidupan sehari-hari Cina masih menggunakan bahasa Cina, bila berhubungan dengan sukunya, malahan di Pontianak ada juga kursus untuk bahasa Mandarin. Tempat-tempat ibadah seperti vihara banyak di bangun untuk masyarakat Cina yang menganut agama Budha, yayasan-yayasan Cina banyak didirikan untuk melaksanakan adat kematian bagi masyarakat Cina. Selain itu hari-hari besar seperti Imlek dan Cap Go Meh masih berkembang di kota Pontianak. Kesenian dan budaya lain seperti seni musik, tari Baron Say masih hidup sampai sekarang. Walaupun apabila ditilik dari latar belakang tujuan mereka bermigrasi ke Kalimantan Barat disebabkan karena keadaan dalam negerinya yang tidak aman, namun kesetiaannya terhadap negeri leluhur sangat besar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesetiaan imigran-imigran Cina terhadap negeri leluhurnya, faktor-faktor itu ialah: *pertama* karena sistem kewarganegaraan yang dianut oleh negeri Cina yaitu azas lus sanguinis (azas keturunan). Dengan azas ini masyarakat Cina dan keturunannya dimanapun dia berada masih tetap diakui sebagai warga negara Cina. Oleh sebab itu anak-anak Cina yang berada di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak yang sebenarnya merupakan Cina peranakan tetap ditanamkan oleh orang tua dan guru-guru mereka untuk tetap pandai berbahasa Cina dan mencintai kebudayaan Cina. (Kadarusman, 1969, hlm. 32).

Faktor kedua karena adanya intimidasi dari gerakan-gerakan subversi dan keamanannya tidak akan dilindungi jika mereka tidak setia, tidak membantu dan tidak mengirim dana ke RRC untuk membangun negaranya.

Faktor ketiga karena falsafah yang dikemukakan oleh pemimpin mereka Dr. Sun Yat Sen bahwa nasionalisme Tiongkok adalah segala-galanya, maka tak heran apabila migran-migran Cina mengirimkan bantuan-bantuan ke negeri leluhurnya. Bantuan ini besar sekali bagi pembangunan di negara RRC. Sebagai imbalannya mereka melindungi warganya di manapun mereka berada.

Dari ketiga faktor ini Kadarusno mensinyalir bahwa di Kalimantan Barat terdapat tiga kelompok dalam masyarakat Cina. Kelompok yang pertama jumlahnya paling banyak, yaitu golongan yang setia kepada pemerintah RRC, kelompok kedua ialah kelompok yang mengatakan pro Taiwan. Dan yang ketiga adalah kelompok yang menyesuaikan diri pada kondisi setempat meskipun negeri itu memusuhi RRC.

BAB III

STRUKTUR SOSIAL EKONOMI

3.1 Pertumbuhan Penduduk dan Pola Pemukiman

Pontianak merupakan kerajaan paling akhir didirikan di Kalimantan Barat, wilayahnya terletak di persimpangan Sungai Landak dan Sungai Kapuas. Pada masa itu wilayahnya masih ditutupi hutan belukar. Menurut cerita tempat itu dihuni oleh hantu-hantu, yang kesemuanya dihilangkan dan mulailah pembukaan hutan. Pada tahun 1771. Pangeran Syarif Abdurrahman membangun keraton Pontianak (Tanjung Beting) dan setahun kemudian dirikan sebuah masjid (Lontaan, 1975: 232-233), Kartodirdjo, 1993: 283-284), yang kemudian dikenal dengan nama Keraton Kadriah dan Masjid Jami' yang juga terletak di kompleks keraton. Dari keterangan tersebut memberi gambaran bahwa kerajaan Pontianak berdiri pada masa Islam sudah berkembang di Kalimantan Barat.

Setelah berdirinya kerajaan Pontianak, orang Dayak banyak berdatangan dan secara bergelombang untuk membuka perkampungan sepanjang tepian Sungai Ambawang, kelompok pertama, berjumlah dua puluh keluarga dengan membuka daerah perkampungan yang sekarang disebut Kampung Durian, kelompok kedua, berjumlah empat puluh keluarga dibawah pimpinan Macan Sumit membuka perkampungan cabang kiri, kelompok ketiga berjumlah enam puluh keluarga dipimpin Tumenggung Maja membuka perkampungan masuk ke simpang

kanan, kelompok keempat, berjumlah delapan puluh keluarga dipimpin Mangku Kipang mendiami Kampung Pasak, dan kelompok terakhir, berjumlah seratus dua puluh keluarga membuka perkampungan di daerah Pancaroba, Ngabang dan Landak (Lontaan, 1975: 235).

Setelah penobatannya sebagai Sultan Pontianak dengan gelar Sultan Syarif Abdurrahman Nur Alam Ibnu Hamid Husin Alqadrie oleh Oost Indonesia Compagni mengakui sebagai Sultan Pontianak dengan mengutus Residen Rembang Willem Adrian Palm pada tanggal 5 Juli 1779 yang bertujuan untuk mengatur sistem pemerintahan dan mempertahankan kerajaan secara bersama-sama. (Arsip Nasional Republik Indonesia, Borneo-West 16/26 Noerdin Dja'in, 1972: 257-259). Perjanjian ini mendapat kecaman dari pihak kerabat kerajaan, Sultan Kasim yang tidak menyetujui adanya keterikatan dengan perjanjian tersebut kemudian meninggalkan keraton dan membuka perkampungan sendiri di luar keraton yang dikenal dengan Kampung Luar (Alqadrie, 1984: 83-84). Sebagian kerabat kerajaan meninggalkan Pontianak dan mencari tempat pemukiman yang baru, Syarif Abdullah dengan para pengikutnya terdiri dari orang-orang Bugis dan Melayu mengungsi ke daerah Loloan (Bali) untuk menyatu dengan masyarakat Bugis di daerah tersebut (Suwitha, 1997: 173). Kerajaan Pontianak dibawah kekuasaan seorang Sultan dengan dibantu oleh pembesar-pembesar keluarga keraton, di antaranya yang terkemuka adalah seorang pembesar bergelar bendahara (patih). Seorang pangeran yang bergelar laksamana bertugas untuk menjaga keamanan pantai. Pembesar-pembesar lainnya bergelar uwan yang bertugas langsung mempunyai kekuasaan atas penduduk pribumi (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 209).

Ditinjau dari letak geografis, Kerajaan Pontianak berada di daerah persimpangan sungai besar (Sungai Landak dan Sungai Kapuas). Jalur inilah yang merupakan jalan atau kemudahan yang terpenting untuk menyelenggarakan transportasi dan komunikasi. Merupakan hal yang bersifat taktis dan strategis

bagi suatu kerajaan untuk kepentingan politik, sosial ekonomi, kebudayaan dan militernya. Bahkan kebesaran, kemegahan dan kemasyuran kerajinan pada umumnya tergantung kepada ramainya lalu lintas perhubungan dan jenis-jenis alat transportasi yang digunakan.

Dalam suasana yang amat sibuk dalam dunia perdagangan pada abad ke-19 jatuhnya kerajaan-kerajaan besar di Kalimantan Barat seperti Kerajaan Sambas, Kerajaan Sukadana, Kerajaan Kubu dan Kerajaan Sintang menyebabkan bergesernya pusat-pusat perdagangan sebagai akibat dari peperangan. Pergeseran pusat perdagangan membawa dampak yang amat besar bagi perkembangan Pontianak. Hal ini menjadikan Kerajaan Pontianak berkembang menjadi pelabuhan terbesar dan sekaligus sebagai kota perdagangan terbesar di Kalimantan Barat (Alqadrie, 1984: 19), sehingga Kerajaan Pontianak termasuk kedalam kerajaan-kerajaan yang terpenting yang berada di Kalimantan termasuk Sambas dan Banjar (Poesponegoro, 1992: 51).

Pada tahun 1839 menurut susunan ketatanegaraan Hindia Belanda afdeeling Pontianak terbagi atas 26 negeri yaitu Pontianak, Mampawa, Landak, Bayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sipau, Blitang, Sintang, Silat, Suhait, Salembau, Piasa, Jungkung, Bunut, Malo, Sibau, Taman, Madai, Kayan, Melawai, Matan, Simpang, Sukadana, dan Kubu (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 208-209). Pada masa pemerintahan tersebut, afdeeling Pontianak dibantu oleh 4 orang gezaghebber, 3 orang diantaranya adalah orang pribumi yang berkedudukan di Mampawa, Bayan dan Landak, sedangkan seorang lagi adalah orang Belanda yang berkedudukan di Sukadana. Sampai pada akhir tahun 1848 di wilayah Kalimantan belum ada pemerintahan Belanda yang terpusat. Residen dan asisten residen di bawah langsung pemerintahan tertinggi yang berkedudukan di Batavia (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 154).

Perkembangan daerah Pontianak membuat jalur perdagangan semakin ramai dengan kedatangan kapal-kapal

Nusantara dan kapal-kapal asing ke pelabuhan Pontianak dengan membawa barang-barang dagangan untuk dipasarkan di daerah Kalimantan Barat. Kembalinya kapal-kapal tersebut mengangkut barang-barang komoditi berupa berlian, emas, lilin, rotan, karet, lada, tepung, sago, gambir, pinang, sarang burung, kopra, kelapa, tengkawang dan lain-lain, yang kemudian dipasarkan ke wilayah Nusantara dan di luar wilayah Nusantara (Veth, 1854: 262, Vleming, 1926: 257). Tidak sedikit para pedagang yang kemudian tertarik untuk bermukim di Pontianak. Mereka mendirikan perkampungan setelah mendapat izin dari Sultan. Sehingga pada masa itu banyak didirikan kampung yang berorientasi pada daerah atau negara dari pedagang tersebut berasal. Di mana terdapat Kampung Tambelan, Kampung Banjar, Kampung Bugis, Kampung Jawa, Kampung Bangka-Belitung, Kampung Kuantang, Kampung Kamboja, Kampung Bansir, Kampung Saigon dan Kampung Arab.

Berdasarkan nama-nama kampung tersebut dapat diketahui bahwa meningkatnya jumlah penduduk Pontianak, khususnya golongan pribumi, Cina, Eropa dan bangsa lainnya berkaitan erat dengan perkembangan kegiatan pertanian, ekonomi dan perdagangan. Para pendatang yang menetap di Pontianak secara bertahap dapat menarik penduduk yang ada di daerah asal untuk pindah ke tempat pemukiman yang baru.

Heterogenitas etnis merupakan salah satu ciri utama komposisi penduduk Pontianak. Dalam daerah Kalimantan Barat sendiri, pada awal abad ke-20 telah terjadi urbanisasi dari daerah sekitarnya. Pontianak sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan merupakan pusat federasi daerah-daerah swapraja dan neo-swapraja di seluruh Kalimantan Barat. Dengan demikian Pontianak menarik penduduk daerah penghuluhan untuk melakukan urbanisasi. Kaum urban terdiri dari orang Melayu yang pada umumnya berasal dari Mempawah dan Sambas, dan orang Cina yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Sedangkan suku Dayak yang merupakan penduduk asli daerah tersebut justru kurang tertarik untuk berurbanisasi ke Pontianak, padahal suku bangsa lain dari luar Kalimantan.

Barat secara terus menerus bermigrasi ke Pontianak. Jumlah penduduk orang Dayak yang menetap di Pontianak relatif kecil dibandingkan dengan suku bangsa lainnya. Hal ini disebabkan orang Dayak selalu mengikuti suatu filsafat bagi hidupnya. Menurut pandangan mereka bahwa hakikat kehidupannya adalah sebagai petani padi. Pekerjaan sebagai petani dipandang paling mulia, karena merupakan rahmat bagi kehidupannya. Untuk itu menjadi petani tentu saja tidak dapat menetap di Pontianak karena tidak tersedianya lahan pertanian yang cukup, apalagi jika harus menganut sistem perladangan berpindah.

Jumlah penduduk Kalimantan Barat secara keseluruhan pada tahun 1830 sebanyak 250.075 orang (Cator: 1938: 149), pada tahun 1905 sebanyak 450.929 orang, tahun 1920 mengalami peningkatan sebanyak 605.399 orang dan pada tahun 1930 mengalami perkembangan dengan jumlah 802.477 orang (Sumber Departemen van Economisch Zaken Volkstelling: 1930, Deel V: Inheemsche Bevolking Van Borneo Celebes, De Kleine Sunda Eerlandern ende Molukken). Angka-angka menunjukkan pertambahan penduduk Kalimantan Barat cukup besar, dalam tempa 75 tahun sejak tahun 1830 sampai 1905 terjadi peningkatan 80,4%, sedang tahun 1920 menunjukkan angka peningkatan 34,3% dan 32,6% pada tahun 1930.

Khusus mengenai komposisi penduduk Pontianak tidak ada diperoleh keterangan tersendiri. Pengetahuan mengenai komposisi hanya dapat disimpulkan dari keterangan Veth yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Pontianak sangat sedikit (Veth 1854: XXXI) dan Vleming menambahkan bahwa baik Pontianak maupun Singkawang hanya sepertiga jumlah luas daerahnya berpenghuni (1926: 254), sedangkan orang Cina yang bermukim di Pontianak pada tahun 1843 berkisar 15.000 orang dan hidup dalam kelompok-kelompok kongsi (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 215). Perkembangan penduduk Pontianak dari setiap dasa warsa mengalami suatu peningkatan yang sangat besar, pada tahun 1900 sebanyak 13.136 orang, ditahun 1910 telah meningkat menjadi 19.438

orang atau 47,9%, pada tahun 1920 terjadi peningkatan penduduk yang tajam dengan jumlah 29.730 orang (52,9%) dan pada tahun 1930 pertumbuhan penduduk mencapai 45.482 orang atau meningkat 52,9% (Sumber: Kantor Statistik Kotamadya Pontianak). Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat antara tahun 1920 dan 1930 di sebabkan oleh semakin banyaknya para pendatang utamanya orang Cina yang bermukim di Pontianak. Pada dasarnya masuknya imigran Cina dalam jumlah besar tahun 1921 ke daerah Kalimantan Barat dan Semenanjung Malaya disebabkan adanya perpecahan di antara pemimpin Cina dan pecahnya perang saudara antara Tjiang Kai Sjek dengan Mao Tse Tung (Alqadrie, 1984: 72-73). Perpecahan tersebut menimbulkan kehidupan yang tidak aman dan jiwanya merasa terancam maka daerah Kalimantan Barat menjadi salah satu tujuan utama imigran Cina. Hal ini terjadi karena orang Cina pendahulunya banyak menetap di Kalimantan Barat khususnya Pontianak dan telah mengadakan hubungan dengan para penguasa.

Masalah penduduk sudah tentu berkaitan dengan pemukiman. Lingkungan alam mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pola pemukiman penduduk. Permukaan tanah yang relatif landai, pola aliran sungai yang tidak teratur dan hutan yang lebat memberikan kecenderungan penduduk memanfaatkan sungai-sungai sebagai prasarana lalu lintas utama. Sungai Kapuas dan Sungai Landak merupakan *main road* yang menghubungkan wilayah Kerajaan Pontianak dengan daerah *hinterland* dan ke arah hilir sungai yang menghubungkan wilayah tersebut dengan daerah-daerah lainnya.

Sungai-sungai besar sebagai *main road* mempunyai anak-anak sungai yang oleh penduduk dikenal dengan sebutan parit-parit yang berfungsi sebagai lalu lintas yang menghubungkan pemukiman dengan daerah pertanian dan daerah pemasaran untuk barang-barang perdagangan (Vleming, 1926 : 257-258). Peranan dan fungsi parit yang semakin besar sehingga penduduk mulai mengembangkan

pemukiman ke arah parit-parit tersebut. Pada mulanya bersifat memanjang dan mengelompok sesuai dengan kemudahan yang tersedia oleh alam, artinya bahwa pemilihan lokasi pemukiman tidak disertai dengan usaha penaklukan alam lebih dahulu. Dengan demikian pemukiman berpola mengelompok padat dan memanjang mengikuti alur sungai.

Wilayah sebelah utara Sungai Kapuas dikembangkan orang-orang Cina tahun 1772 oleh Lo Fong bersama dengan seratus orang pengikutnya yang bermigrasi dari provinsi Kanton dan mendarat di Kampung Siantang. Walaupun Lo Fong kemudian meninggalkan Pontianak menuju daerah Mandor, tetapi pengaruhnya telah tertanam dan menjadi anutan bagi Cina yang bermukim di Pontianak (Alqadrie, 1984: 79). Sehingga dapat dikatakan bahwa Lo Fong merupakan perintis pemukiman orang Cina di Pontianak.

Perkembangan pemukiman dimulai dengan adanya pengakuan Pemerintah Kompeni Hindia Belanda tahun 1773, kemudian pada tanggal 5 Juli 1779 Sultan Pontianak telah mengadakan perjanjian dengan tujuan untuk mengatur dan mempertahankan negeri ini secara bersama-sama (Alqadrie, 1980: 48), dan kemudian diberi tempat oleh Sultan Pontianak membangun perkantoran dan pemukiman di seberang selatan Sungai Kapuas. Pemberian ini dikenal dengan nama Tanah Seribu (Verkendepaa) karena meliputi areal seluas 1000 x 1000 meter persegi. Daerah ini merupakan inti perkembangan daerah administrasi kota yang kemudian orang-orang Cina tertarik untuk menetap dan mengembangkannya sebagai daerah perdagangan karena telah terbukanya pusat pemukiman dan perkantoran gubernemen yang merupakan awal dari perluasan kekuasaan kolonial Belanda di daerah ini (Alqadrie, 1984: 78-79).

Pedagang-pedagang yang datang dari berbagai daerah Nusantara dan luar Nusantara sebagian menetap dan mendirikan pemukiman setelah mendapat izin dari Sultan untuk membuka hutan. Pada umumnya mereka memilih pemukiman di sekitar Sungai Kapuas dan di sepanjang Sungai

Kapuas Kecil terdapat Kampung Bugis, Kampung Arab, Kampung Saigon, Kampung Kamboja, Kampung Bangka-Belitung, Kampung Tambelan dan Kampung Melayu. Kampung baru ini terletak paralel dengan pusat Kerajaan Pontianak. Pemukiman penduduk asal Sumatra Barat tersebar di kampung-kampung yang tidak jauh dari pusat pasar. Mata pencaharian sebagai pedagang selalu dekat dengan lokasi pemasaran.

Arsitektur rumah tidak begitu jauh berbeda dengan bentuk rumah yang ada di Sumatra Selatan, Riau, Bugis dan Banjarmasin. Bentuk rumah pada umumnya terbagi atas dua jenis antara lain bentuk Lipat Kajang, bentuk rumah ini terbagi dalam 4 bagian yaitu serambi berfungsi sebagai tempat bermain anak-anak dan tempat untuk bersantai anggota keluarga. Rumah induk adalah bangunan yang terdiri dari ruang untuk menerima tamu dan ruang untuk tidur. Pelataran berfungsi sebagai tempat mencuci pakaian sekaligus menjemur, tempat untuk mencuci piring dan lain sebagainya. Pelataran ini juga berfungsi sebagai ruang pemisah antara rumah induk dengan dapur. Sedangkan rumah yang berbentuk Limas dengan panggung yang bertiang tinggi, mempunyai ruang utama terdiri dari ruang untuk menerima tamu, ruang keluarga, dan kamar lantainya lebih tinggi dari lantai dapur, dan lantai dapur lebih tinggi dari lantai pelataran yang dibuat dengan susunan agak jarang untuk dapat digunakan sebagai tempat mencuci dan bagian atasnya tidak diberi atap. Pada kamar bagian depan diberi *puadai* (tabir) dengan berbagai untaian hiasan-hiasan. Pada umumnya kedua bentuk rumah tersebut di atas memiliki loteng yang berfungsi sebagai gudang tempat penyimpanan peralatan.

3.2 Kelompok-Kelompok Sosial

Berbagai kategori pengelompokkan timbul berdasar ras, agama dan etnis yang sering kali saling tumpang tindih dan paralel. Hal ini mengakibatkan semakin dipertegasnya batas-batas solidaritas dan pengelompokan. Tiga pengelompokan

utama adalah suku dan penduduk Dayak yang merupakan kelompok kekerabatan yang tinggal di pedalaman, komunitas Melayu, Bugis, dan Arab serta imigran Cina yang bermukim di daerah pesisir. Komunitas suku Dayak sebagai sebuah komunitas yang tertutup dan lebih menonjolkan kesamaan dan kesatuan sosio-kultural, komunitas Melayu yang pada umumnya penganut agama Islam lebih menekankan aspek sosio-historis sebagai kelompok kelas penguasa dan pemukiman Cina lebih merupakan satuan sosio-ekonomi (Naerssen, 1951/1952: 134-137).

Menurut Veth dan Duman; orang Dayak merupakan penduduk asli pulau Kalimantan (Veth, 1854: XXXI, Lontaan, 1975: 48). Jan B. Ave menambahkan bahwa selain orang Dayak, orang Punan juga termasuk penduduk asli Kalimantan. Orang Punan disebutnya sebagai kelompok penduduk yang menyandarkan hidup mereka pada kegiatan berburu, meramu di hutan dan menangkap ikan di sungai dan danau, sedangkan orang Dayak lebih memusatkan kegiatan pada bidang pertanian utamanya menanam padi (Arman: 1994: 122-123). Suku bangsa ini merupakan keturunan dari para imigran yang berasal dari wilayah yang kini disebut Yunnan di daerah Cina Selatan. Dari tempat tersebut kelompok-kelompok kecil mengembara melalui Indo-Cina ke Jazirah Malaysia yang menjadi batu loncatan untuk memasuki pulau-pulau di Indonesia. Imigrasi dari Yunnan di lakukan secara bertahap dengan kelompok pertama adalah kelompok Negrid dan Weddid, yang sampai sekarang sudah tidak ditemukan lagi. Kemudian disusul kelompok yang lebih besar yaitu kelompok Proto-Melayu yang masa perpindahannya kira-kira berlangsung selama seribu tahun antara tahun 3000-1500 SM (Coomans, 1987: 3). Dapat diperkirakan bahwa penduduk Yunnan pada masa itu mengadakan perpindahan untuk mencari tempat yang dianggap paling dapat memberikan peluang kebebasan bergerak untuk mencari makan, khususnya berladang dan berburu. Kemudian berlangsung lagi sekitar lima ratus tahun sebelum Masehi dari daratan Asia ke pulau-pulau Indonesia. Kelompok-kelompok ini dinamai Deutro-Melayu yang mendiami

daerah pesisir pantai (Coomans, 1987: 4). Jika dilihat perbandingan antara kelompok Proto-Melayu dan Deutro-Melayu dapat dibedakan berdasarkan daerah pedalaman dan daerah pesisir pantai yang didiami para imigran tersebut.

Ch. F.H. Duman menyatakan pula bahwa orang Dayak pada mulanya mendiami daerah-daerah tepi Sungai Kapuas dan Laut Kalimantan. Kedatangan orang Melayu Sumatera dan Semenanjung Malaka mengakibatkan pergeseran pemukiman orang Dayak sampai ke hulu sungai (Lontaan, 1975: 48). Kehidupan orang Dayak diperoleh keterangan dari Vleming yang menyatakan bahwa:

De oorspronkelijke landsbevolking vat men samen onder den naam "Dajaks", een woord van Maleische afkomst, dat "bovenlander" of "binnenlander" beteekent, Zij kennen geen hoogere eenheid dan hun stam, soms niet meer dan een hondertal personen omvattend. Zij houden zich bezig met het verzamelen van boschproducten, met varkensteelt, primitieven rijstbouw en vischvangst. Ben economisch afgesloten gaheel vormen de stammen niet. Zij drijven handel, hoofdzakelijk in de groote binnenlanden, naar het chijnt nog ruilhandel, waarbbij boschproducten worden geruild tegen voor hen luxe-artikelen (kralen e.d.), zout en andere levensbehoefden 91926: 254).

Berdasarkan keterangan tersebut tercermin kesan bahwa Kalimantan Barat pada mulanya dihuni orang Dayak, bagi orang Melayu menyebutnya dengan penduduk hulu sungai atau penduduk pedalaman. Mereka hidup berkelompok dengan jumlah sekitar seratus orang. Mata pencaharian mereka hidup dengan mengumpulkan hasil-hasil hutan, berternak babi, menanam padi dan menangkap ikan dengan cara sederhana. Sistem perekonomian sangat sederhana, perdagangan dilakukan dengan cara tukar menukar hasil hutan dengan barang keperluan hidupnya, utamanya kebutuhan garam.

Kehidupan Dayak mengelompok dalam unit-unit kecil, maka sebenarnya lingkup pergaulan sehari-hari adalah kampung. Di tingkat suku, kepemimpinan dipegang oleh para demang yang menjadi pejabat penghubung antara Dayak

dengan Sultan. Ditingkat kampung, kepala-kepala kampung disebut *pasirah* yang menjadi tangan kanan para *demang*. Pada waktu perang dipilih para pemimpin yang disebut singa atau macan (Basel, 1874: 1-15, Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 222-223).

Proses terbentuknya suku Melayu menjadi salah satu suku pribumi (asli) di daerah Kalimantan Barat ini diawali dengan penyebaran agama Islam yang dibawa oleh orang Melayu dari Semenanjung Malaka dan Sumatra kemudian disusul orang-orang Arab, Bugis, Semit, Saud, India dan Pakistan (La Ode, 1997: 21). Daerah penyebaran agama Islam diawali dengan melalui aliran Sungai Sambas yang juga merupakan pusat Kerajaan Sambas, kemudian menyebar ke Singkawang, Mempawah dan Pontianak dengan menyusuri Sungai Kapuas. Penyebaran melalui Sungai Landak masuk ke daerah Tayan, Sintang, dan Nanga Pinoh. Dari daerah Sintang menyusuri Sungai Kapuas sampai ke daerah Putussibau. Penyebaran ini berlangsung sekitar tahun 1550-1800 (Soedarto, 1978/1979: 9). Sebagian suku bangsa pedalaman Kalimantan Barat yang telah menganut ajaran agama Islam secara spontanitas tergabung di dalam suku Melayu. Di daerah pemukiman hulu sungai besar, seperti Sungai Kapuas, Sungai Landak dan Sungai Sambas, orang Dayak yang baru menganut agama Islam secara langsung mengikuti pola hidup suku Melayu. Proses ini bagi orang-orang Kalimantan Barat non Melayu dikenal sebagai proses masuk Melayu atau proses turun Melayu (Sellato, 1989: 59). Hal ini juga dinyatakan vleming bahwa:

Volgen het spraakgebruik noemt men thans alle Mohammedaansche Inlanders: Maleiers, en de heidensche Inlanders: Dajaks, De Encyclopaedie van Neterlandsch-India Vermeldt, dat men van een Dajak, die overgaat tot het Mohammedaansche geloof, zelfszegt, dat hij "maleier" geworden is (1926: 255).

Keterangan di atas dapat memberi gambaran bahwa agama Islam pada umumnya dianut suku Melayu sedangkan suku Dayak menganut kepercayaan animisme. Dalam Ensiklopedia

Hindia Belanda dikatakan bahwa suku Dayak yang telah menganut agama Islam meninggalkan atau melepas identitas dirinya menjadi suku Melayu, maka dengan jelas bahwa selain telah terjadi proses Islamisasi didaratan Kalimantan Barat, khususnya orang Dayak, juga terjadi semacam proses Melayunisasi terutama terhadap suku Dayak non muslim. Akibat langsung dari proses tersebut mengakibatkan jumlah mereka semakin berkurang. Dengan demikian, suku Melayu dapat memiliki kapasitas sebagai "pribumi asli" yang sama kedudukannya dengan suku Dayak. Hal ini dapat diambil kesimpulan sementara bahwa penduduk yang bertetangga dan serumpun yang mempunyai latar belakang yang sama, dapat menjadi berbeda secara mendasar apabila memasuki kelompok masyarakat berdasarkan agama yang dianutnya.

Suku Dayak yang sudah masuk Islam atau masuk Melayu cenderung menyangkal leluhurnya sebagai suku Dayak, kadang-kadang mereka langsung berhubungan dengan bangsa Arab yang dapat mempertebal identitas dirinya sebagai suku Melayu. Dengan menjadi orang Melayu, pada umumnya mereka menganggap dirinya sudah mendapatkan mobilisasi sosial dari status yang rendah (suku Dayak) meningkat menjadi suku Melayu atau sebagai orang Muslim (La Ode, 1997: 23, Sellato, 1989: 59). Veth menambahkan pemeluk agama Islam berjumlah tiga ratus ribu orang; yang terbanyak adalah orang Melayu, Bugis, Jawa dan Arab. Mereka bertempat tinggal di daerah pesisir pantai terutama muara-muara sungai (1854:XXXI). Ini didasari karena pada umumnya identitas penduduk yang bermukim di kerajaan-kerajaan Kalimantan Barat, khususnya Kerajaan Pontianak adalah suku Melayu sebagai kelompok masyarakat yang paling terpandang dalam tingkatan status sosial. Sebagian besar suku Melayu mendiami sepanjang Sungai Kapuas, Sungai Landak dan Sungai Sambas, di samping itu menghuni daerah di sepanjang pantai (dataran rendah).

Veth menggambarkan pendatang Melayu sebagai pemukim-pemukim yang tinggal di pesisir, tepi atau muara-muara sungai. Mereka berasal dari Johor, Riau dan daratan Sumatra. Koloni

atau pangkalan-pangkalan mereka akhirnya berkembang menjadi pusat-pusat kerajaan. Kedudukan mereka di pesisir, dan muara-muara sungai menjadi sumber supremasi Melayu di atas Dayak. Letaknya yang strategis karena dekat ke Malaka, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Singapura, menguntungkan profesi dagang Melayu. Kedudukan inilah yang memberi keunggulan Melayu sehingga hampir seluruh kerajaan pedalaman tergantung ataupun menjadi satelit kerajaan-kerajaan Melayu pesisir (Basel, 1874: 15).

Komunitas Melayu, Bugis, Jawa, Banjar, Arab, Pakistan dan suku-suku bangsa lainnya yang penganut agama Islam hidup secara bersama-sama. Hal ini disebabkan adanya kesamaan di bidang agama, di lain pihak mereka juga berusaha untuk menyesuaikan dengan kehidupan penduduk asli dan berbahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari.

Corak pedesaan orang Cina, serta kongsi-kongsi yang kemudian didirikan haruslah dipahami dari sudut kepentingan dan latar belakangnya. Penetapan koloni dan lokasi desa pertama-tama mempertimbangkan segi-segi praktis, sama seperti di Cina dimana sungai berfungsi dan berperan lebih penting sebagai sarana perdagangan dan transportasi. Penyebaran koloni dan imigran Cina menunjukkan bahwa jumlah dan kepadatannya semakin kecil semakin jauh ke pedalaman. Imigran Cina terkonsentrasi pada daerah Pontianak, Sambas dan Mempawah.

Di daerah-daerah inilah para imigran mencoba mendirikan perkampungan yang khas Cina dan sekaligus menjadi satuan sosio-ekonomis sebagai satu komunitas yang produktif. Ciri khas dari *dorpsgemeenschap* Cina ini terutama terletak pada otonominya. Secara sosial ekonomi dan juga politik, desa-desa ini relatif berdiri sendiri atau campur tangan pusat kekuasaan politik yang minim (Siahaan, 1989: 24). Pada tahun 1777 di Mandor telah berdiri sebuah Republik Kecil di bawah kekuasaan Tai-Ko Lo Fong yang mempunyai struktur pemerintahan sendiri, seperti kekuasaan tertinggi disebut Tai Ko (Abang yang paling besar), setingkat di bawah Tai-Ko

adalah Nyi-Ko (Abang kedua) di bawah Nyi-Ko adalah Kaptai (Kapten Besar), dan di bawah Kaptai adalah Lo Lai (Vleming, 1936: 256, Lontaan, 1973: 250, La Ode, 1997: 110-111) yang bernaung di bawah kekuasaan Kaisar Cina (Alqadrie, 1984: 70). Peraturan kewarganegaraan negeri Cina dikeluarkan pada tahun 1896, yang menyatakan bahwa orang-orang Cina dimanapun berada tetap diakui sebagai warga negara Cina. Hal ini menyebabkan orang-orang Cina di daerah Kalimantan Barat juga menganggap bahwa mereka berada dalam suatu small Cina dalam arti republik sendiri (Sumadi, 1973: 50-51). Hubungan erat dengan tanah leluhurnya dengan adanya kewajiban republik kecil ini mengirimkan kira-kira 6% dari penghasilannya ke negeri Cina (Maddison, 1988: 437). Mereka selalu mengusahakan untuk mendapatkan dan mempertahankan kebebasan mengurus, mengatur serta menyelesaikan seluruh masalah intern tanpa campur tangan dari kekuatan luar. Bentuk otonomi seperti ini lazim diterapkan di negeri Cina dan dicoba diterapkan oleh imigran Cina di Kalimantan Barat. Jikalau di Cina kekuasaan luar yang dimaksud adalah kekaisaran, di Kalimantan Barat khususnya Pontianak kekuatan asing berupa kesultanan dan kelak juga Hindia Belanda.

Kelompok etnik Cina terdiri dari berbagai sub kelompok, di antaranya Hakka (Khek), Hoklo (Tewcu) dan Teo Chiu yang menguasai pertambangan emas di daerah Mandor dan Monteradio (Vleming, 1936: 254). Di lokasi tersebut mereka membentuk perkongsian untuk memperkuat kedudukannya. Pada tahun 1745 telah terdapat perkongsian Tai Kong, Samto Kiaw dan Few Sjun yang merupakan gabungan antara Lai Kong dan Samto Kiaw. Di Pontianak telah dibentuk Kongsi Tazu Sjin yang mendapat bantuan dari Lo Fong, imigran baru dari Kampung Shak Shan Po, Kabupaten Kuynchu, Provinsi Kanton (Alqadrie, 1984: 69, La Ode, 1997: 109).

Pada tahun 1843, orang Cina yang bermukim di Pontianak berkisar kurang lebih 15.000 orang dan hidup dalam kelompok-kelompok kongsi, Kongsi Lo Fong di Mandor merupakan

kongsi yang terpenting di antara kelompok-kelompok tersebut. Kongsi-kongsi di Pontianak pada umumnya di bawah pengaruh kongsi-kongsi di Sambas (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 215). Kepala pemukiman orang-orang Cina di daerah Mandor bergelar Kapitein Demang dan sejak tahun 1843 diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda (Vleming, 1926: 256) dan kewajiban membayar upeti f 20.000 pertahun dari Kapitein Demang der Kongsi Lo Fong, Ko Aliok kepada pemerintah Hindia Belanda (Arsip Nasional Republik Indonesia, Besluit 9 April 1843 No. 9).

Pada abad ke-19 orang-orang Cina di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak pada dasarnya sebagian besar adalah Cina peranakan dimana terjadinya amalgamasi atau perkawinan campuran antara imigran-imigran Cina dengan penduduk asli. Secara historis imigran Cina umumnya laki-laki pencari kerja atau pelarian. Di daerah ini mereka melakukan perkawinan dengan putri-putri Dayak yang keturunannya mengaku dirinya sebagai orang Cina. Hal ini disebabkan adanya azas kewarganegaraannya yaitu ius sanguinis atau azas keturunan (Alqadrie, 1984: 70).

Menurut de Groot, penduduk Cina di Kalimantan Barat pada tahun 1854 berjumlah kurang lebih 49.000 orang dan terjadi penurunan jumlah penduduk hingga 24.000 orang pada tahun 1856 (Vleming, 1926: 258). Jumlah orang Cina yang menetap di daerah Kalimantan Barat cukup besar, tahun 1970 buruh tambang Cina berjumlah 10.000 orang, tahun 1810 berkisar 32.000 orang, tahun 1829 berjumlah 32.925 orang dan jumlah 41.400 orang pada tahun 1900. Angka-angka tersebut menunjukkan pertumbuhan imigran Cina meningkat dari tahun ke tahun dibandingkan dengan penduduk pribumi dan penduduk pendatang lainnya. Pada tahun 1830, jumlah penduduk di Kalimantan Barat 250.075 orang, terdiri dari suku Dayak dengan jumlah 143.026 orang, suku Melayu berjumlah 71.085 orang, suku Bugis berjumlah 2.281 orang, Arab berjumlah 955 orang, Eropa berjumlah 13 orang dan Cina 32.925 orang. (Cator, 1936: 149).

3.3 Pelapisan Sosial

Secara garis besar jika dilihat dari sudut suku bangsa, penduduk Pontianak sifatnya sangat heterogen. Sifat heterogen atau majemuk penduduk yang ada di wilayah Pontianak memberikan tempat bagi terjadinya interaksi sosial antara golongan etnik atau golongan sosial lainnya. Penduduk pendatang pada umumnya mendiami daerah seberang selatan Sungai Kapuas dengan seberang timur umumnya didiami oleh penduduk asli terutama dari kalangan keluarga Sultan. Dari pemisahan lokasi tempat pemukiman ini secara garis besar dapat dikenali adanya pemisahan tentang ciri-ciri dasar pelapisan antara penduduk di sebelah timur dan seberang selatan Sungai Kapuas.

Susunan masyarakat Pontianak tidak jauh berbeda dari susunan masyarakat tradisional yang lain di Indonesia. Pada pokoknya terdapat tiga kelompok besar dalam masyarakat yang berdasar tingkat strukturnya yaitu tingkatan yang paling atas diduduki oleh raja yang bergelar Sultan dengan keluarganya. Di bawah terdapat kaum bangsawan, dan para pejabat tinggi baik di pusat kerajaan maupun di daerah-daerah, kaum alim ulama dan pedagang. Tingkatan yang paling bawah, yang jumlahnya paling besar adalah rakyat biasa yang terbagi dalam berbagai tingkatan, kelompok dan golongan.

Sultan dengan keluarganya berada pada tingkat teratas dalam piramida masyarakat dan merupakan tokoh yang menjadi panutan utama baik di dalam kalangannya sendiri, maupun bagi golongan-golongan masyarakat diluarnya. Di samping Sultan, adalah para istri, anak-anak perempuan dan putra-putra raja, dan kerabat-kerabat lain yang mempunyai pertalian darah maupun melalui hubungan perkawinan. Mereka adalah golongan bangsawan yang memperoleh kedudukan yang penting karena telah digariskan (*ascribed status*), bukan terutama karena kedudukan yang diperjuangkan (*achievement status*). Di samping itu, dalam mengukuhkan posisi Sultan, anak laki-laki tertua diangkat menjadi calon pengganti Sultan atau dalam situasi khusus kerabat dekat Sultan akan

menggantikan kedudukann-kedudukan raja. Sementara itu putra-putra yang lain diangkat menjadi pejabat tinggi kerajaan atau sebagai penguasa daerah.

Dalam lapisan penguasa, Sultan yang berada di tingkat teratas menduduki pusat-pusat dalam pemerintahan dibantu oleh pembesar-pembesar kerajaan, di antaranya yang terkemuka adalah seorang Bendahara (Patih), seorang Pangeran yang bergelar Laksamana yang bertugas menjaga pantai, dan pembesar-pembesar lainnya bergelar *Uwan* langsung mempunyai kekuasaan atas penduduk pribumi (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 209). Bahkan sering terjadi bahwa seorang pembesar kerajaan mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada Sultan. Misalnya Bendahara Pangeran Syarif Ahmad bin Sultan Abdurrachman Alqadrie, ia dikenal seorang yang cakap, sehingga sebenarnya dialah yang memegang pemerintahan. Pengaruhnya besar sampai ke negeri-negeri sekitar Pontianak dan sepanjang Sungai Kapuas (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 215).

Hubungan antara Sultan serta keluarganya, para bangsawan dengan hubungan perekonomian dan perdagangan juga erat sekali. Dengan demikian, golongan tersebut bukan hanya mempunyai status yang tinggi di bidang politik dan sosial saja, tetapi juga di bidang ekonomi. Tidak mengherankan apabila golongan tersebut merupakan golongan orang-orang berada yang mendapat penghasilan dari pajak bea cukai, upeti, hadiah-hadiah yang diterima dari utusan-utusan negara asing, hasil tanah yang dikerjakan rakyat dan dari sumber-sumber lainnya. Untuk memungut semua penghasilan kerajaan di dalam susunan birokrasi, dibentuk jabatan laksamana yang bertugas memungut pajak cukai dari brang-barang komoditi yang keluar masuk dari Sungai Kapuas (Vleming, 1926: 25) dan penguasa negeri menarik upeti (Hatsil) dari orang-orang Dayak dan pajak pertambangan emas milik orang-orang Cina (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 223).

Setiap kelompok penguasa cenderung mempertahankan posisinya yang terhormat dalam masyarakat. Sultan dan

keluarganya melakukan dengan menurunkan jabatannya kepada anaknya atau dengan mengawinkan anaknya di antara kerabat mereka. Untuk membedakan golongan bangsawan dengan rakyat bawahan, digunakan pelbagai macam lambang status, di antara yang paling menonjol adalah gelar Syarif untuk laki-laki dan Syarifah untuk perempuan. Ada tiga kelompok yang bergelar syarif/syarifah yaitu Alqadrie, Al Hinduan, dan Alaydrus. Dalam hal ini stratifikasi sosial ketiga keturunan bangsawan ini satu sama lain tidak ada perbedaan kedudukan. Sultan sendiri berasal dari keluarga Alqadrie, anak dan keturunannya masing-masing mengabadikan gelar itu di depan dan di belakang namanya sehingga menjadi syarif/syarifah, penduduk keturunan bangsawan juga bergelar Raden, Uray, Gusti, Ya', Wan dan lain-lain. Raden dan Uray gelar bangsawan dari daerah Sambas, sedangkan gusti, ya' (laki-laki) dan Utin, Dayang, Putri, Galuh (perempuan) gelar bangsawan dari daerah Sanggau dan Sintang.

Di samping lambang status gelar, terdapat juga macam-macam lambang status yang lain guna mempertajam perbedaan yang dapat terlihat antara golongan atas dan golongan bawah, seperti rumah, payung, pengiring dan pakaian. Kekayaan bangsawan pemegang apanage dari hasil bumi tanah mereka, ditambah dengan hasil usaha perdagangan, memungkinkan mereka hidup mewah dalam rumah-rumah yang bagus dan bentuk bangunan rumah juga menunjukkan status penghuninya.

Demikian golongan atas dengan lapisannya yang berjumlah sangat kecil dibandingkan dengan golongan penduduk kelas bawah. Tetapi bagaimanapun tetap ada hubungan kepentingan masing-masing di bidang sosial, ekonomi dan politik bahkan kepentingan keagamaan. Meskipun demikian, hubungan ini mempunyai batas tertentu dan agak kaku, disebabkan adat kebiasaan, ikatan darah dan lain-lain. Tetapi hubungan dengan rakyat kebanyakan, benar-benar hal menunjukkan perbedaan yang kaku dan terbatas, karena corak kehidupan sosial ekonomi serta adat kebiasaan lainnya merupakan pemisah antara kedua lapisan penduduk tersebut.

Golongan alim ulama (kyai) termasuk lapisan atas, sekalipun tidak mempunyai kekuasaan politik, golongan ini sangat berpengaruh dalam masyarakat. Adapula yang menduduki jabatan birokrasi meskipun jumlahnya tidak besar, seperti pada tahun 1839 di negeri Landak jabatan untuk Panglima sekaligus merangkap sebagai Kyai (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 226), tahun 1848 yang memerintah di negeri Piasa adalah Kyai Piasa (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 246). Tetapi sebagian besar golongan ini terdapat di daerah pedesaan di antara rakyat biasa. Selain menjadi guru agama banyak pula yang menjadi pedagang sehingga kekayaan yang diperoleh meningkatkan status sosialnya.

Golongan pedagang mempunyai kedudukan yang cukup dihargai oleh masyarakat. Pedagang-pedagang kaya mempunyai pengaruh yang besar di masyarakat, bahkan juga pada pemerintah kerajaan. Penghormatan pada seorang pedagang besar akan makin bertambah, apabila pedagang tersebut sekaligus juga masih keturunan bangsawan. Sudah jelas bahwa penghargaan pada golongan pedagang juga bertingkat-tingkat, menurut besar kecilnya usaha ataupun kaya dan tidaknya pedagang tersebut. Usaha perdagangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang kecil di pasar-pasar tepian sungai, demikian pula pedagang-pedagang yang membawa barang-barang dagangan hasil bumi atau hasil hutan di daerah Kerajaan Pontianak.

Di antara golongan pedagang yang cukup dihargai oleh masyarakat adalah kelompok yang dekat hubungannya dengan Sultan dan keluarganya seperti pedagang Arab, Bugis, Banjarmasin dan Melayu sendiri. Hal itu didasari adanya hubungan kesamaan agama, pendiri kerajaan Pontianak merupakan bangsawan keturunan Arab, Sultan juga merupakan menantu Opu Daeng Manambong (Panembahan Mempawah) keturunan Bugis, dan eratnya hubungan Sultan dengan raja-raja Tanjung Pura yang berdarah Melayu (Alqadrie, 1984: 36).

Di dalam pusat kerajaan terdapat pula prajurit-prajurit yang jumlahnya tidak begitu banyak dan mereka pada umumnya prajurit inti atau prajurit pengawal kerajaan, prajurit-prajurit penjaga di bawah perintah Laksamana, dan prajurit-prajurit yang mengamankan dan menjaga desa-desa dan penduduknya (Vleming, 1926: 255). Dalam keadaan perang, Sultan dapat memobilisasi sejumlah besar rakyat baik dari orang Melayu maupun orang Dayak dan kepala kampung dan kepala kampung wajib menyediakan tenaga beserta senjata dan perbekalannya, sedangkan pihak kerajaan sendiri menyediakan senjata-senjata api (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 223).

Golongan yang ada pada masyarakat di luar pusat kerajaan dikenal adanya kepala-kepala kampung. Di negeri Tayan dan Meliau kepala kampung biasa disebut demang dan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mereka dibantu 2 orang pasirah. Di negeri-negeri lainnya, kepala-kepala kampung tidak mempunyai sebutan kecuali gelar kehormatan yang dipakainya, seperti macan, macan layang, macan pintu, singa, singa muda, layang muda dan sebagainya. Kepala-kepala kampung tersebut langsung di bawah perintah penguasa-penguasa negeri tanpa perantara. Di daerah perintah pedalaman yang jauh dari kedudukan penguasa negeri, mereka berkedudukan sebagai raja yang bebas. Baik di kampung-kampung Melayu maupun di kampung-kampung Dayak peradilan dipegang oleh kepala-kepala kampung. Penguasa negeri hanya mengadili jika ada perkara-perkara yang sifatnya besar atau menyangkut perkara-perkara antar suku. Kepala-kepala kampung tersebut juga bertugas memungut upeti-upeti dari kelompok masyarakatnya, utamanya golongan petani (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973 : 222 - 223).

Dalam lingkungan kampung di mana kehidupan rakyat terutama masih pada tingkat subsistensi serta ekonominya belum sepenuhnya terbuka, hubungan masyarakat bersifat komunal, solidaritasnya terutama berdasarkan perasaan (bersifat emosional) difrensiasi dan spesialisasi masih rendah,

warga kampung pada umumnya golongan petani yang merupakan pelaksana langsung bersawah, berladang dan berkebun merupakan golongan yang cukup besar jumlahnya. Mereka sebagai golongan yang memproduksi komoditi hasil bumi dan hasil hutan yang sebagian diperdagangkan. Perdagangan mereka biasanya dilakukan dengan penjualan sendiri atau biasa juga disalurkan melalui tengkulak-tengkulak yang mendatangi kampung-kampung dalam daerah pedalaman. Tengkulak-tengkulak ini juga sebagai perantara pedagang-pedagang besar yang berada di kota, dan dari tengkulak-tengkulak tersebut perdagangan komoditi antar daerah dapat berjalan (Vleming, 1926: 258). Tetapi bagaimanapun juga bahwa golongan petani yang dapat digolongkan sebagai masyarakat lapisan bawah merupakan tulang punggung bagi kehidupan golongan masyarakat lapisan atas karena surplus pertanian, perkebunan dan hasil hutan jatuh kepada golongan masyarakat lapisan atas juga.

Pusat kerajaan Pontianak dan pelabuhan adalah tempat-tempat yang sesuai untuk kehidupan nelayan atau pencari ikan. Mata pencaharian sebagai nelayan pada mulanya dilakukan kaum pendatang yang dirasakan tidak jauh berbeda dengan lingkungan asal alam kampung halamannya. Mata pencaharian sebagai nelayan juga besar artinya bagi kehidupan perekonomian, mereka menjual hasilnya kepada masyarakat kota, terutama kepada orang-orang lapisan atas yang memerlukan bahan makanan yang lebih bermutu daripada rakyat kebanyakan. Di antara kaum nelayan tersebut sudah tentu banyak yang tidak memiliki peralatan sendiri seperti perahu. Dengan demikian mereka terpaksa harus menyewa alat-alat tersebut atau berfungsi sebagai pelaksana, karena semua modal berasal dari orang-orang lapisan atas dan keluarga bangsawan. Kalaupun mempunyai alat-alat penangkap ikan sendiri dan menjual hasilnya ke pasar-pasar, seringkali harus melalui tengkulak-tengkulak yang juga dari golongan masyarakat pemilik modal.

Golongan tukang atau lebih tepat disebut golongan pekerja juga banyak di kota dan di pusat kerajaan. Golongan lapisan

atas memerlukan golongan tukang untuk membuat rumah-rumah mereka lebih indah untuk membedakan dengan rumah-rumah golongan lapisan bawah. Bagi Sultan dan keluarganya, tukang-tukang yang termasuk pandai besi sangat diperlukan, karena dapat dipekerjakan untuk menambah jumlah persenjataan, yang berarti penting bagi pertahanan kerajaan. Tukang-tukang ini juga biasa membuat sampan-sampan yang berguna sebagai alat transportasi sungai.

Golongan pedagang kecil yang melakukan usaha mengadakan kebutuhan sehari-hari, belum berorganisasi yang baik dengan orientasi pasar yang jelas, tetapi merupakan usaha pribadi atau keluarga yang dilakukan dalam skala kecil. Kelompok ini sebagai pedagang eceran yang menjual sebagian barang-barang milik tuannya, atau menjual barang-barang kelontong dalam partai-partai kecil dalam bentuk warung atau menjual hasil usaha kerajinan tangan di rumah.

Masalah perbudakan disebabkan beberapa faktor:

- Misalnya karena seseorang tidak dapat membayar hutang sehingga anak atau kerabatnya diberikan sebagai pembayar hutang.
- Karena menjadi tawanan perang dan perdagangan budak (Poesponegoro, 1984: 261). Di Pontianak budak-budak biasa diperoleh melalui tawanan perang, seperti bangsawan Melayu di Mempawah masih mempunyai kebiasaan menyerang dan menguasai kampung-kampung Dayak dan menawan penduduknya untuk dijadikan budak (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 223), begitu pula orang-orang Cina menyerang kampung-kampung Dayak, mengambil harta benda dan penduduknya ditawan untuk dijadikan budak (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 218).
- Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan pertambangan yang membutuhkan tenaga kerja kasar yang cukup besar, maka diadakan pengiriman budak-budak pekerja

pertambangan ke Martapura yang juga disebabkan *mijnwet* (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1847, Borneo-West 41/43).

Meskipun golongan budak menempati kedudukan sosial yang rendah, keberadaan mereka diperlukan oleh golongan atas untuk melayani kepentingan-kepentingannya. Pembuatan rumah-rumah golongan atas, bangunan-bangunan kota, pembuatan jalan, dan pekerjaan berat lainnya yang memerlukan fisik kuat biasanya menggunakan tenaga golongan budak.

Dalam masyarakat tradisional hubungan antar pelapisan memang sedikit kaku, apalagi dalam hal perkawinan. Karena pada dasarnya perkawinan antar pelapisan ini agak sulit terjadi, terutama pihak perempuan yang berasal dari golongan lapisan atas. Ada anggapan bahwa jika hal ini terjadi maka akan menurunkan status pelapisan. Biasanya gelar syarifah harus kawin dengan syarif atau keturunan para bangsawan dan keturunan ulama besar. Begitupula yang terjadi pada pedagang-pedagang kaya ingin mengawinkan anaknya dengan keturunan pedagang-pedagang yang kaya pula. Dalam pergaulan sehari-hari ada kesenjangan di antara golongan lapisan atas dengan lapisan bawah. Golongan lapisan atas merasa kurang sesuai bergaul bebas dengan golongan lapisan bawah, sedangkan dari kalangan lapisan bawah agak merasa segan dan malu bergaul dengan golongan lapisan atas. Dari kalangan lapisan bawah pada umumnya memperoleh hak yang lebih sedikit sedangkan kewajiban lebih banyak.

3.4 Hubungan Sosial

Terbentuknya masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bangsa asing, pada dasarnya terjadi karena sikap suku bangsa Melayu yang dalam hal ini berlaku sebagai penduduk asli, yang terbuka menerima kedatangan berbagai suku bangsa dan bangsa asing di daerah mereka. Sikap suku bangsa Melayu memang menganut paham keterbukaan, sehingga setiap pendatang dapat diterima dengan

baik. Dengan sikap ini, sangat terbuka bagi suku bangsa dan bangsa-bangsa asing masuk dan bermukim di daerah ini. Di lain pihak daerah Pontianak yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang relatif kecil mendorong para pendatang untuk membuka perkampungan-perkampungan yang dirasakan daerah ini tidak jauh berbeda dengan kampung halaman asalnya.

Letak geografis yang strategis dekat Malaka, Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan Singapura sangat menguntungkan perkembangan kota dan pelabuhan yang dapat menjadi pusat perdagangan terbesar di Kalimantan Barat. Hal ini mendorong semakin ramainya kedatangan kapal-kapal Nusantara dan kapal-kapal asing untuk berdagang di Pontianak. Kebanyakan para pedagang tertarik untuk bermukim dan mendirikan perkampungan setelah mendapat izin dari Sultan, yang mempunyai strategi maritim dan strategi dagang, maka pada pedagang diterima dengan baik dan diberi kesempatan untuk berdomisili dan membangun daerah ini, dengan taktik ini maka banyak pedagang-pedagang mendirikan perkampungan-perkampungan yang berorientasi pada daerah-daerah atau negara-negara pedagang tersebut berasal. Seperti Kampung Arab, Bansir, Saigon, Kamboja, Bugis, Banjar, Jawa, Bangka-Belitung, Kuantan, dan Melayu sendiri. Hal ini menyebabkan terbentuknya heterogen etnis atau masyarakat majemuk yang merupakan salah satu ciri utama penduduk Pontianak. Ini menunjukkan adanya hubungan yang baik antara Sultan dengan pedagang-pedagang baik dari dalam Nusantara maupun dari luar Nusantara.

Para pedagang yang dekat hubungannya dengan Sultan dan keluarganya adalah pedagang Arab, Bugis, Banjarmasin dan Melayu sendiri. Hal ini didasari adanya hubungan kesamaan agama, pendiri kerajaan Pontianak merupakan bangsawan keturunan Arab, Sultan juga merupakan menantu Opu Daeng Manambong (Panembahan Mempawah) keturunan Bugis, dan eratny hubungan Sultan dengan raja-raja Tanjung Pura yang berdarah Melayu (Alqadrie, 1984: 36).

Hubungan dengan Cina memang agak terbatas, kehidupan Cina yang cenderung mengelompok. Bahasa dan agama sangat berlainan dengan golongan suku bangsa lainnya, sehingga hubungan sesamanya tidak dapat berjalan dengan akrab. Politik orang-orang Cina yang berorientasi pada negeri leluhur menimbulkan sering terjadinya konflik dengan suku bangsa lainnya. Wertheim berpendapat bahwa konflik sosial serta diskriminasi rasial antara bumiputera dengan Cina merupakan konsekuensi kompetisi ekonomis dan Somers menambahkan bahwa dominasi ekonomi itu pula yang dianggap mempunyai hubungan kausal dengan ketegangan sosial dan peranan ekonomi yang khas inilah yang melatarbelakangi penanaman "a mighty wholesale dealer" oleh Coen terhadap golongan Cina (Siahaan, 1989: 18-19). Pada umumnya mereka terlibat dalam kegiatan agraris, menguasai daerah pertambangan emas dan sebagai perantara perdagangan bagi pedagang Eropa utamanya Belanda dengan pedagang pribumi. Pedagang-pedagang Belanda memasukkan bahan-bahan kain sutera, barang-barang rumah tangga dan minyak tanah, yang kemudian membawa komoditi perkebunan dari pedagang-pedagang Cina yang tahu akan kebutuhan penduduk (Vleming, 1926: 262).

Persaingan antara kongsi-kongsi Cina sering menimbulkan konflik yang pada dasarnya disebabkan perebutan tambang-tambang emas yang merupakan sumber mata pencahariannya. Konflik Tai-Ko Lo Fong yang ingin menaklukkan kongsi-kongsi di sekitarnya, seperti penaklukan Ung Kui Peh dan Kong Neh Pak yang akhirnya mereka bersama-sama dengan anggota warganya bergabung ke dalam pemerintahan Tai-Ko Lo Fong, kemudian pertempuran dengan Tai-Ko Liu Siong yang meluas sampai ke San King (hulu Toho), dalam pertempuran ini Tai-Ko Liu Kong Siong terbunuh sehingga pasukan beserta daerahnya dikuasai Tai-Ko Lo Fong. Dari penaklukan tersebut, maka Tai-Ko Lo Fong memperluas areal pertambangan emas yang kemudian melebar sampai ke Mempawah, Pontianak dan Landak. Sehingga pada tahun 1777 Tai-Ko Lo Fong mendirikan "Republik Kecil" yang berpusat di Mandor (Lontaan, 1973: 250, La Ode, 1997: 110).

Sejak diadakannya perjanjian 5 Juli 1779 dengan Kompeni Hindia Belanda yang bertujuan untuk mengatur sistem pemerintahan dan mempertahankan kerajaan ini secara bersama-sama (Arsip Nasional Republik Indonesia, Borneo-West 16/26). Perjanjian ini mendapat kecaman dari pihak kerabat kerajaan, Sultan Kasim yang tidak menyetujui keterikatan dengan perjanjian tersebut kemudian meninggalkan keraton dan membangun perkampungan sendiri di luar keraton yang dikenal dengan Kampung Luar (Alqadrie, 1984: 83-84). Sebagian kerabat Sultan meninggalkan keraton dan mencari tempat pemukiman yang baru, Syarif Abdullah dengan para pengikutnya yang terdiri dari orang-orang Bugis dan Melayu mengungsi ke daerah Loloan (Bali) dan menyatu dengan masyarakat Bugis yang sebelumnya telah menghuni daerah tersebut untuk melawan pemerintahan Kompeni Belanda (Suwitha, 1997: 173).

Hubungan antara orang-orang Cina dengan suku-suku Dayak di daerah Pontianak seringkali terjadi konflik, yang sering meluas menjadi suatu peperangan. Konflik rasial ini selalu berkaitan dengan daerah penambangan emas dan intan. Konflik-konflik biasanya terjadi karena adanya perampasan-perampasan yang sering dilakukan oleh orang-orang Cina terhadap suku-suku Dayak, seperti penyerangan kampung-kampung Dayak dan merampas harta bendanya, penguasaan tambang-tambang emas dan intan, bahkan juga menawan penghuni kampung tersebut untuk dijadikan budak. Sengketa-sengketa ini sering meluas dan menjadi sengketa umum di antara orang-orang Cina dengan suku-suku Dayak. Di antara sengketa yang terbesar terjadi di Landak pada tahun 1841 dan tahun 1846, dimana Pemerintah Belanda terpaksa ikut campur tangan menengahi sengketa-sengketa tersebut dengan perantara Kerajaan Pontianak terutama dari Pangeran Bendahara (Arsip Nasional, 1973: 218). Dengan adanya sengketa-sengketa tersebut utamanya di daerah Landak, penarikan retribusi pajak tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dan pada tanggal 20 Mei 1844 Kongsi Lo Fong baru dapat membayar utang retribusinya sebesar f 4.000 keterlambatan

dalam membayar pajak juga diakibatkan permusuhan masyarakat Dayak di Landak dengan masyarakat Cina di Mandor (Arsip Nasional Republik Indonesia, Besluit 20 Mei 1844 No. 4).

Sekitar tahun 1847 daerah Mempawah hampir diserang oleh orang-orang Cina dari Monterado yang dibawah pimpinan Kongsi Tai Kong. Konflik ini disebabkan oleh perkelahian antara dua orang Cina dengan tiga orang Melayu dari Mempawah. Dalam perkelahian tersebut kedua kelompok orang Cina mengalami luka-luka yang cukup parah. Untuk mencegah konflik itu agar tidak meluas, maka Pemerintah Belanda berhasil mencegah penyerangan orang Cina dari Moterado. Perdamaian dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Belanda berhasil menangkap tiga orang pelaku dari Mempawah tersebut. Kemudian dua orang diajukan ke pengadilan dan seorang lagi dibunuh atas perintah Gesaghebber Mempawah. Dalam kejadian tersebut Pembesar ini sendiri dicurigai terlibat dalam peristiwa itu, oleh karena ia masih kerabat Sultan maka ia tidak dapat diajukan ke pengadilan (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 221).

Hubungan antara Pemerintah Belanda dengan orang-orang Cina, Jawa dan Melayu sangat erat dan baik, mengingat adanya kepentingan-kepentingan Belanda bagi golongan etnis tersebut. Golongan Cina baik di kota maupun di pedalaman menguasai sebagian besar perekonomian, sehingga pihak Belanda sangat memerlukannya karena kemampuan ekonominya dapat membantu Pemerintah Belanda. Dalam hubungan kerjasama antara keduanya pedagang-pedagang Cina memerlukan bantuan pihak Belanda untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas dagang. Beberapa hak-hak istimewa dan fasilitas yang diberikan Belanda dengan harapan dapat menyaingi golongan suku bangsa lain yang telah erat hubungannya dengan Sultan (Alqadrie, 1984: 107). Kemudian pemerintah Belanda mengangkat seorang pemimpin yang dipilih sebagai wakil dari masyarakat Cina dengan pangkat majoor sebagai pangkat tertinggi, dibawahnya adalah kapitein, Luitenant dan

Wijkmeestee (kepala kampung). Tugas-tugas para pemimpin tersebut sebagai perantara atau menghubungkan orang-orang Cina dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi dalam pemerintahan Belanda. Para pemimpin tersebut bagi orang Cina menyebutnya *Kongkoan* (Surjo, 1989: 44, la Ode, 1997: 107).

Pendekatan pemerintah Belanda ternyata tidak seluruhnya berhasil. Hubungan antara pemerintah Belanda dengan golongan Cina khususnya yang berada di luar kota Pontianak sering terjadi pemberontakan. Penyerangan-penyerangan terhadap Belanda dilakukan secara sporadis yang terjadi pada tahun 1877, 1819 dan 1823. Pemberontakan ini dilakukan untuk menguasai kota Pontianak dari tangan pemerintahan Belanda dan dengan harapan dapat menguasai seluruh Kalimantan Barat tetapi bagi Sultan Pontianak, kongsi-kongsi Cina ditunjukkan kepada pemerintah Belanda dan setiap serangannya dapat selalu dihancurkan, Kapitan Tjap dari Mandor datang menemui Sultan untuk meminta maaf dan menyatakan sumpah setianya kepada Kerajaan Pontianak, padahal serangan-serangan tersebut yang dilakukan para kongsi bertujuan untuk menyerang pihak Belanda dan bukan menyerang Sultan (Alqadrie, 1984: 71-72). Dengan adanya pemberontakan yang sering terjadi, maka pemerintah Belanda memerintahkan untuk membubarkan seluruh perkongsian yang ada di Kalimantan Barat dan menempatkan semua wilayahnya di bawah kekuasaan pemerintahannya.

Dikuasainya daerah-daerah tambang emas dan pusat-pusat pemukiman di Mandor dan Monterado pada tahun 1856, sehingga mata pencaharian orang-orang Cina menjadi tidak menentu. Mereka mulai membuka perdagangan dan sebagian bertani, sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti menanam lada dan sayur-sayuran (Vleming, 1926: 257). Bagi pedagang mulai mengalihkan perhatiannya ke kota Pontianak, yang telah berkembang pesat dengan adanya pelabuhan yang ramai dan seringnya dikunjungi pedagang-pedagang dari Nusantara dan luar Nusantara. Pada masa itu

karet sudah merupakan komoditi yang utama dan penghasilan yang cukup besar bagi para eksportir, dan orang-orang Cina di kota sudah menguasai perdagangan karet baik di dalam kota Pontianak maupun di daerah pedalaman (Vleming, 1926 : 260, Lontaan, 1975: 253).

Bagi pemerintah Belanda suku bangsa Jawa diperlukan pikirannya karena pegawai-pegawai gubernemen pada umumnya berasal dari Jawa. Sedangkan tenaganya diperlukan untuk mengelola perkebunan dan pertanian terutama karet dan kelapa baik di dalam maupun di luar pusat kota (Alqadrie, 1984: 37). Suku bangsa Jawa sendiri memang diberi kesempatan oleh pemerintah Belanda untuk berkolonisasi dari daerah yang padat ke daerah Kalimantan Barat yang kondisi fisiknya masih terbuka luas untuk daerah pemukiman dan usaha pertanian. Secara ekonomis perpindahan penduduk mendatangkan hal positif. Kedatangan orang-orang Jawa yang mengelola usaha pertanian sangat bermanfaat bagi orang Melayu dengan menemukan cara-cara yang baru dan penting dalam melakukan usaha pertanian karet, kelapa dan terutama penanam padi untuk kebutuhan bahan makanan sendiri (Vleming, 1926: 256).

Dengan adanya berbagai suku-suku bangsa membawa akibat sosial yang penting. Terjadinya hubungan geografis terwujud pula hubungan yang lebih erat antara beberapa daerah di Indonesia dan sekedar penurunan dari tekanan kepadatan penduduk yang terlaksana, paling kurang sepanjang menyangkut lapangan kerja. Perkenalan antar suku bangsa, terutama yang dilakukan oleh para pendatang, memberi kemungkinan terbukanya komunikasi dalam pertukaran pengalaman-pengalaman di daerahnya yang akan menjurus pada kesadaran tentang kesatuan dari suku bangsa dari seluruh tanah air.

BAB IV

PERDAGANGAN, AGAMA DAN POLITIK

4.1 Perdagangan

4.1.1 Jalur dan Pusat-Pusat Pelayaran

Jalur Sutra atau sering dikatakan *silk roads* merupakan jalur-jalur perdagangan yang menghubungkan antara ujung Barat Eropa dengan ujung timur Asia. Penamaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa “sutera” merupakan barang komoditi perdagangan yang sangat penting dari timur, terbuat dari serat alam yang bermutu tinggi, indah, berkesan mewah dan memiliki kelembutan dan kehalusan tersendiri, sehingga sangat nyaman dan enak dipakai.

Jadi kata “sutera” disini mempunyai pengertian yang simbolik yang ditunjukkan oleh adanya kelembutan dan kehalusan dari jalinan hubungan yang erat antar manusia dengan kebudayaan-kebudayaan yang mereka bawa dalam melakukan pelayaran dan perdagangan. Dengan ditemukannya sutera dari timur ini mendorong bagi pedagang-pedagang Eropa untuk mencarinya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menghubungkan antara barat dengan timur.

Kalau diteliti lebih jauh, sebenarnya sutera ini bukan merupakan barang komoditi perdagangan yang utama, melainkan rempah-rempahlah yang sangat dibutuhkan oleh pedagang-pedagang Eropa, sehingga jalur pelayaran dari

barat ke timur ini sering disebut juga dengan jalur rempah-rempah atau *spice route*, namun dalam pembicaraan umum biasa digunakan istilah jalur sutera, ini dihubungkan dengan makna yang terkandung didalamnya (Trinidarwanti, 1999).

Dalam membicarakan masalah jalur-jalur dan pusat-pusat pelayaran, maka tidak bisa dipisahkan mengenai penjelajahan yang dilakukan oleh pelaut-pelaut asing, seperti pelaut Cina, Arab, Persia, India, Portugis, Belanda, Inggris, dan lain-lain, di samping juga pelaut-pelaut dari Nusantara yang juga ikut meramaikan jalur pelayaran tersebut. Para pelaut asing inilah yang mempunyai peranan penting dalam penemuan jalur pelayaran dari barat ke timur melalui ekspedisi yang mereka lakukan.

Jalur pelayaran pertama dilakukan dengan melintasi laut Arab menuju ke Teluk Oman terus melalui Selat Ormuz ke Teluk Persia. Jalur pelayaran kedua melalui Teluk Aden dan Laut Merah dan dari Kota Suez, jalur pelayaran melalui daratan ke Kairo Iskandariah. Dengan adanya jalur pelayaran tersebut di atas, maka kapal-kapal dari Arab, Persia dan India mulai melakukan pelayaran dari barat ke timur dan akhirnya sampai ke Cina. Ada satu indikasi bahwa jalur pelayaran yang telah terbuka, membawa dampak yang positif bagi para pelaut lain untuk melakukan pelayaran (Poesponegoro, 1984: 122).

Menurut Groeneveltdt menyatakan bahwa orang-orang Cina yang pertama kali melakukan pelayaran ke Asia Tenggara tidak membawa misi untuk negara, mereka hanya sebagai petualang, namun lama kelamaan setelah mereka mengenal satu sama lain, mulailah mereka mengadakan kontak hubungan yang erat. Berdasarkan sumber Cina, pada tahun 1403 (masa kaisara Yung Le dari Dinasti Ming) mulai mengirimkan ekspedisi-ekspedisi dengan menggunakan armada yang sangat luas melalui lautan bagian barat (Shi Yang) untuk memperkuat kebijaksanaan di seberang lautan (Purcell, 1965: 12).

Ekspedisi itu dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho bersama-sama dengan teman sejawatnya yaitu Wang Chin,

Hung Pao, Yung Chen dan Chang ia melakukan tujuh kali pelayaran dari tahun 1405 sampai tahun 1431 (Purcell, 1965: 16). Pelayaran yang dilakukan oleh pelaut Cina tiba di Kalikut, Cochin, Siam, Ceylon, Ormuz, Aden, Mogadhiso dan melalui Timur Laut mereka menyusuri Kepulauan Sulu, Kalimantan Timur, Banjarmasin dan akhirnya sampai di Jawa. pelayaran ini menggunakan angin dagang dalam arti bahwa tujuan mereka adalah melakukan perdagangan (Lombard, 1996: 30).

Mengingat betapa pentingnya jalan dagang tersebut, maka orang-orang Portugis berusaha untuk menguasai jalur pelayaran tersebut, dengan dipelopori Alfonso D' Albuquerque berhasil menduduki Ormuz, Malaka dan Goa. Tujuan dari pelayaran tersebut adalah untuk mengadakan perdagangan, kemudian muncul keinginannya untuk menguasai kekayaan dari daerah tersebut dengan cara memonopoli perdagangan dan melakukan campur tangan terhadap pemerintah terutama dalam hal pengangkatan raja-raja (Poesponegoro, 1984: 122). Setelah pelaut-pelaut Portugis kemudian disusul oleh pelaut-pelaut dari Belanda. Motif kedatangannya hampir sama dengan motif orang-orang Portugis yaitu ekonomi dan petualangan. Ekspedisi Belanda dimulai pada tahun 1595 dengan suatu armada yang terdiri dari empat buah kapal dagang yang berangkat menuju ke Indonesia. Pelayaran pertama dipimpin oleh Cornelis De Houtman dan pada tahun 1596 tiba di Banten dan mendapat sambutan yang baik sekali dari penguasa-penguasa Banten. Mereka menjalin persahabatan dengan penduduk pribumi, bahkan melakukan perjanjian dagang, sehingga sejak saat itu mulailah imperialisme Belanda di Indonesia, sampai akhirnya pada tahun 1602 membentuk VOC dengan tujuan untuk menghindari persaingan di antara pedagang Belanda, untuk mendapatkan keuntungan yang besar-besarnya dan mampu bersaing dengan kongsi-kongsi dagang, seperti EIC dan CI serta untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah (Poesponegoro, 1984: 47).

Kedatangan pedagang-pedagang Eropa seperti yang tersebut di atas dengan memanfaatkan adanya hubungan yang

dinamis antara daerah-daerah Asia yang beriklim khatulistiwa yang kaya akan jenis tumbuh-tumbuhan dengan daerah-daerah yang beriklim sub tropis yang sudah maju di bidang industri sehingga dapat menghasilkan produk yang laku dipasaran. Keadaan seperti itu, sangat menunjang bagi pedagang-pedagang Eropa, dimana mereka tidak memiliki sesuatu yang bernilai untuk diperdagangkan selain biji besi dan logam-logam untuk membuat mata uang (Lombard, 1996: 5).

Apabila kita telusuri lebih lanjut mengenai perjalanan dari pedagang-pedagang Eropa tersebut, maka akan ada satu kelompok pedagang yang secara terus menerus memegang peranan penting dalam perdagangan laut yaitu pedagang-pedagang Bugis. Yang dimaksud dengan pedagang Bugis ini bukan hanya orang-orang Bugis saja tetapi juga termasuk pedagang-pedagang dari Makassar, Mandar, Selayar dan Buton dan kemungkinan pula pedagang-pedagang dari Melayu dan Arab yang berdomisili di Sulawesi Selatan. Mereka dikenal sebagai pelaut-pelaut ulung dan tidak gampang menyerah dalam melakukan persaingan terutama dengan pedagang-pedagang Belanda, sehingga di mana saja mereka bertemu selalu diwarnai dengan persaingan (Poelinggomang, 1997: 150).

Selain pedagang-pedagang Bugis, perkembangan dan kemajuan dalam perdagangan di Nusantara ini juga diwarnai oleh pedagang-pedagang dari Melayu, Ternate juga Tidore. Mereka mempunyai keunggulan dalam perdagangan yang didukung oleh:

- Menganut prinsip laut bebas dan menyelenggarakan perdagangan bebas.
- Memiliki sikap keras, cekatan, gigih dan tidak mengenal kata menyerah dalam melakukan kegiatan perdagangan.
- Menjalin hubungan yang baik dengan penguasa dan ulama.
- Selalu menepati janji dalam melakukan hubungan kerjasama dalam perdagangan.
- Menjadikan pelabuhan sebagai pusat ekonomi.

Faktor-faktor inilah yang mendasari mereka sebagai pedagang yang mempunyai peranan penting dalam perdagangan laut di Indonesia (Poelinggomang, 1997: 151).

Setelah pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur mengalami kemerosotan dan munculnya Makassar sebagai pusat perdagangan, mengakibatkan terjadinya pergeseran dalam jaringan perdagangan dan rute pelayaran di Indonesia. Selama abad ke-16 rute yang ditempuh ialah Maluku - Jawa - Selat Malaka, kemudian menjelang akhir abad ke-16 itu rute pelayaran berubah melalui Maluku - Makassar - Selat Sunda. Sementara itu ada pergeseran sebagian perdagangan dari Pesisir Jawa Timur ke seberang lautan Jawa yaitu ke Banjarmasin dan Sukadana, sehingga perdagangan dari Jawa menambah ramainya perdagangan dan pasar di Banjarmasin. Perdagangan rempah-rempah menjadi sasaran utama bagi pedagang-pedagang Eropa, sehingga memacu mereka untuk datang dan menguasainya dengan politik monopolinya (Kartodirdjo, 1993: 69).

4.1.2 Teknologi Dalam Pelayaran

Kepulauan Nusantara mempunyai letak yang sangat strategis yaitu sebagai tempat persilangan lalu lintas laut yang menghubungkan antara ujung barat Eropa dengan ujung timur Asia didukung adanya komunikasi antara penduduk-penduduk di Kepulauan Indonesia tersebut. Kondisi seperti itu menyebabkan munculnya suatu jaringan hubungan maritim yang sangat baik yang didukung oleh kemajuan teknologi kapal, keahlian dalam sistem navigasi dan sistem angin musim dapat memberikan kemungkinan untuk pengembangan bagi jalur pelayaran dari barat ke timur atau sebaliknya secara teratur dan tetap (Kartodirdjo, 1993: 1). Ini dapat dilihat dari kemahiran dan kecakapan pelaut-pelaut itu dalam melakukan pelayaran. Bagi pelaut-pelaut asing, mereka telah menggunakan jenis kapal yang lebih sanggup melintasi samudra dengan perlengkapan yang lebih maju, seperti: peta-peta dan roteiros (petunjuk-petunjuk untuk berlayar), kompas dan

strolabe yang digunakan sebagai penunjuk arah dan tempat menurut deklinasi dan inklinasi jarumnya dan juga untuk menentukan lokasi menurut pengukuran tinggi matahari terutama apabila kapal berada di tengah-tengah laut tanpa mempunyai baringan darat (Poesponegoro, 1984: 105).

Pelaut-pelaut Indonesia menggunakan kapal-kapal dan perahu-perahu sejenis perahu lesung. Bentuk kapal seperti itu merupakan bentuk yang paling sederhana, agar supaya kapasitas muatannya lebih banyak, maka pinggiran kapal ditinggalkan dengan papan-papan, ada yang mempunyai katir atau cadik, baik tunggal maupun yang ditempatkan di samping kiri dan kanan kapal yang berguna untuk menjaga keseimbangan. Kapal jenis ini mempunyai perahu lesung ini dikatakan paling sederhana, namun dalam teknik pembuatannya memerlukan keahlian dan pengalaman yang khusus, mulai dari memilih kayu sampai pekerjaan mengeruk batangnya (Poesponegoro, 1984: 110). Dalam perkembangannya sampai dengan zaman Indonesia-Hindu, sudah dikenal berbagai jenis kapal, seperti: kapal besar yang tidak bercadik dan kapal yang sudah bercadik.

Menurut catatan orang Portugis pada awal abad ke-16, pelaut-pelaut Indonesia sudah mengenal peta untuk berlayat dan orang-orang Portugis berusaha keras untuk memperoleh peta-peta tersebut. Albuquerque pernah mengirim sebuah peta yang bertuliskan huruf Jawa kepada Raja Portugis, tetapi kapal yang membawa peta itu tenggelam, sehingga tidak ada bukti mengenai pelayaran Jawa pada masa itu. Hanya keterangan Albuquerque itulah yang memberikan indikasi tentang penggunaan peta dalam pelayaran Indonesia, tetapi dengan hilangnya peta tersebut, maka tidak bisa dicek kebenarannya mengenai peta di Jawa.

Berdasarkan keterangan dari pelaut-pelaut Belanda dari abad ke-17, bahwa kapal-kapal pribumi tidak menggunakan kompas dalam melakukan pelayaran, namun begitu mereka bisa menentukan lokasi di mana kapal berada berdasarkan bentuk awan, pantulan sinar matahari dan ada yang melihat

pada warna dan jenis air laut serta arusnya. Dari apa yang dikemukakan di atas dapatlah dianalisa, bahwa tingkat kemajuan dan perkembangan navigasi itu tidak sama (Poesponegoro, 1984: 108-109).

Dalam sistem pelayaran di Indonesia sangat tergantung pada sistem angin yang berlaku di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur, dimana pada bulan Oktober kapal-kapal mulai berlayar dari Maluku menuju pusat-pusat perdagangan di Makasar (Ujung Pandang), Gresik, Demak, Banten, Malaka dan kota-kota lainnya di sebelah barat. Pada bulan Juni sampai bulan Agustus angin di Laut Cina Selatan bertiup ke arah utara sehingga memudahkan pelayaran ke Ayuthia, Campa, Cina dan negara-negara di sebelah utara. Jadi dengan adanya angin musim ini menyebabkan Kepulauan Indonesia, terutama bagian sebelah barat mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi bertemunya kapal-kapal dari semua arah, baik kapal-kapal Asing maupun kapal-kapal Nusantara.

Pelaut-pelaut Indonesia masih bersifat tradisional. Mereka menggunakan perahu-perahu yang sangat sederhana dalam melakukan pelayaran dan hanya berpegang pada pengetahuan yang diperoleh secara turun temurun. Namun begitu mereka dikenal sebagai pelaut yang ulung pada zaman bahari, seperti pelaut Bugis dan Makassar, mereka mempunyai suatu cara untuk meramalkan apakah kapal atau perahu yang dijumpai itu mempunyai maksud yang baik atau buruk (Poesponegoro, 1984 : 109).

Menurut sumber-sumber statistik, kegiatan pelayaran dibagi menjadi dua, yaitu : *kustvaart* untuk menyebut pelayaran dalam negeri atau lokal dan *scheepvaart* untuk menyebut pelayaran internasional atau pelayaran antar negara. Pelayaran yang dilakukan oleh penduduk pribumi untuk kepentingan pelayaran lokal harus dilengkapi dokumen pelayaran pribumi yang berupa *jaarpas* (surat izin berlayar tahunan), sedangkan kapal-kapal Eropa baik untuk pelayaran internasional maupun pelayaran dalam negeri harus dilengkapi dengan dokumen yang berupa *zeebrief* (paspor berlayar) dan

jaapas. Kebijaksanaan pemerintah Kolonial Belanda di bidang pelayaran dan perdagangan adalah untuk melindungi kapal-kapal Belanda dalam persaingannya dengan kapal-kapal asing, sehingga kapal-kapal milik pengusaha-pengusaha Belanda ini mendominasi pelayaran di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Barat pada khususnya. Kapal-kapal itu sekaligus digunakan sebagai alat bagi pemerintah Kolonial Belanda untuk kepentingan-kepentingan politik, seperti: untuk mengangkut pegawai dan peralatan-peralatan pemerintah Kolonial Belanda di berbagai daerah, sedangkan kapal-kapal pribumi yang karena lemah baik dalam hal peralatan, ukuran kapal, modal, dan sebagainya tidak dapat berkembang dengan baik (Sulistiyono, 1997: 212-213).

4.1.3 Pelabuhan

Secara geografis, pelabuhan merupakan tempat pertemuan antara wilayah darat dan wilayah laut, sehingga fungsi utamanya adalah untuk memindahkan muatan dari laut ke darat atau sebaliknya. Dilihat dari faktor ekologi, pelabuhan merupakan tempat yang paling penting bagi kapal-kapal. Pelabuhan tidak hanya sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal, tetapi lebih luas lagi adalah sebagai tempat di mana kapal-kapal dapat berlabuh dengan aman, terlindung dari ombak besar, angin dan arus yang kuat, selain itu pelabuhan juga digunakan sebagai tempat untuk mengambil bekal dan menumpuk barang (Kartodirdjo, 1993: 4).

Letak pelabuhan yang paling baik adalah pada sebuah sungai, agak jauh ke dalam sehingga mempunyai fungsi sebagai penghubung antara jalan maritim dengan jalan darat. Pelabuhan harus mempunyai daya penarik yang besar bagi kapal-kapal dari luar, dalam arti menjadi pasar yang ramai, di mana hasil-hasil hutan dari pedalaman diperdagangkan dan tersedianya bahan makanan untuk konsumsi kapal (Poesponegoro, 1984: 153). Kriteria-kriteria suatu pelabuhan seperti yang telah dijelaskan di atas itu telah dipenuhi persyaratannya oleh pelabuhan Pontianak sebagai pelabuhan terbesar di Kalimantan Barat.

Sebelum mengupas lebih jauh mengenai fungsi dari pelabuhan Pontianak sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Kalimantan Barat, maka dibawah ini sedikit gambaran mengenai nama Kalimantan, berasal dari Lamnta atau sagu mentah, yang dalam bahasa Jawa ditafsirkan sebagai Kalimantan atau sungai intan. Kalimantan pada abad ke-12 lebih dikenal sebagai Tanjung Pulo atau Tanjung Pura, yaitu merupakan nama sebuah kota perdagangan di barat daya (Elf Aquitaine Indonesia, 1989: 58-59).

Pada tahun 1839, Kalimantan sudah berada dibawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Wilayah itu secara administratif terbagi menjadi tiga afdeeling, yaitu: afdeeling Pantai Selatan dan Pantai Timur, afdeeling Sambas dan afdeeling Pontianak.

Afdeeling Pontianak sendiri terbagi atas 26 negeri, yaitu: Pontianak, Mempawah, Landak, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sipau, Blitang, Sintang, Silat, Suhait, Salembau, Piasa, Jungkung, Bunut, Malo, Sibau, Taman, Madai, Kayan, Melawai, Matan, Simpang, Sukadana dan Kubu. Setiap afdeeling ini dipimpin oleh Asisten Residen yang dibantu oleh empat orang *gezaghebber*, seorang adalah Belanda yang berkedudukan di Sukadana dan tiga di antaranya adalah pribumi yang berkedudukan di Mempawah, Tayan dan Landak (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973: 209).

Pontianak ini merupakan suatu negeri yang dikepalai oleh seorang Sultan dengan dibantu oleh pembesar-pembesar di antaranya yang terkemuka adalah seorang pembesar yang bergelar Bendahara (Patih), seorang Pangeran yang bergelar Laksamana yang bertugas menjaga pantai dan pembesar-pembesar lainnya yang bergelar uwan yang langsung mempunyai kekuasaan atas penduduk pribumi.

Berbicara masalah asal-usul kerajaan Pontianak ini, maka akan muncul satu nama yaitu Syarif Abdurrahman yang merupakan pendiri kerajaan Pontianak. Ia adalah seorang pelaut yang sangat pemberani, sehingga pusat taktiknya di

letakkan pada strategi maritim. Masa mudanya selalu diwarnai dengan petualangan, berdagang lada ke Banjarmasin, melakukan perompakan terhadap kapal Perancis di Pasir dan jung-jung Cina.

Mengenai kapan tepatnya Kerajaan Pontianak ini berdiri, ada beberapa pendapat, antara lain:

- Menurut P.J. Veth dalam *Borneo's Wester Afdeeling* 1-15, dinyatakan bahwa Syarif Abdurrahman meninggalkan Mempawah tanggal 23 November 1771 dan tanggal 1 Januari 1772 bersama dengan pengikutnya mendirikan masjid.
- J.H. Meyer, mengatakan bahwa Syarif Abdurrahman meninggalkan Mempawah dan menyusuri Sungai Kapuas tanggal 25 November 1771.
- Yacob Ozinga dalam bukunya "*De Economische Ontwikkeling der Wester Afdeeling Van Borneo en de Bevolkkings Hubber Cultuur*" dijelaskan bahwa hari jadi kota Pontianak tanggal 23 Oktober 1771.
- Pada tahun 1771, Syarif Abdurrahman bersama dengan pengikutnya melakukan pelayaran melalui Sungai Kapuas sampai tempat pertemuannya dengan Sungai Landak dan di tempat tersebut, ia mendirikan pemukiman baru untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan. Pada tanggal 7 Januari 1772, ia mulai melakukan pembukaan hutan dan tempat tersebut diberi nama Pontianak (Kartodirdjo, 1993: 284).

Setelah dua tahun menjadi Sultan di Kerajaan Pontianak, maka pada tahun 1194 H atau 1778 M, masuklah kekuasaan pemerintah Belanda dari Batavia dengan mengirim Asisten Residen Rembang bernama Willem Adrian Palm dan sejak saat itulah bangsa Belanda berada di Pontianak yang bertempat di seberang keraton Pontianak dengan nama Tanah Seribu atau *verkeer* depaal (Mirza dkk., 1997-1998 : 1-2).

Pelabuhan Pontianak mempunyai letak yang sangat strategis dilihat dari lalu lintas laut, sehingga menjadikan kota Pontianak sebagai pintu gerbang daerah Kalimantan Barat. Pantai Kalimantan Barat terletak di jalur lalu lintas laut internasional yang menghubungkan kepulauan Indonesia dengan wilayah Asia melalui Selat Malaka, sehingga menjadikan pelabuhan Pontianak memiliki peranan yang sangat penting pada masa-masa lampau. Sejak zaman kuno, pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang dari Eropa dan pedagang-pedagang Cina itu memerlukan tempat untuk persinggahan dan tempat yang paling tepat adalah pelabuhan.

Pelabuhan Pontianak digunakan sebagai tempat persinggahan bagi kapal-kapal besar, bahkan sebagai kota perdagangan bagi bangsa-bangsa Eropa, Cina dan lain-lain serta pedagang-pedagang dari Nusantara, seperti: Palembang, Johor, Riau, Banten, Mataram, Kalimantan Selatan, Makassar, Bugis dan sebagainya (Kartodirdjo, 1993: 282). Perdagangan yang dilakukan antara pedagang-pedagang Nusantara ini selalu dihubungkan dengan perdagangan sutera yang jalurnya banyak melalui lautan, sehingga kota pelabuhan seperti Pontianak ini mempunyai peran yang sangat penting. Letak kota Pontianak yang agak menjorok ke daratan mengakibatkan keamanan akan lebih terjamin kapal-kapal yang akan singgah di pelabuhan Pontianak akan dapat diawasi oleh pihak-pihak penguasa dalam hal ini adalah Keraton Kadriah (Alqadrie, 1984: 11).

Pontianak didirikan di simpang tiga sungai besar, yaitu Sungai Landak yang mengalir dari arah timur laut, Sungai Kapuas Kecil mengalir dari arah timur dan Sungai Kapuas Besar mengalir ke arah barat menuju laut lepas, sehingga Sungai Kapuas Besar ini berfungsi sebagai filter terhadap kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh kapal-kapal yang datang.

Ada tiga fungsi utama yang menjadikan Kota Pontianak sebagai tempat yang banyak didatangi oleh para pedagang asing bahkan banyak yang kemudian berimigrasi ke Pontianak

yaitu: Pontianak merupakan pusat pemerintah di Kalimantan Barat, Pontianak sebagai kota dagang dan Pontianak sebagai pelabuhan. Tumbuhnya Pontianak menjadi kota dagang diakibatkan oleh mundurnya kerajaan-kerajaan besar di Kalimantan Timur, seperti: Kerajaan Sambas, Kerajaan Sukadana, Kerajaan Kubum dan Kerajaan Sintang. Sejak dibukanya daerah sebelah selatan Sungai Kapuas oleh Asisten Residen Willem Adrian Palm pada tahun 1779 menjadikan Pontianak sebagai pelabuhan terbesar di Kalimantan Barat.

Pada awal abad ke-17, Kalimantan Barat telah mempunyai hubungan perdagangan dengan daerah-daerah lain, seperti: Palembang, Riau, Banten, Mataram, Kalimantan Selatan, Makassar dan pedagang-pedagang dari Eropa, seperti: bangsa Portugis, Spanyol, Belanda dan lain-lain.

Faktor lain yang mempengaruhi kedatangan para pedagang asing itu adalah sikap dari kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat, di mana raja-raja di Kalimantan Barat ini bersikap terbuka dalam arti mereka mau membuka diri untuk menjalin hubungan yang erat. (Kartodirdjo, 1993: 282).

4.1.4 Perdagangan di Pontianak

Penduduk asli Kalimantan Barat bertempat di pedalaman, mereka hidup dengan mengumpulkan hasil hutan, beternak babi, menanam padi dan menangkap ikan dengan cara yang sangat sederhana. Di bidang pertanian, mereka menanam padi, jagung, kacang, ketela dan buah-buahan untuk kebutuhan makanan sendiri, tetapi setelah mereka menemukan cara-cara dalam melakukan pertanian, maka penggarapan lahan untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok menjadi berkurang dan pertanian lebih diutamakan untuk tanaman-tanaman yang laku di pasaran, dengan demikian mereka sudah ada orientasi ke arah pasar (Vleming, 1926: 254). Dengan adanya perubahan dalam sistem penanaman tersebut, maka penduduk asli Kalimantan Barat mulai berorientasi pada tanaman-tanaman, seperti: kelapa sawit, karet, lada dan lain sebagainya.

Kalimantan Barat mempunyai kekayaan alam yang melimpah-limpah. Dari hutan-hutan tradisional di Kalimantan Barat menghasilkan barang-barang komoditi, berupa: lilin lebah, kapur barus, kayu kemenyan dan madu yang sangat laku di pasaran, begitu juga kekayaan alam yang lain, seperti: sarang burung dan hasil-hasil dari laut. Barang-barang dari hasil pertambangan, meliputi: emas, platinum, intan dan batubara dalam jumlah yang besar. Di lain pihak, daerah Kalimantan Barat sendiri tidak menghasilkan barang-barang konsumsi yang cukup untuk keperluan penduduknya, seperti: beras, gula, minyak bakar, tekstil dan lain-lain, sehingga Kalimantan Barat harus mendatangkan barang-barang tersebut dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Barang-barang komoditi dari Kalimantan Barat, seperti: kopra, karet, lada dan hasil-hasil hutan itu diekspor ke Singapura, Hongkong, Belanda, Amerika Serikat, Jepang dan lain-lain melalui pelabuhan Pontianak, dimana barang-barang komoditi tersebut merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan di negara-negara tersebut, sehingga sangat laku keras, sedangkan kapal-kapal dagang yang datang di pelabuhan Pontianak ini membawa barang-barang konsumsi, pakaian, alat-alat rumah tangga dan lain-lain yang juga merupakan barang-barang yang menjadi kebutuhan penduduk Kalimantan Barat (Alqadrie, 1984: 60). Dengan kata lain bahwa pedagang-pedagang asing yang datang ke pelabuhan Pontianak ini membawa sutera dan porselin dan sebaliknya dari Pontianak ini, para pedagang itu membawa hasil rempah-rempah, kayu berharga dan kapur barus. Perdagangan rempah-rempah ini disebut dengan perdagangan primer, sedangkan perdagangan yang kedua lazim dinamakan perdagangan sekunder atau *haalhandel* (Kartodirjo, 1993: 7).

Tanaman kelapa sawit dan lada merupakan jenis tanaman perkebunan yang tergolong tua. Tanaman ini biasanya diusahakan di daerah tepi pantai, sedangkan tanaman lada diusahakan di daerah hulu. Pontianak sendiri tidak banyak menghasilkan tanaman kelapa sawit dan lada, tanaman ini

banyak diusahakan di daerah luar kota sehingga Pontianak hanya merupakan pelabuhan untuk mengekspornya (Alqadrie, 1984: 55).

Pada masa itu dianut sistem perdagangan terbuka dan bebas. Maksud dari perdagangan terbuka adalah pedagang-pedagang Asia dan pedagang-pedagang Indonesia itu bersifat komplementer, artinya bahwa keduanya mempunyai hubungan yang erat dan saling ketergantungan antara perdagangan rempah-rempah, bahan makanan dan komoditi-komoditi yang lain, sedangkan perdagangan bebas yaitu penduduk bebas menjual barang-barang hasil produksi kepada negara-negara lain, tetapi karena Malaya, Singapura dan Hongkong jaraknya lebih dekat dan harga produksi Kalimantan Barat di pasaran itu lebih baik, maka banyak barang-barang produksi di Kalimantan Barat yang diperdagangkan di negara tersebut (Alqadrie, 1984: 60-61). Dengan sistem perdagangan terbuka dan sistem perdagangan bebas, menyebabkan pasar semakin ramai sehingga memungkinkan peningkatan kebudayaan bagi penduduk ramai sehingga memungkinkan peningkatan kebudayaan bagi penduduk karena menerima unsur-unsur baru dari luar (Lapian, 1997: 144).

Perkembangan baru terjadi sejalan dengan berkembangnya Singapura sebagai pelabuhan bebas sejak tahun 1819, Singapura bukan saja bertindak sebagai "besi berani" yang menarik sebagian besar perdagangan di Pontianak, tetapi juga bertindak sebagai katalisator yang memacu perkembangan dalam perdagangan. Oleh karena itu, Belanda melakukan usaha untuk membatasi perdagangan dengan Singapura yaitu dengan jalan dijadikannya pelabuhan Pontianak pada tahun 1834 sebagai pelabuhan bebas saingan. Upaya ini dilakukan dalam rangka kampanye untuk menarik sebagian perdagangan dari pelabuhan Singapura. Meskipun pelabuhan Pontianak sudah menjadi pelabuhan bebas saingan, namun tidak mampu mengalihkan perdagangan dari Singapura, melainkan hanya sekedar merupakan "pos-pos depan" saja (Booth, 1998: 407).

Namun demikian, sejalan dengan makin kuatnya armada pelayaran Belanda dalam menghadapi saingan Inggris yaitu dengan hadirnya berbagai perusahaan pelayaran, seperti: Cores de Vries, KPM, Hotterdam Lyoid, SMN dan sebagainya, maka pembukaan pelabuhan bebas dalam rangka untuk menyaingi Singapura menjadi tidak bergairah lagi dan bahkan terhenti sama sekali, maka pemerintah Kolonial Belanda mengadakan upaya lagi yaitu dengan membuka pelabuhan Pontianak untuk perdagangan umum (ekspor-impor), dengan demikian tarif diferensial dihapuskan dan diganti dengan pajak ekspor-impor yang didasarkan pada jenis barang yang diperdagangkan. Perkembangan seperti ini memberikan iklim yang kondusif bagi perkembangan pelayaran dan perdagangan baik internasional maupun domestik (Sulistiyon, 1997: 212).

Para pengeksportir dari Singapura khususnya, melakukan hubungan dengan para tengkulak dalam memperoleh barang yang mereka butuhkan, dengan menentukan harga yang tinggi di Pontianak sesuai dengan hasil produksi di Singapura, sedangkan para pengimpor pulang kembali dengan mengisi kapal-kapal mereka dengan barang-barang hasil produksi dari negara itu. Para importir itu sebagian dibayar bila ada barang, sehingga keuntungan sangat sulit didapatkan.

Mengenai perdagangan di Kalimantan Barat pada umumnya dan di Pontianak pada khususnya, tidak bisa dipisahkan mengenai peran dari peanggang-pedagang Cina yang pada akhirnya pedagang-pedagang Cina ini mendominasi perdagangan di Pontianak yang diawali dengan kedatangan Cina di Kalimantan Barat pada abad ke-17. Kedatangan mereka di Kalimantan Barat ini menempuh dua jalur: jalur pertama melalui Indocina terus ke Malaya dan menyebar ke pantai Kalimantan Barat, terutama Sambas dan Mempawah, sedangkan jalur yang kedua melalui Kalimantan Utara menuju ke daerah Paloh dan Sambas, dari Sambas ini mereka menuju ke daerah pedalaman dan Mempawah Hulu untuk menemukan tambang emas (Lontaan, 1975 : 247).

Kedatangan orang-orang Cina di Kalimantan Barat ini diakibatkan adanya tekanan sosial ekonomi di negara asalnya. Mereka kemudian melakukan perantauan sebagai buruh dan pekerja-pekerja miskin dengan tujuan utamanya adalah mencari kekayaan sebagai bekal hidup dan bukan untuk menetap di Kalimantan Barat. Dengan ditemukannya tambang emas di Kalimantan Barat, maka didatangkanlah buruh-buruh Cina untuk menggali dan mengolah emas tersebut, secara otomatis orang-orang Cina ini mendiami daerah pertambangan emas di Kalimantan Barat terutama di daerah Mandor, Budog dan Monterado. Dari hasil galian emas tersebut, sebagian diberikan kepada buruh-buruh Cina sebagai upah, akibatnya terjadi arus balik buruh-buruh Cina ke Tiongkok dengan membawa emas yang cukup lumayan, sehingga sangat menarik perhatian orang-orang Cina untuk datang ke Kalimantan Barat (Syafei, 1989-1990: 21), bahkan banyak dari mereka yang kemudian melakukan perkawinan campuran dengan penduduk asli Kalimantan Barat, antara laki-laki Cina dengan wanita-wanita Dayak, sehingga terjadilah percampuran darah dan keturunan mereka mengaku dirinya sebagai orang Cina (Purcell, 1965: 20).

Imigran besar-besaran dari Cina ke Kerajaan Sambas dan Mempawah pada tahun 1745 dengan waktu tinggal yang relatif lama, menyebabkan mereka membentuk kongsi-kongsi atau koloni-koloni (semacam perkampungan), seperti: Tai Kong, Samto Kiaw, Few Sjun (gabungan dari Tai Kong dan Samto Kiaw, Lo Fong dan lain-lain dengan nama "Republik Pertama Cina di perantauan" yang berpusat di Monterado dan Budog (termasuk dalam wilayah Kerajaan Sambas) dan Mandor (termasuk dalam wilayah Kerajaan Mempawah) (Lontaan, 1975 : 245) dan di dalam kongsi-kongsi tersebut, mereka mengatur kehidupan sosialnya sendiri, termasuk mengatur pemerintahan sendiri dengan peraturan-peraturan yang berupa hukum dalam kongsi-kongsi tersebut (Syafei, 1989-1990: 20). Terbentuknya kongsi-kongsi Cina tersebut, diakibatkan oleh keuntungan yang diperoleh dari perkebunan lada dan pertambangan emas (Soedarto dkk., 1978/1979: 8).

Pada tahun 1745, Sultan Sambas dan Mempawah secara sengaja mendatangkan orang-orang Cina untuk dipekerjakan secara paksa di pertambangan-pertambangan emas dalam wilayah kekuasaan mereka, kira-kira ada 300 orang Cina sebagai kuli yang dipekerjakan untuk setiap pertambangan emas dan setiap kuli ini mendapat upah sebesar f. 4 sebulan, akibat adanya perlakuan yang tidak baik dari para Sultan, maka pada tahun 1760 orang-orang Cina ini melakukan aksi pemberontakan terhadap Sultan Sambas dan Mempawah, akhirnya orang-orang Cina tidak lagi menjadi kuli di pertambangan emas tersebut, tetapi mereka malah berhasil mengambi-alih seluruh pengelolaan dan pengerjaan tambang-tambang emas menjadi milik sendiri. Dengan dikuasainya tambang-tambang emas oleh kongsi Cina, maka orang-orang Cina memiliki kehidupan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan dengan kehidupan suku Melayu dan suku Dayak yang rata-rata. Dalam kondisi seperti itu, kongsi Cina ini menjadi berani menentang kekuasaan kepala-kepala suku Melayu dan suku Dayak sebagai suku-suku pribumi, sehingga berkobarlah peperangan untuk melawan kongsi Cina di Monterado dan Mandor. Dalam peperangan itu kepala suku Dayak di dua daerah tersebut terbunuh, sehingga Sultan Sambas yaitu Sultan Tadjuddin I mengambil keputusan dengan mewajibkan kepada kongsi Cina supaya tunduk kepada Sultan dengan cara setiap bulan membayar upeti kepada Sultan dan mereka diberikan kewenangan untuk mengatur pemukimannya. Akibatnya dari kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Sultan tersebut, maka orang-orang Dayak secara otomatis harus tunduk dibawah pemerintahan orang-orang Cina perkongsian, sehingga mereka pindah ke pemukiman lain yang dianggap aman dari tindakan-tindakan perlakuan orang-orang Cina (La Ode 1997 : 109).

Di antara kongsi-kongsi tersebut yang terpenting adalah kongsi Lo Fong yang berpusat di Mandor, Lo Fong ini kemudian membangun Mandor menjadi pusat pemukiman dan perdagangan dan ia mengangkat dirinya sendiri sebagai *Tai Po* (pemimpin besar), tetapi setelah pertambangan emas dianggap

tidak lagi memberikan hasil bagi mereka, maka orang-orang Cina ini mengalihkan usahanya di bidang pertanian dan perdagangan di Pontianak.

Di bidang pertanian, mereka mulai menggarap tanah pedalaman untuk mengeksploitasi semua daerah, bahkan orang-orang Cina ini menguasai hasil produksi. Mereka mengusahakan tanah untuk tanaman-tanaman, seperti: kopi, nila, gula, teh, kopra, karet, tembakau, minyak kelapa dan lain-lain.

Deskripsi ini menggambarkan keunggulan dari bangsa Cina, dimana setiap tahun jung-jung milik Cina datang untuk berdagang dan mereka membawa sekitar 1200-1300 orang-orang Cina untuk melakukan pekerjaan yang sulit terutama di bidang pertanian.

Pada tahun 1795, Lo Fong meninggal dunia, sehingga wilayah kekuasaannya terpecah belah. Namun selama berkuasa ia mengirim upeti tiap tahun kepada Kaisar Cina di Daratan Cina. Hal ini membuktikan bahwa Lo Fong ini tidak tunduk kepada Sultan, baik Sultan Mempawah maupun Sultan Pontianak.

Di dalam melakukan kegiatan perdagangan orang-orang Cina ini menjalin hubungan yang erat dengan pedagang-pedagang di Asia, seperti: Malaya, Singapura, Hongkong, Makao dan lain-lain yang merupakan kota-kota dagang internasional, dengan adanya jalin kerjasama tersebut menyebabkan Cina mempunyai banyak pengalaman di bidang perdagangan, sehingga pedagang Cina ini mendominasi perdagangan di Pontianak. Mengenai barang-barang Cina di Kalimantan ini, diperoleh dari St. John:

These jars were principal commodity in the Chinese trade with Borneo and other islands. This trade may have been of the "silent" variety, when Chinese junks, laden with silk, beads, iron, copper pots, and many kinds of jars arrived off the coast and made their presence know by beating on gongs. The mosth valuable, the Gusi, was a green colour,

about 18 inches in height and was, from its medicinal properties, exceedingly sought after. One fetched at tawaran the price of f. 400 to be paid in produce (Purcell, 1965: 21).

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, disebutkan bahwa: barang-barang komoditi Cina yang pokok adalah guci, sutera, manik-manik, besi, panci-panci tembaga, dan lain-lain. Barang-barang tersebut merupakan barang-barang mewah dan mempunyai harga jual yang tinggi. Menurut St. John, di antara barang-barang itu yang paling berharga adalah guci, dengan warna hijau dan tingginya kira-kira 18 inchi, sebuah tawaran mencapai f. 400 dengan hiasan naga-naga orang Cina (Purcell, 1965: 21)

Selain pedagang-pedagang Cina, pedagang-pedagang Asing mempunyai peran yang sangat penting. Kedatangan mereka disebabkan karena putusnya hubungan perdagangan antara Cina, Malaysia dan Kalimantan (Purcell, 1965: 22). Khususnya pedagang Arab dan Belanda telah mempunyai pioner yang menjadi penguasa di Pontianak (Alqadrie, 1984: 62). Pedagang Arab ada yang memperoleh kewibawaan sebagai Syarif yang bisa mempengaruhi di kalangan istana raja-raja. Sebagai orang yang dihormati, pengaruh mereka jauh melampau bidang ekonomi dan agama (Kartodirdjo, 1993: 283).

Sejarah Cina di Indonesia ini dilaporkan sampai datangnya orang-orang Eropa, yaitu bangsa Protugis (1518), menyusul bangsa Belanda (1595) dan Inggris (1612). Kedatangan Belanda di Kalimantan Barat, bertujuan untuk menertibkan kongsi-kongsi yang tidak mau mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dengan serikat dagangnya VOC, karena merasa terdesak, maka orang-orang Cina di Kalimantan Barat ini melakukan pemberontakan terhadap Belanda pada tahun 1850-1854. Dalam pemberontakan itu, Cina mengalami kekalahan sehingga bentuk-bentuk kongsi dihapuskan di mandor (Djuweng, 1996: 24). Dengan dihapuskannya kongsi-kongsi tersebut menyebabkan kebencian Cina terhadap Belanda mendalam yang akhirnya kembali timbul gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Cina yang tergabung dalam Partai Suku Dayak.

Adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang Cina dalam melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda di beberapa tempat di wilayah Kalimantan Barat, serta masalah-masalah lain yang dihadapi oleh Belanda, maka pemerintah Belanda membuat peraturan-peraturan yang mengatur orang-orang Cina baik yang bernilai membatasi maupun memanfaatkan kemampuan dari orang-orang Cina yang berlaku di Kalimantan Barat, antara lain:

1. Menetapkan pemukiman Cina khusus secara murni
2. Memberikan status golongan Cina sebagai pegawai pemerintah Belanda yang sederajat
3. Memberi kesempatan naturalisasi kepada orang-orang Cina menjadi kawula kerajaan Belanda
4. Mendudukkan orang-orang Cina sebagai golongan menengah
5. Mengawetkan kebudayaan dan identitas Cina dengan membentuk sekolah-sekolah khusus untuk Cina dan organisasi-organisasi masyarakat Cina
6. Menggunakan orang-orang Cina untuk membantu mempertahankan kekuasaan Belanda di Kalimantan Barat.

Peraturan pemerintah Belanda itu secara berangsur-angsur menghapus larangan-larangan terhadap orang-orang Cina, kemudian orang-orang Cina ini dijadikan sebagai alat oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk menjalankan monopolinya (Syafei, 1989-1900 : 22).

Pemerintah Belanda mengangkat seorang dari penduduk Cina sebagai pimpinan mereka dengan pangkat *Majjor* (sebagai pangkat tertinggi), *Kapitein*, *Luitenant* dan *Wijkmeester* (kalau zaman sekarang sama dengan ketua RW) yang bertugas sebagai perantara untuk menghubungkan antara orang-orang Cina terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi dalam pemerintahan Belanda. Kelompok Cina

ini merupakan terbesar di antara orang-orang timur asing lainnya dan menempati kedudukan menengah di antara golongan pribumi dan pemerintah Belanda, hal itu disebabkan karena adanya kepentingan dalam bidang ekonomi (La Ode, 1997: 107), namun dalam kenyataannya, orang-orang Cina dijadikan sebagai pedagang perantara antara penduduk pribumi dengan Belanda, karena jasa-jasanya kepada Belanda, maka orang-orang Cina ini menempati status yang lebih tinggi daripada penduduk pribumi. Kondisi yang baik dari kedudukan orang-orang Cina yang diberikan pemerintah Kolonial Belanda menempatkan mereka lebih mampu dalam menyusun kehidupannya (Effendi, 1982: 26). Sejak itu orang-orang Cina menjadi partner dalam usaha perdagangan Belanda. Situasi itu menyebabkan kedatangan orang-orang Cina makin bertambah, karena adanya fasilitas-fasilitas dan kelonggaran-kelonggaran dari pemerintah Belanda kepada orang-orang Cina. Orang-orang Cina diberikan hak untuk menarik pajak dari rakyat, sehingga mempunyai kesempatan untuk menjalankan pemerasan terhadap rakyat, kemudian orang-orang Cina ini makin kuat setelah mereka diberikan kedudukan hukum yang setaraf dengan orang-orang Belanda, kecuali dalam tindakan kriminal yang disamakan dengan kedudukan hukum pribumi (Hidayat, 1984: 79).

Menurut laporan Gubernur Borneo tanggal 11 November 1818, dikatakan bahwa Gubernur Borneo menyampaikan surat kontrak yang telah disahkan kepada raja-raja dan untuk memberitahukan kewajiban dan hubungan mereka dengan pemerintah Belanda (Effendi, 1982: 14), sehingga sejak saat itu mulai berkibarnya bendera Belanda di Pontianak. Belanda melakukan perluasan wilayah, sehingga pada tahun 1819 kedua belas kerajaan yang berada di Kalimantan Barat berada dibawah kekuasaan Belanda (berdasarkan laporan tanggal 11 November 1818), sehingga sejak itu semua kerajaan harus taat kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Belanda (Mirza dkk., 1997-1998: 2).

Pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda, perkebunan mendapatkan tempat yang utama dengan mengembangkan

berbagai jenis tanaman, seperti: karet, kelapa sawit, kakao, cengkeh dan lada yang merupakan barang komoditi yang sangat laku di pasaran internasional.

Para pedagang Belanda ini mendirikan perusahaan ekspor dan impor dalam bentuk “firma” dalam melakukan penjualan dan pembelian barang-barang hasil produksi di Pontianak (Vleming, 1926: 260). Akibat banyaknya firma yang didirikan oleh pemerintahan Belanda, maka pada bulan Maret 1602 perseroan-perseroan itu bergabung dalam satu bentuk yaitu *verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) dengan tujuan untuk menguasai perdagangan di Indonesia pada umumnya dan di Pontianak pada khususnya.

Kerajaan Pontianak, khususnya pada masa pemerintahan Syarif Abdurrahman dilakukan perluasan wilayah, yang pertama menjadi incaran adalah Sanggau. Raja Sanggau pada waktu itu menjadi vasal Banten, sehingga ia meminta perlindungan ke Banten, tetapi Banten tidak mampu lagi untuk melindungi daerah yang berada dibawahnya termasuk Landak, Sukadana dan seluruh wilayah di Kalimantan Barat, sehingga pada tanggal 26 Maret 1778, Sultan Banten menyerahkan supremasi Banten atas daerah-daerah tersebut kepada VOC (Kartodirdjo, 1993: 284).

Menyadari akan kekuasaan VOC itu, maka Sultan Syarif Abdurrahman pada tanggal 5 Juli 1779 mengadakan perjanjian dengan VOC dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang diatur dalam *lange contack* maupun *corte verklaring*. Ia diakui sebagai Sultan Pontianak dan Sanggau dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al Habib Husin Alqadrie, sedangkan VOC berhak atas sebagian besar pendapatan kerajaan, hak monopoli atas daerah itu, seperti: berlian, emas, lada, karet, lilin lebah, rotan, sago dan sarang burung.

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian itu, maka:

1. Sultan Syarif Abdurrahman mengakui berlakunya mata uang Belanda di wilayah Kerajaan Pontianak, sama nilainya

dengan semua uang yang berlaku di Betawi. Ini berarti bahwa alat pembayaran lain, seperti ringgit dan dolar dapat diterima di wilayah kerajaan Pontianak, sehingga dengan alat-alat pembayaran ini, maka sistem perdagangan internasional dengan mudah dapat berkembang.

2. Semua hasil kekayaan alam dari Pontianak, baik dari hasil pertambangan dan perkebunan, seperti: intan, lada dan juga hasil hutan yang berupa lilin lebah, kapur barus, kayu kemenyan dan madu dimonopoli oleh VOC, sebaliknya barang-barang yang dibutuhkan oleh kerajaan, seperti beras dan garam dijual oleh VOC kepada Sultan dengan harga yang tinggi.
3. Kapal-kapal asing yang tidak mendapat izin dari VOC tidak diperbolehkan memasuki perairan Kalimantan Barat, antara lain kapal-kapal dari Eropa, Cina dan Johor (Alqadrie, 1994)

Akibat dari perjanjian yang dilakukan antara gubernemen dengan Raja, maka rakyatlah yang menderita, sebab rakyat diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah Belanda. Untuk mengurus masalah pajak itu, maka pemerintah Belanda mengangkat petugas-petugas pajak atau biasa disebut dengan istilah (tukang cukai" (Effendi, 1982: 16). Tukang cukai itu bertugas mengumpulkan pajak-pajak yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada tukang kontrol. Akibat dari pajak-pajak yang dibebankan kepada rakyat tersebut, menyebabkan rakyat tidak puas, maka terjadilah pergolakan, tetapi karena sifat dari pergerakan itu tidak tersusun dalam organisasi, maka dapat dipatahkan oleh Belanda. Pada peralihan abad ke-19 ke abad 20 hegemoni Belanda terhadap Kalimantan Barat semakin kuat. Kerajaan-kerajaan dan daerah-aderah swapraja di tepi pantai serta di sepanjang sungai, seperti: kerajaan Pontianak, Sambas, Mempawah, Sanggau, Tayan, Kubu, Landak, Sekadau, Sintang, Sukadana dan Simpang terpaksa mengakui kekuasaan Hindia Belanda (Effendi, 1982 : 16).

Kekuasaan dan wewenang VOC semakin bertambah dengan adanya persaingan dan pertentangan di antara kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat, seperti konflik antara mempawah dengan Sambas mengenai daerah perbatasan, konflik antara Pontianak dengan Sukadana mengenai mengalirnya hasil dari daerah hulu Sungai Kapuas ke Sukadana merugikan Pontianak. Konflik-konflik itu selalu mengundang ikut campurnya pihak VOC, sehingga menyebabkan tingkat integritas melampaui lokalitas (Kartodirdjo, 1993 : 285).

Akibat dikuasainya pelabuhan Makassar oleh VOC memengaruhi terhadap kegiatan perdagangan di kawasan timur Indonesia. VOC tidak berkeinginan untuk mempertahankan kedudukan Makassar sebagai pelabuhan transito internasional, melainkan hanya menjadikan sebagai pos pengamanan untuk kepentingan monopoli rempah-rempah di Maluku. Akibatnya para pedagang meninggalkan Makassar dan mencari koloni dagang di kawasan Kalimantan dan Melayu. Di antara pedagang-pedagang itu yaitu, Bugis, Makassar, Melayu, Jawa, Ternate, Tidore, dan lain-lain, maka pedagang Bugislah yang masih tampak ada dalam kegiatan perdagangan niaga, sehingga pada masa perdagangan VOC, pedagang Bugis ini dikenal sebagai pedagang penyelundup dan melakukan perdagangan liar (Poelinggomang, 1997: 148-149).

Keberadaan pedagang Bugis ini tidak hanya mampu membuka daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia yang sebelum abad ke-19 terisolasi dari dunia niaga maritim, tetapi juga merupakan partner niaga yang baik dari Inggris dalam membangun Singapura dan memaksa pihak Belanda untuk meninggalkan kebijaksanaan monopolinya (Poelinggomang, 1997: 151).

4.2 Agama dan Politik

Di lihat dari sudut antropologi budaya, daerah-daerah pedalaman di Kalimantan Barat belum banyak mengalami percampuran jenis-jenis bangsa dan budaya dari luar, seperti:

Arab, Persia, Gujarat dan Eropa. Struktur sosial ekonomi dan budayanya agak statis bila dibandingkan dengan suku bangsa yang mendiami daerah pesisir yang menunjukkan ciri-ciri fisik dan sosial budaya yang lebih berkembang disebabkan oleh adanya percampuran dengan bangsa dan budaya dari luar (Poesponegoro, 1984: 173).

Membahas masalah agama atau religi tidak bisa dipisahkan mengenai masalah sistem budaya, karena agama atau religi ini termasuk dalam salah satu unsur dari sistem budaya. Penduduk Kalimantan Barat mempunyai susunan masyarakat yang kompleks akibat masuknya bangsa-bangsa pelaut secara beruntun dengan asal dan kebudayaan yang beraneka ragam. Masuknya bangsa-bangsa pelaut itu menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat besar dalam masyarakat Kalimantan Barat melalui jalinan hubungan yang erat di antara keduanya.

Penduduk Kalimantan Barat dilihat dari susunan masyarakatnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Rakyat pribumi "sejati", terdiri dari orang-orang Dayak yang mempunyai kepercayaan animisme. Kepercayaan orang-orang Dayak pedalaman ini begitu kuat pada unsur-unsur magis, sehingga didalam kehidupan mereka hampir seluruhnya dikuasai oleh dewa-dewa, dengan dewa tertinggi jubate atau jubata (Kendayan), sangiang (Kayan), Batara (Iban) dan Amungtingai (Punan) (Effendi, 1982: 18).
2. Orang Melayu yang menganut agama Islam atau sering disebut dengan muslim.

Istilah Dayak merupakan nama yang agak merendahkan, yang diberikan oleh penduduk pantai kepada penduduk perbukitan atau oleh orang muslim kepada yang bukan muslim. Suku Dayak yang merupakan penduduk asli Kalimantan Barat ini mempunyai kepercayaan animisme. Mereka percaya kepada mitos-mitos. Menurut kepercayaan suku Dayak, alam semesta terbagi menjadi dua bagian, yaitu: alas atas untuk dewata dan alam bawah untuk manusia. Dalam melakukan hubungan

antara manusia dengan dewata adalah dengan melakukan upacara-upacara dengan menggunakan sajian, maksudnya supaya diberikan kekuatan dan kemakmuran. Jadi sebelum masuknya pengaruh-pengaruh dari luar, masyarakat sudah memiliki unsur-unsur budaya yang mengatur kehidupan mereka, baik dalam bertingkah laku, berpikir, berbuat, bekerja maupun dalam kehidupan kebudayaan, sehingga sistem budaya ini disebut dengan sistem budaya etnik, namun sebetulnya suku Dayak ini adalah penganut agama Hindu yang berada dibawah naungan kerajaan-kerajaan Hindu di Pesisir Kalimantan. Dalam perkembangannya suku Dayak ini kemudian memeluk agama Islam, sehingga mereka tidak lagi menyebut dirinya orang-orang Dayak tetapi menjadi orang Melayu, demikian pula bahasa yang digunakan bukan lagi bahasa Dayak, melainkan menggunakan bahasa Melayu, sehingga pada akhirnya mereka melepaskan identitasnya sebagai orang Dayak dan dikategorikan sebagai orang Melayu. Orang Dayak yang sudah masuk Islam ini menyangkal leluhurnya sebagai orang Dayak dan mengokohkan dirinya sebagai Melayu Sejati, sehingga dengan menjadi orang Melayu, mereka sudah memperoleh mobilisasi sosial yaitu dari status sosial yang rendah meningkat menjadi orang Melayu (La Ode, 1997: 22-23). Jadi sebenarnya di antara orang-orang Melayu ini banyak terdapat orang-orang Dayak. Keterangan ini dapat memberikan gambaran bahwa penduduk yang asalnya serumpun itu bisa menjadi berbeda dikarenakan agama dan bahasa baru yang diikuti dan dianutnya. (Mubyarto, 1992: 29).

Kedatangan pelaut-pelaut Arab, Persia dan Gujarat di Kalimantan Barat telah memperlihatkan kepada penduduk setempat mengenai tradisi besar yaitu agama Islam. Menurut catatan atau cerita rakyat yang ada di wilayah Kalimantan Barat, diperoleh suatu kesimpulan bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan Barat pada umumnya lahir dan tumbuh pada abad ke-16-17 (catatan dari Sdr. Ibrahim Badjuri, tanggal 5 Januari 1958). Agama Islam masuk ke Kalimantan Barat adalah dari utara yaitu dari Johor dan Bintan, kemudian dari Brunei melalui aliran Sungai Sambas dan berpusat di Kerajaan

Sambas. Dari Sambas inilah kemudian Islam menyebar ke Singkawang, Mempawah, Pontianak, menyusuri Sungai Kapuas sampai ke Sungai Landak dan masuk ke Tayan, Sanggau, Sintang, Nanga Pinoh dan akhirnya ke Putussibau. Dari Pontianak, agama Islam berkembang ke daerah Ngabang/Landak dan Islam yang tersebar di Mempawah kemudian menyebar ke Kubu, Tayan dan daerah sekitarnya. Di daerah Ketapang, Islam masuk dari Palembang kemudian menyusuri Sungai Pawan menyebar ke sekitarnya dan terus menuju ke pedalaman sebelah utara ke arah Sanggau dan Sintang, juga di daerah Sukadana dan Teluk Melano (Effendi, 1982: 9), namun mengenai kapan agama Islam masuk ke Pontianak tidak ada keterangan yang lebih jelas.

Ada satu keterangan yang dapat digunakan sebagai bukti mengenai masuknya Islam di Pontianak. Kerajaan Pontianak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman pada tahun 1771. Ia merupakan seorang pelaut dari Bugis dan merupakan keturunan Arab yang bernama Sayyid Abdurrahman Alqadrie. Pada masa pemerintahannya, ia memerintahkan supaya bentuk-bentuk makam yang pada umumnya nisannya terbuat dari kayu itu menunjukkan corak Bugis Makassar dari abad ke-17 (Ambary, 1997: 25). Bukti tersebut menjelaskan bahwa kerajaan Pontianak merupakan kerajaan yang bercorak Islam yang kemudian lebih dikenal dengan nama Keraton Kadriah dan di kompleks keraton tersebut pada tahun 1772 telah berdiri sebuah masjid yaitu Masjid Jami'. Jadi pada saat bangsa-bangsa pelaut dari Arab, Persia dan Gujarat itu masuk ke Pontianak, di Pontianak sendiri Islam sudah dianut oleh penduduk setempat dalam hal ini adalah suku Melayu, sehingga kondisi seperti ini memudahkan proses Islamisasi karena adanya kesamaan usur kepercayaan yaitu agama Islam.

Proses Islamisasi di Pontianak ini dilakukan dengan jalan damai tanpa ekspedisi militer yaitu melalui jalur perdagangan, perkawinan dengan elite birokrasi dan ekonomi serta sosialisasi langsung pada masyarakat bawah, sedangkan di daerah pedalaman, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara

perkawinan yaitu antara keluarga raja yang telah memeluk agama Islam dengan keluarga raja yang masih menganut kepercayaan lamanya, dengan penaklukan ataupun dengan jalan dakwah yang dilakukan oleh pedagang-pedagang atau ulama-ulama, sehingga secara berangsur dapat mengislamkan daerah-daerah di sepanjang sungai besar, khususnya Sungai Kapuas. Tentang bagaimana cara pengajaran dan pendidikan Islam di kalangan suku-suku Dayak di pedalaman ini tidak diketahui dengan pasti, namun yang jelas orang-orang Dayak ini lebih terbelakang dibandingkan dengan Suku Melayu ataupun penduduk pendatang lain dilihat dari peranan mereka dalam pemerintahan dan politik.

Perkembangan Islam yang sangat merakyat ini, mempunyai peranan yang sangat besar yaitu kerajaan Pontianak sebagai pusat pengembangan agama Islam, sehingga sistem budaya yang terdahulu begitu nampak. Ada satu fenomena yang sangat menarik, bahwa fase awal penyebaran Islam yaitu abad ke-1 H sampai dengan abad ke-5 N, Islam berkembang dengan kekuasaan para musafir Arab, Persia dan Gujarat dan di antaranya terdapat para sufi, mulai pada abad ke-14 agama Islam itu disebarkan dan dikembangkan oleh para ulama dengan cara ukhuwwah Islamiah (Ambariy, 1997: 26).

Masuk dan berkembangnya agama Islam di Pontianak ini menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, antara lain:

1. Di Bidang Pendidikan

Agama Islam yang semula pengajarannya dibatasi hanya di lingkungan istana raja, setelah raja dan keluarganya memeluk agama Islam, maka pejabat-pejabat kerajaan dan penduduk mulai mengikuti apa yang dilakukan oleh raja, yaitu mereka mulai mempelajari agama Islam (Kodam XII Tanjungpura: 35), sehingga di dalam masyarakat yang tradisional itu unsur-unsur atau nilai-nilai kharismatik sangat dijunjung tinggi. Jadi hubungan antara raja, ulama dan penduduk menjadi sangat serasi (Effendi, 1982: 10). Oleh karena itu, ulama-ulama yang

tadinya membatasi pengajaran agama Islam pada lingkungan istana, kemudian ulama-ulama itu mengajarkan agama Islam di rumah-rumah penduduk, sehingga tempat tinggal penduduk menjadi semacam madrasah atau pusat pengajaran

2. Di Bidang Kesenian

Kesenian yang bernafaskan Islam mulai dikenal oleh penduduk yang mulai memeluk agama Islam, seperti:

- Membaca “barzanji”, yaitu membaca salawat dengan iringan rebana (hadrah) dan kemudian “radat” (sejenis tarian) dan “zapin” (jepin), merupakan perwujudan seni yang mempunyai unsur keagamaan.
- Menenun, merupakan salah satu bentuk hasil karya seni dari Suku Melayu yang berdiam di daerah pantai maupun suku Dayak di pedalaman, perbedaannya terletak pada bahan yang ditenun dan corak atau motif tenunan. Di kalangan suku Dayak, Bahan yang ditenun terutama adalah serat-serat tanaman atau kulit kayu dengan motif-motif tenunan tradisional yang mengandung unsur magis.
- Simbol keislaman dari kerajaan Pontianak ini biasa dilihat dari bentuk Masjid Jami’ yang didirikan di kompleks Keraton Kadriah. Masjid ini mempunyai bentuk arsitektur yang meniru gaya arsitektur masjid-masjid Jami’ tua di Jawa dengan mustaka di atas. Di majid ini, ditempatkan tabuh (bedug) sebagai alat untuk memberitahukan bahwa waktu shalat sudah tiba. Tabuh ini jelas berasal dari luar daerah dan penggunaan tabuh ini sebagai akibat masuknya pengaruh-pengaruh Jawa dan Melayu.
- Mohor atau cap kerajaan bertuliskan huruf-huruf Arab adalah huruf-huruf resmi agama Islam.
- Nama-nama Islam mulai dipergunakan disamping juga adanya usaha untuk menghitung penanggalan dengan tarikh Hijriah.

- Perayaan sehabis panen (gawai) di daerah-daerah yang telah menganut agama Islam berubah menjadi perayaan hari-hari keagamaan Islam.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa motif kedatangan bangsa-bangsa Eropa salah satunya adalah agama. Pengaruh barat ini masuk melalui pendidikan maupun melalui kegiatan penyebaran agama Kristen/Katholik yang dilakukan oleh misi Katholik. Salah satu sasaran penyebaran agama adalah penduduk Cina. Para penyebar agama dan rohaniwan katholik yang mendapat kesempatan bekerja untuk menyebarkan agama telah berhasil mendirikan paroki-paarki pertama. Pada tahun 1905, mereka mendirikan paroki Katholik pertama di Singkawang, tahun 1907 di Pemangkat dan pada tahun 1909 di Pontianak, sedang pada tahun 1913 di Sambar (Soedarto, 1978-1979: 19). Di samping mendirikan paroki-paarki, mereka juga mendirikan sekolah-sekolah di Pontianak, antara lain: *volkschool* (sekolah rakyat), *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) yaitu Sekolah Rakyat Sempurna untuk anak-anak Indonesia dari golongan elite dan *Hollandsch Chineesche School* (HCS) yaitu sekolah khusus untuk golongan Cina.

Agak berbeda dengan agama Kristen Katholik yang sudah mulai memperoleh tempat berpijak di kalangan masyarakat Kalimantan Barat sejak akhir abad ke-19, agama Kristen Protestan masuk belakangan. Gereja protestan yang pertamanya berdiri di Kalimantan Barat adalah gereja *Gereformeerd* (*Gereformeerde Kerk*) di Pontianak. Jemaah dari gereja ini terutama terdiri dari orang-orang Belanda dan orang-orang Indonesia dari suku Ambon dan Manado.

Hubungan antara perdagangan, agama dan politik terjalin dengan erat terutama pada masa bangsa Eropa mula memasuki wilayah Nusantara. Pada masa antara tahun 1800-1816, tidak ada perubahan sistem pemerintahan yang berarti, sistem dagang tetap dipertahankan dengan penyerahan paksa dan cara eksploitasi yang membuat daerah jajahan produktif.

Politik Asosiasi yang dijalankan oleh pemerintah Kolonial Belanda mengalami kegagalan karena mengabaikan kontak-kontak akar-akar rohani dari budaya-budaya yang saling berhadapan, budaya Barat hanya diterima secara dangkal dan tidak ada adaptasi antara budaya Barat dengan budaya Timur, maka timbul suatu gagasan sintese sebagai ideologi Kolonial yang mencoba menggambarkan masyarakat Kolonial yang berkembang menuju ke suatu sintese antara Barat dan Timur dengan menempatkan dalam rangka proses budaya besar, yaitu pertemuan antara dua budaya Barat dan Timur (Poesponegoro, 1992: 1).

BAB V

PENUTUP

Penelitian tentang Kota Pontianak sebagai bandar dagang di jalur sutera, dapat memberikan gambaran penting pelabuhan Pontianak sebagai bandar pelabuhan terbesar di Kalimantan Barat. Pontianak mempunyai letak yang sangat strategis dengan pantai yang agak menjorok ke daratan dan berada di simpang tiga sungai besar yaitu Sungai Landak yang mengalir dari arah timur laut, Sungai Kapuas kecil mengalir dari arah timur dan Sungai Kapuas besar mengalir ke arah barat menuju laut lepas. Kondisi seperti itu sangat mendukung bagi pelabuhan Pontianak, dimana kapal-kapal yang datang dan singgah di pelabuhan Pontianak akan lebih terjamin keamanannya, karena dapat dipantau dan diawasi secara langsung oleh pihak penguasa yaitu Keraton Kadriah. Hal ini merupakan jalan atau kemudahan yang terpenting untuk menyelenggarakan transportasi dan komunikasi dan merupakan hal yang bersifat taktis dan strategis untuk kepentingan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan militer.

Dalam suasana yang amat sibuk dalam dunia perdagangan pada abad ke-19 jatuhnya kerajaan-kerajaan besar di Kalimantan Barat, seperti kerajaan Sambas, kerajaan Sukadana, kerajaan Kubu dan kerajaan Sintang menyebabkan bergesernya pusat-pusat perdagangan sebagai akibat dari peperangan yang membawa dampak berkembangnya Pontianak menjadi pelabuhan terbesar dan sekaligus sebagai kota perdagangan terbesar di Kalimantan Barat.

Perkembangan daerah Pontianak membuat jalur perdagangan semakin ramai dengan kedatangan kapal-kapal Nusantara dan kapal-kapal asing ke pelabuhan Pontianak dengan barang-barang dagangan untuk dipasarkan di daerah Kalimantan Barat dan sekembalinya kapal-kapal tersebut mengangkut barang-barang komoditi berupa berlian, emas, lilin, rotan, karet, lada, tepung sagu, gambir, pinang, sarang burung, kopra, tengkawang dan lain-lain. Hal ini dikarenakan Kalimantan Barat mempunyai potensi yang besar dengan kekayaan alam yang melimpah.

Dari hutan-hutan tradisional di Kalimantan Barat, menghasilkan barang-barang komoditi seperti lilin lebah, kapur barus, kayu kemenyan, madu sarang burung dan sebagainya.

Dari hasil pertambangan meliputi emas, platinum, intan dan batu bara dalam jumlah yang besar, di samping juga hasil-hasil dari laut.

Dari hasil pertanian diutamakan untuk tanaman-tanaman seperti: kelapa, sawit, karet, lada, yang sangat laku di pasaran internasional.

Potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Barat ini memacu para pedagang terutama pedagang-pedagang Cina dan Eropa untuk datang ke Kalimantan Barat, sehingga berbagai cara dan upaya dilakukan untuk memperoleh barang-barang komoditi tersebut.

Kedatangan para pedagang asing ke Kalimantan Barat itu dipelopori pedagang-pedagang dari Cina. Mereka datang ke Kalimantan Barat pada abad kw-17 dengan menempuh dua jalur. Jalur pertama melalui Indocina terus ke Malaya dan menyebar ke pantai Kalimantan Barat terutama di Sambas dan Mempawah, sedangkan jalur kedua melalui Kalimantan Utara menuju ke daerah pedalaman dan Mempawah Hulu untuk mencari tambang emas dan akhirnya mereka berhasil menemukan tambang emas di daerah Mandor, Budog dan Monterado. Dengan diketemukannya tambang emas tersebut, maka terjadilah imigran besar-besaran Cina ke Kalimantan Barat, bahkan banyak dari mereka yang kemudian melakukan perkawinan campuran dengan penduduk asli Kalimantan Barat yaitu suku Dayak, sehingga terjadilah percampuran darah dan

keturunan mereka mengaku dirinya sebagai orang Cina, sehingga Cina ini lebih dominan dan akhirnya merekalah yang mendominasi perdagangan di Kalimantan Barat pada umumnya dan di Pontianak pada khususnya. Mereka mempunyai status yang lebih tinggi dari pada penduduk asli Kalimantan Barat, sehingga menimbulkan gejolak yang akhirnya timbul pergolakan di antara mereka.

Sejarah Cina di Kalimantan Barat ini sampai dengan datangnya bangsa-bangsa Eropa, seperti bangsa Portugis, Belanda dan Inggris dengan memanfaatkan adanya hubungan yang dinamis antara daerah-daerah Asia yang beriklim khatulistiwa yang kaya akan jenis tumbuh-tumbuhan dengan daerah yang beriklim sub tropis yang sudah maju di bidang industri sehingga dapat menghasilkan produk yang laku di pasaran, keadaan seperti itu sangat menunjang bagi pedagang Eropa, kedatangan mereka di Kalimantan Barat mempunyai motif yang sama yaitu berdagang, namun lama kelamaan timbul nafsu keserakahannya untuk memonopoli perdagangan terutama rempah-rempah.

Dengan politik yang dijalankan, mereka melakukan perluasan wilayah sehingga kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat berada dibawah kekuasaan Belanda, sehingga terjadi perubahan di bidang pemerintahan, karena kerajaan tersebut harus taat kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Belanda dengan kewajiban membayar upeti/pajak. Di lain pihak, pemerintah kolonial Belanda lebih berorientasi pada perkebunan karet, kelapa sawit, kakao, cengkeh dan lada yang merupakan barang komoditi yang sangat dibutuhkan oleh mereka.

Di sisi lain, penelitian ini ternyata telah memberikan wawasan baru mengenai kehidupan dari para pedagang baik pedagang Nusantara maupun pedagang asing, dimana dengan adanya potensi yang ada di Kalimantan Barat, maka tidak sedikit para pedagang yang kemudian tertarik untuk bermukim di Pontianak, dengan izin Sultan mereka kemudian mendirikan perkampungan yang berorientasi pada daerah atau negara dari

pedagang-pedagang tersebut berasal, sehingga di Kalimantan Barat ini terdapat Kampung Tambelan, Kampung Banjar, Kampung Bugis, Kampung Jawa, Kampung Bangka-Belitung, Kuantang, Kampung Kamboja, Kampung Bansir, Kampung Saigon dan Kampung Arab sehingga heterogenitas etnis menjadi salah satu ciri utama komposisi penduduk Pontianak.

Penelitian ini juga memberikan suatu fenomena bahwa Pontianak sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan merupakan pusat federasi daerah-daerah swapraja dan noeswapraja di seluruh Kalimantan Barat, sehingga menarik penduduk perhuluan untuk melakukan urbanisasi, namun suku Dayak yang merupakan penduduk asli Kalimantan Barat justru kurang tertarik untuk berurbanisasi ke Pontianak, padahal suku bangsa lain dari luar Kalimantan Barat secara terus menerus berimigrasi ke Pontianak. Hal ini disebabkan orang Dayak selalu mengikuti filsafat dalam hidupnya bahwa hakekat kehidupannya adalah sebagai petani padi, sehingga kehidupan mereka tidak nomaden karena mereka tidak menganut sistim perdagangan berpindah.

Masuknya bangsa-bangsa pelaut telah menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat besar dan masyarakat Kalimantan Barat melalui jalinan hubungan yang erat dengan memperlihatkan kepada penduduk setempat mengenai tradisi besar yaitu masuknya agama/religi sebagai salah satu sistem budaya yang sangat mendasar sekali dalam kehidupan mereka, terutama bangsa-bangsa pelaut dari Arab, Persia dan Gujarat dengan agama Islam yang mereka bawa, sehingga terjadi perpaduan budaya di antara keduanya karena mempunyai kepercayaan atau religi yang sama yaitu agama Islam.

Proses Islamisasi dapat berjalan dengan damai di Kalimantan Barat tanpa ekspedisi militer yaitu melalui jalur perdagangan, perkawinan dengan elit birokrasi dan ekonomi serta sosialisasi langsung pada masyarakat bawah. Perkembangan Islam yang sangat merakyat ini mempunyai peranan yang sangat besar, yaitu kerajaan Pontianak sebagai pusat pengembangan agama Islam, yang mampu menggeser sistem budaya lama.

DAFTAR PUSTAKA

Alqadrie, Syarif Ibrahim dan A.B. Tandililing. 1980. **Sejarah Kerajaan dan Perkembangan Kota Pontianak**. Pontianak: Depdikbud/Universitas Tanjungpura, DP3M Ditjen Pendidikan Tinggi.

Alqadrie, Syarif Ibrahim. 1984. **Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak**. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

-----, dan pandit Sastrowardoyo. 1984. **Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak**. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Ambary, Hasan. Muarif. 1997. **Dinamika Sejarah dan Sosialisme Islam di Asia Tenggara**. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Arman, Syamsuni. 1994. "Analisa Budaya Manusia Dayak", **Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Trasformasi**. Jakarta: Kerjasama LP3ES – Institut of Dayakology Research and Development dengan PT. Gramedia.

Arsip Nasional Republik Indonesia. 5 Juli 1779. **Borneo-West**, 16/26.

-----, **Besluit**, 9 April 1843 No. 9.

- **Besluit, 20 Mei 1844 No. 4.**
- **1847. Borneo-West, 41/43.**
- **1973. Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848. Jakarta.**
- Basel, **W.H. Sena van. 1874. Een Dajaksch Dorp op Borneo's Weskust. Deel 1.**
- Booth, **Anne. 1988. Sejarah Ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES.**
- Cator, **Writser Jans. 1936. The Economic Position of the Chinese in netherlands India. Oxford.**
- Coomans, **Mikhail. 1987. Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan. Jakarta: PT. Gramedia.**
- Departemen Van Economisch Zaken Volksteling. **1930. Inheemsche bevolking van Borneo, Celebes, De Kleine Sunda Erlandern ende Molukken. Deel V.**
- Dja'in, **Noerdin. 1972. Petunjuk Teritorial Daerah Kalimantan Barat. Pontianak: SUDAM XII Tanjungpura.**
- Djuweng **Stepanus. 1996. Manusia Dayak Orang Kecil Yang Terperangkap Modernisasi. Pontianak: Institute of Dayakology Research and Development.**
- Effendi, **Machrus. 1982. Sejarah perjuangan Kalimantan Barat. Pontianak: Harian Angkatan Kalimantan Barat.**
- Kartodirdjo, **Sartono. 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Emporium Sampai Imperium. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.**
- La Ode, **M.D. 1997. Tiga Muka Etnis Cina - Indonesia: Fenomena Di Kalimantan Barat. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika.**

- Lapian, Adrian B. 1997. **Laut, Pasar dan Komunikasi Budaya**. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Lombard, Denys. 19096. **Nusa Jawa: Silang Budaya (Kajian Sejarah Terpadu) jaringan Asia**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lontaan, J.U. 1975. **Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat**. Pontianak: Pemda Tingkat I Kalimantan Barat.
- Maddison, Angus, 1988. "Kolonialisme Belanda di Indonesia: Suatu Perspektif Berdasarkan Perbandingan", Anne Booth, Willam J.O'Malley dan Anna Weideman (ed.) **Sejarah Sosial Ekonomi**. Jakarta: LP3ES.
- Mirza, Tuti Istini, Basini. 1997-1998. **Pontianak Dalam Nuansa "Tempo Doeloe"**. Pontianak: Depdikbud, Museum Negeri Kalimantan Barat.
- Mubyarto. 1992. **Perekonomian Rakyat Kalimantan**. Yogyakarta: Aditya Media.
- Naerssen, F.H. van. 1951-1952. **Een Streekoderzoek in West Borneo**. 5^e Jaargan.
- Pan-Hajad. **Sejarah Lahirnya Kota Pontianak**. Pontianak: Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- Poelinggomang, Edward. L. 1996. **Perdagangan Maritim: Sumber Daya Ekonomi Dan Manusia Kawasan Timur**. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. **Sejarah Nasional Indonesia III**. Jakarta: Balai Pustaka.
- . 1992. **Sejarah Nasional Indonesia IV**. Jakarta: Balai Pustaka

- Purcell, Victor. 1995. **The Chinese in Southeast Asia**. London: Oxford University Press.
- Syafei, Mahyudin. 1989-1990. **Usaha Pembauran Masyarakat Antara Warga Keturunan Cina Dengan Warga Indonesia Asli Di Kotamadya Pontianak**. Pontianak: Proyek Peningkatan perguruan Tinggi Universitas Tanjungpura.
- Sellato, Bernard. 1989. **Hornbill and Dragon**. Jakarta: PT. Gramedia.
- Siahaan, Harlem. 1989. "Pembauran Di Kalimantan Barat prospek dan perspektif Sejarahnya: **Interaksi Antarsuku Bangsa Dalam Masyarakat Majemuk**. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Soedarto, dkk., 1986. **Peta Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat**. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
- , 19/8-19/9. **Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat**. Jakarta : Depdikbud, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.
- Sulistiyono, Singgih, Tri. 1997. **Dibawah Bayang-Bayang Ekonomi Agraris: Dinamika Sektor pelayaran Pribumi Di Jawa memasuki Abad XX**. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Sumadi. 1973. **Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara**. Pontianak: Yayasan Tanjungpura.
- Surjo, Djoko. 1989. "Kota dan pembauran Sosio-Kultural Dalam Sejarah Indonesia", **Interaksi Antarsuku Bangsa Dalam Masyarakat Majemuk**. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

- Suwitha, I Putu gede. 1997. "Loloan, Bandar Laut dan Hubungan Antar Budaya", Kongres Nasional Sejarah. Jakarta: Depdikbud.**
- Trinidarwanti. 1999. Jalur Perdagangan Serat Sutera. Kompas, Minggu 24 Januari 1999.**
- Veth, P.J. 1854. Borneo's Wester Afdeeling, Dell I. Zattbommel.**
- Vleming, J.L. 1926. Het Chineesche Zakenleven in Nederland Indie. Weltevreden.**

Peta Mini

PROPINSI DAERAH TK I KALIMANTAN BARAT



PROPINSI KALIMANTAN BARAT terbagi atas 7 Daerah Tingkat II (DATI II)

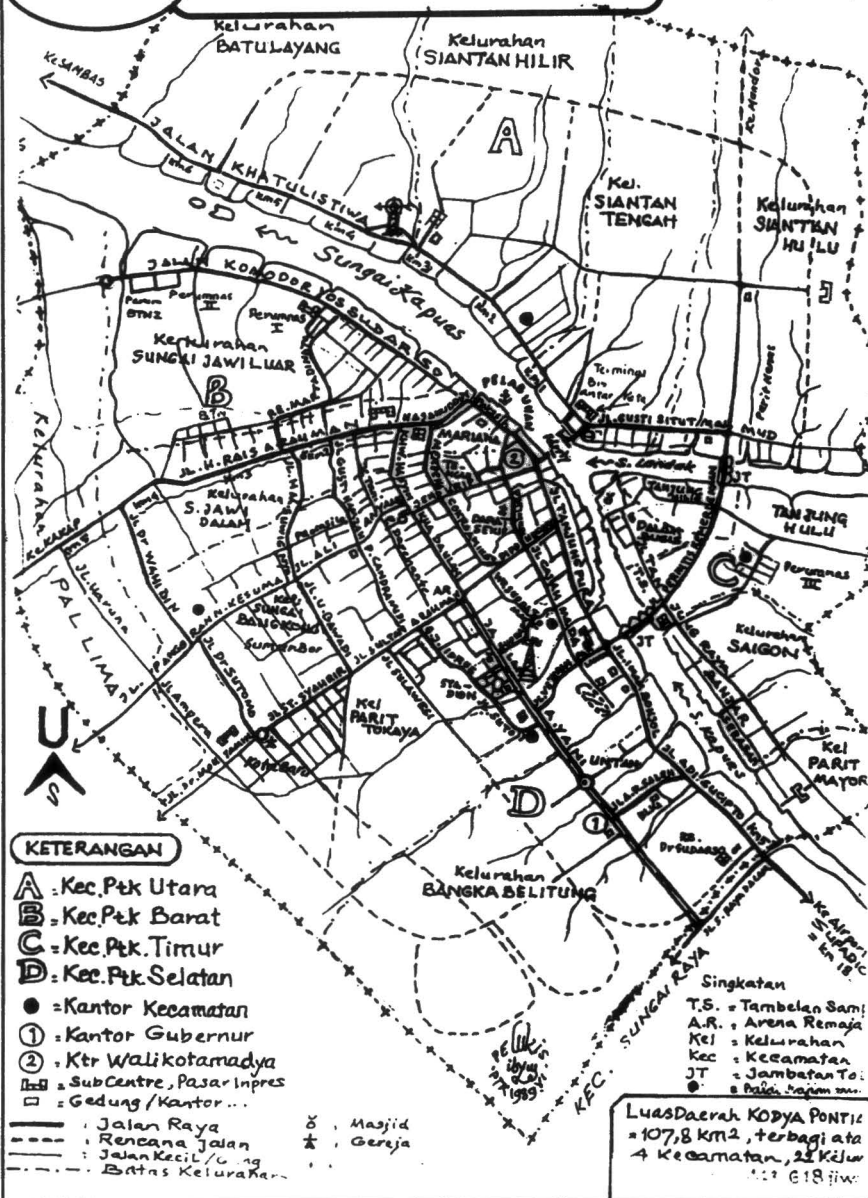
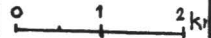
No.	Nama Daerah TK II	Luas (Km ²)	Kecamatan	Desa/Kel	Penduduk 1989
1.	Kotamadya Pontianak	107,8	4	22	443.618
2.	Kabupaten Pontianak	18.171,2	19	944	836.930
3.	Kabupaten Sambas	12.296,0	17	600	696.218
4.	Kabupaten Ketapang	35.809,0	14	309	324.592
5.	Kabupaten Sanggau	18.302,0	20	1.174	380.759
6.	Kabupaten Singang	32.279,0	18	1.145	315.548
7.	Kabupaten Kapuas-Hulu	29.842,0	16	496	150.504
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat		146.807,0	108	4690	3.148.169

Sumber Data : Kantor Statistik Propinsi Kalbar

Peta Mini

KOTAMADYA PONTIANAK

Skala 1: 50.000



KETERANGAN

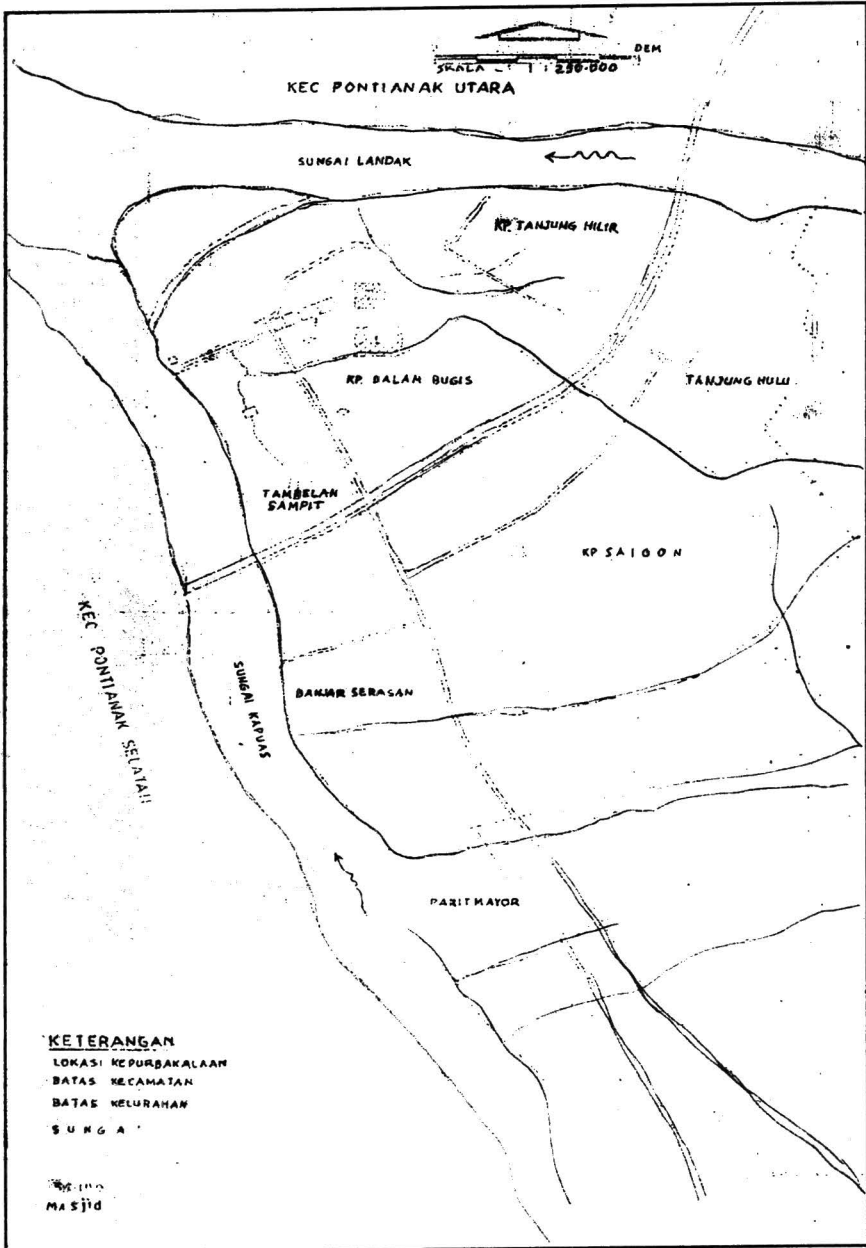
- A : Kec. Ptk Utara
- B : Kec. Ptk Barat
- C : Kec. Ptk. Timur
- D : Kec. Ptk Selatan
- = Kantor Kecamatan
- ① = Kantor Gubernur
- ② = Ktr. Wali kotamadya
- ⊠ = Sub Centre, Pasar Inpras
- = Gedung / Kantor ...

- Jalan Raya
- - - Rencana Jalan
- Jalan Kecil / Ujung
- · - · - Batas Kelurahan
- ⊕ Masjid
- ✠ Gereja

- Singkatan
- T.S. = Tambelan Sami
 - A.R. = Arena Remaja
 - Kel. = Kelurahan
 - Kec. = Kecamatan
 - JT = Jambatan Tol
 - = Peta. Nopam ...

Luas Daerah KODYA PONTIANAK = 107,8 km², terbagi atas 4 Kecamatan, 22 Kelurahan, 112 RT, 618 jiwa

PETA KEC POTIANAK TIMUR





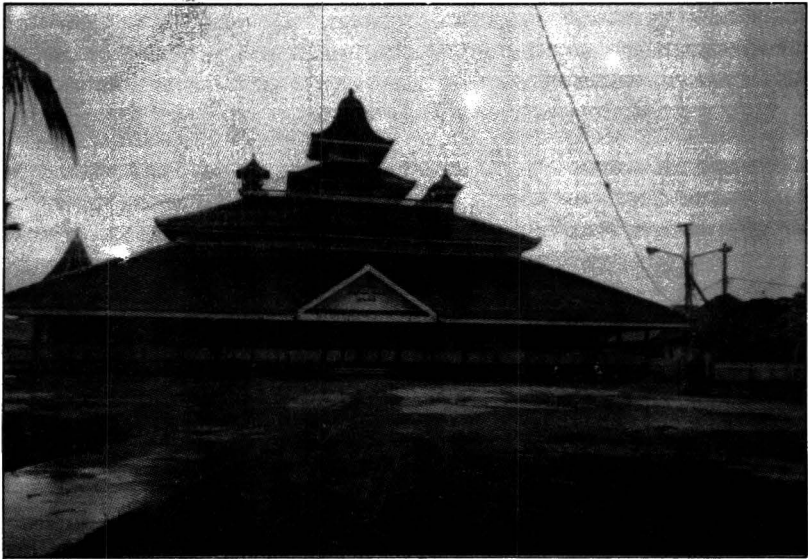
Poto 1 : Pelabuhan Pontianak "Seng Hie"



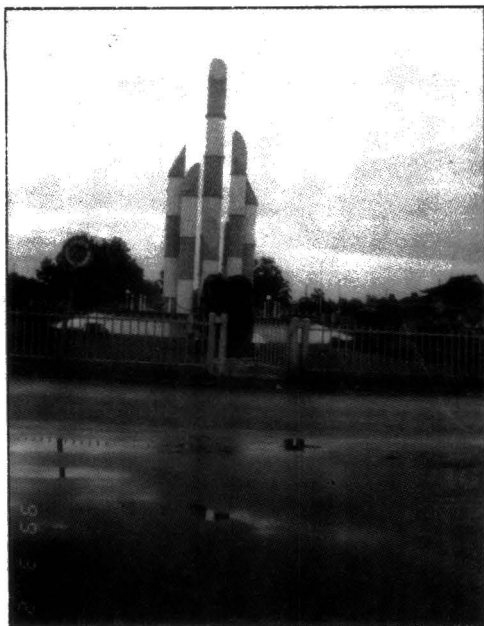
Poto 2 : Aktifitas di Pelabuhan "Seng Hie"



Poto 3 : Keraton Kadriah



Poto 4 : Mesjid Jami



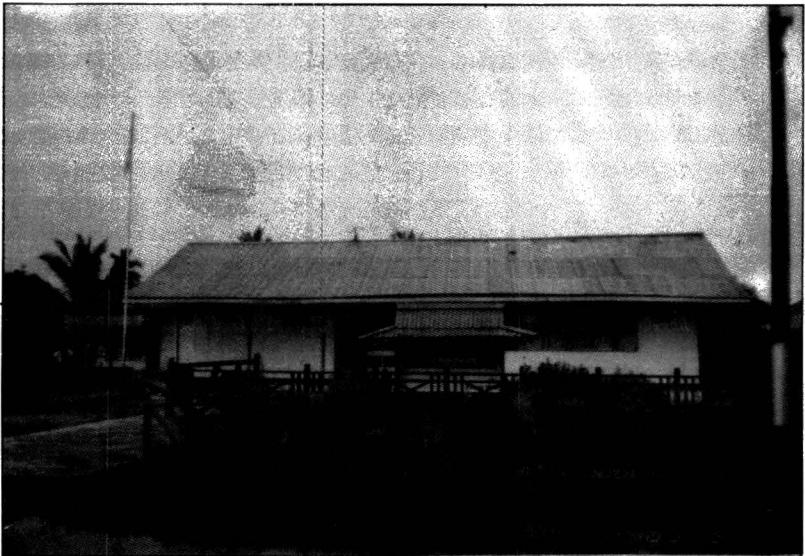
Poto 5 : Tugu Digoelis



Poto 6 : Tugu Khatulistiwa



Poto 7 . Kampung Bugis



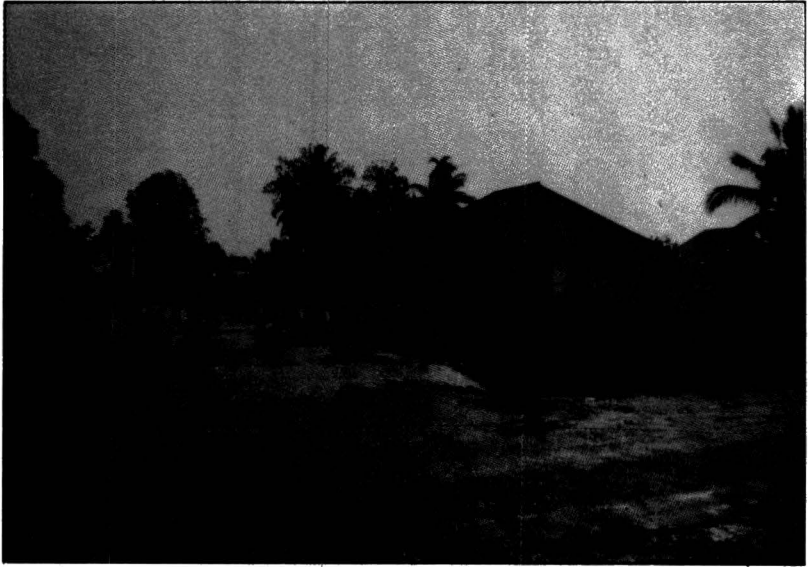
Poto 8 : Kelurahan Dalam Bugis



Poto 9 : Perkampungan Bangka-Belitung



Poto 10 : Kampung Kamboja



Poto 11 : Kampung Saigon



Poto 12 : Kampung Arab



Poto 13: Rumah Panjang

004834.2



G1.1

K